BADAN POM

WBBM WBK SETARA BERDAYA BADAN POM BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif #bangga melayani bangsa

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BALAI BESAR POM DI PADANG

TRIWULAN I

2025

REVISI 2



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM NO 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama No. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target triwulan I Tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target tahunan dan target akhir periode Renstra 2025-2029.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan target indikator kinerja Triwulan I tahun 2025 tertuang pada revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada periode selanjutnya

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada periode berikutnya.

Padang, 30 April 2025
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DIPADANG

Dra. Hilda Murni, Apt., M.M.

Tim Penyusun

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.04.25.64 Tahun 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



Penanggungjawab : Drs. Hilda Murni, Apt., M.M.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm
Sekretaris : Vera Sribanon, S.Si., Apt.

ANGGOTA :

1. Linda Gusrini F, S.Si., Apt., M.Farm.
2. Dra. Patria Dehelen, Apt.
3. Aria Bogorianti, S.Si., Apt.
4. Fitra Yelli, S.Farm., Apt., M.Farm
5. Rina Syukrina, S.Farm., Apt.
6. Azfrianty, STP., M.Farm.
7. Fitria, S.Si., Apt.
8. Reni Sepriyanti, S.Farm., Apt.
9. Yelvina, S.Si., Apt.
10. Thudesy Cameryta, S.Farm., Apt., M.Farm
11. Mutiara Yulanda, S.Farm., Apt.
12. Ade Cahyana, S.Si., Apt., M.Pharm
13. Dilla Shavera, S.Si, Apt. M.Biomed
15. Nining, S.Farm., Apt
16. Vera Sribanon, S.Si., Apt.
17. Bambang Hermanto, S.M., M.M.
18. Airin Muchlis, S.E.
19. Sony Aulia Dwita AM, S.E.
20. Nery Revisa, S.E., M.Sc

EDITOR :
Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M.Eng
Taruna Wadi, S.Kom.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Tim Penyusun iii

Daftar Isi iv

Daftar Gambar vi

Daftar Tabel vii

Daftar Lampiran xi

Ringkasan Eksekutif xii

Highlight xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 4

1.4 ISU STRATEGIS 5

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 5

1.4.2 ISU STRATEGIS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 13

1.4.3 PERMASALAHAN UTAMA 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 24

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025 29

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 31

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 34

2.5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 38

3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I 43

3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II 80

3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III 84

3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV 89

3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V 104

3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI 109

3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII 113

3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII 116

3.1.9 Pencapaian Sasaran Kegiatan IX 118

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 125

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 162

3.6. REALISASI ANGGARAN 169

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 184

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA 188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	4
Gambar 1.2.	Profil SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan umur	8
Gambar 1.3.	Peta Wilayah Sumatera Barat	12
Gambar 3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Profil SDM Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2.	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.3.	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan	13
Tabel 2.1.	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	27
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	29
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 2.4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	38
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW I – Tahun 2025	39
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.	43
Tabel 3.4.	Capaian Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I tahun 2025	45
Tabel 3.5.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46
Tabel 3.6.	Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	46
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025	51
Tabel 3.8.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	52
Tabel 3.9.	Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	53
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025	58
Tabel 3.11.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	58

Tabel 3.12.	Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	59
Tabel 3.13.	Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I tahun 2025	62
Tabel 3.14.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	63
Tabel 3.15.	Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	63
Tabel 3.16.	Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025	66
Tabel 3.17.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	66
Tabel 3.18.	Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	67
Tabel 3.19.	Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025	71
Tabel 3.20.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025	72
Tabel 3.21.	Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	73
Tabel 3.22.	Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025	75
Tabel 3.23.	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	76
Tabel 3.24.	Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir	77

Renstra
Tabel 3.25. Capaian Persentase Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 81
Tabel 3.26. Hasil Perhitungan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 82
Tabel 3.27. Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I -2025 terhadap Target Akhir Renstra 82
Tabel 3.28. Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 86
Tabel 3.29. Hasil Perhitungan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I 2025 87
Tabel 3.30. Perbandingan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 87
Tabel 3.31. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV 90
Tabel 3.32. Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW I - 2025 92
Tabel 3.33 Perhitungan realisasi Tingka Efektifitas KIE Triwulan I 2025 92
Tabel 3.34 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 93
Tabel 3.35 Capaian Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025 95
Tabel 3.36 Progres IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I 2025 95
Tabel 3.37 Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 96
Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 98
Tabel 3.39 Progres IKU Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 98
Tabel 3.40 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 99
Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2024 101

Tabel 3.42	Progres IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TW I - 2025	101
Tabel 3.43	Perbandingan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	102
Tabel 3.44	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	106
Tabel 3.45	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	106
Tabel 3.46	Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	106
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan I Tahun 2025	110
Tabel 3.48	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	111
Tabel 3.49	Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	111
Tabel 3.50	Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025	114
Tabel 3.51	Hasil Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Bulan Januari, Februari dan Maret 2025	115
Tabel 3.52	Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	115
Tabel 3.53	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025	159
Tabel 3.54	Realisasi Anggaran per Indikator Triwulan I Tahun 2025	170
Tabel 3.55	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025	173
Tabel 3.56	Realisasi Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	174
Tabel 3.57	Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan I Tahun 2025	175
Tabel 3.58	Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025	178
Tabel 3.59	Nilai Efisiensi Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025	181

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029
3. SK IKU tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 Revisi
6. Nilai Pencapaian Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
7. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan Januari Tahun 2025
8. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan Februari Tahun 2025
9. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan Maret Tahun 2025
10. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output Balai Besar POM di Padang Bulan Januari Tahun 2025
11. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output Balai Besar POM di Padang Bulan Februari Tahun 2025
12. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output BBPOM di Padang Bulan Maret Tahun 2025
13. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan Januari 2025
14. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan Februari 2025
15. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan Maret Tahun 2025
16. Capaian tingkat Efisiensi per-IKU Triwulan I Tahun 2025
17. Capaian tingkat Efisiensi per-Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025
18. Capaian Realisasi Anggaran Per-Sasaran Strategis Balai Besar POM di Padang TRiwulan I Tahun 2025
19. Kertas Kerja Realisasi IKU Triwulan I 2025
20. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan Januari sd Maret Tahun 2025
21. Surat Keputusan Kepala BBPOM di Padang tentang Tim Laporan Kinerja Tahun 2025

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun Triwulan I Tahun 2025 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan I tahun 2025, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ditunjukkan oleh hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis yang merupakan hasil seluruh realisasi indikator kinerja. Nilai NKO Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 93,47% dengan kriteria Baik



Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I Tahun 2025 diwujudkan dalam sembilan (sembilan) sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Sangat Baik”, 4 sasaran strategis memperoleh capaian “Baik”, 1 sasaran memeperoleh “Kurang”, dan 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Kesembilan sasaran kegiatan tersebut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 90.67 (Baik)
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100% (Baik)
3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 105,87% (Sangat Baik).
4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,48% (Baik).
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu, nilai capaian sasaran kegiatan 124,14% (Tidak Dapat Disimpulkan).
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 47,06% (Kurang).
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100,00% (Baik)
8. Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang prima, capaian belum dihitung pada Triwulan I 2025.
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal capaian belum dihitung pada Triwulan I 2025.

Capaian kinerja terhadap 16 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% $<$ x $\leq$ 110%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 105,87%.

b. Indikator dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% $<$ x $\leq$ 110%) sebanyak 8 IKU yaitu :

1. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 92,82%
2. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 92,65%
3. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100,00%
4. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 97,92%
5. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%

6. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%
7. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%
8. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100%

c. Indikator dengan kriteria Cukup (dengan capaian 60% ≤ x < 90%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 74,64%

d. Indikator dengan kriteria Kurang (dengan capaian < 60%) sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 44,56%
2. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 47,06%

e. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian > 110%) sebanyak 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 111,10%
2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
3. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 123,05%
4. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 124,14%

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada Triwulan 1 Tahun 2025 berkisar antara 44,56% sampai dengan 124,14%. Persentase capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Rendahnya nilai capaian kinerja ini disebabkan pada awal tahun, masih sedikit sarana yang bisa mengirimkan CAPAnya karena sarana masih membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Selain itu pemeriksaan baru mulai dilakukan pada akhir bulan Januari sehingga sarana yang diperiksa baru sedikit dan hal ini menurunkan peluang untuk mendapatkan CAPA yang lebih banyak dari pelaku usaha maupun lintas sektor terkait. Untuk mencapai target kinerja ini, diperlukan pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan.

Kegiatan ini dapat berupa:
a. Mengingatkan petugas sarana terkait agar memastikan surat tindak lanjut/ keputusan rekomendasi hasil pemeriksaannya terkirim kepada pelaku usaha, baik secara hardcopy maupun softcopy.
b. Mengingatkan petugas sarana terkait agar selalu melakukan komunikasi secara terus menerus melakukan pengawalan sehingga pelaku usahanya segera mengirimkan CAPA.
c. Melaksanakan koordinasi dan jika diperlukan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait agar segera melakukan pembinaan kepada pelaku usaha daerah binaannya. Pembinaan ini merupakan suatu output CAPA yang dapat dikirimkan lintas sektor terkait dan dapat dihitung sebagai respon tindak lanjut lintas sektor

Persentase capaian indikator tertinggi adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Tahapan kegiatan pendampingan pada Triwulan I yang telah dilakukan adalah penetapan target UMKM Pangan, UMKM OBA, UMKM Kosmetik, dan pendampingan terhadap UMKM Pangan dan Kosmetik. Hasil capaian pendampingan UMKM adalah 124,14% (Tidak dapat disimpulkan), hal ini disebabkan progres tahapan pendampingan pada sarana pangan olahan melebihi target yaitu 18 (target 14,5).

Kegiatan KIE Keamanan Pangan yang direncanakan pada triwulan 2 mengingat jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan IP CPPOB masih terbatas, dalam realisasinya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada bulan Maret sehingga hasil capaian pendampingan UMKM jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Diperlukan perencanaan yang lebih tepat agar realisasi kegiatan sesuai denganyang direncanakan.

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Penetapan target sarana UMKM Pangan. OBA dan Kosmetik yang akan di dampingi dilakukan dengan memastikan komitmen masing-masing pelaku usaha akan melaksanakan tahapan pendampingan secara konsisten; KIE Keamanan Pangan dapat dilaksanakan pada Triwulan I yang sebelumnya direncanakan pada Triwulan II mengingat jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan IP CPPOB masih terbatas; Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada UMKM yang yang sudah didampingi pada tahun 2024 tetapi belum terbit sertifikat IP CPPOB/sertifikat CPOTB bertahap/SPA CPKB; Melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha yang sedang melakukan pengajuan izin edar, sehingga tahapan pendampingan oleh pelaku usaha akan ditindaklanjuti fasilitator dengan melanjutkan tahap pendampingan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 3.111.535.304 (Tiga milyar seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) atau sebesar 8,47% dari total pagu anggaran Tahun 2025 awal yaitu sebesar RP. 36.739.481.000 (Tiga puluh enama milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 15,85% dari total pagu anggaran setelah blokir yaitu sebesar Rp. 19.633.085.000 (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga jutadelapan puluh lima ribu rupiah) per 31 Maret 2025.

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan capaian persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis dengan persentase capaian masing-masing sasaran strategis BBPOM di Padang maka diperoleh kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 90%.



Highlight

Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Kab. Pesisir Selatan

Program Makan Bergizi Gratis berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawasi kualitas makanan yang akan didistribusikan. Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan program Makan bergizi Gratis untuk pertama sekali pada Hari Senin, tanggal 13 Januari 2025. Plt Balai Besar POM (BBPOM) di Padang, Hilda Murni bersama Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Kepala Dinas Kesehatan Agustina, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, dan Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Derry Indra ikut menghadiri Program Makan Bergizi Gratis di SDN 08 Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai.



Program Makan Bergizi Gratis di Kota Pariaman



BBPOM di Padang turut berkontribusi dalam menyukseskan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didistribusikan di kota pariaman pada tanggal 6 Januari 2025..
Program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) secara serempak di seluruh Indonesia, dan untuk Running pertama di Provinsi Sumatera barat, dilakukan di Kota Pariaman. Makan Bergizi Gratis diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) de ngan mitra Asmaul Kalidamang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No 10 Alai Galombang kota Pariaman ,
Plt Kepala BBPOM di Padang. ibu Hilda Murni memberikan pengarahan kepada pelaksana program terkait keamanan makanan bergizi dari cemaran biologi, cemaran kimia dan cemaran fisik serta mengenai prosedur menjaga kebersihan makanan mulai dari tahap unit-unit pengolahan hingga distribusi. Untuk memastikan pemenuhan asupan gizi anak-anak, program pemberian makanan bergizi gratis juga perlu memperhatikan aspek kebersihan makanan, guna mencegah munculnya penyakit akibat cemaran.

Rayakan Ulang Tahun BPOM ke 28



Memperingati HUT ke-24 BPOM RI tanggal 31 Januari, UPT BPOM di seluruh Indonesia serentak menyelenggarakan acara Car Free Day (CFD) dengan tema "Cek Produkmu Bersama BPOM" pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan tersebut di GOR H Agus Salim Padang Kavling A pukul 06.00 WIB – 10.00 WIB. Acara dimulai dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti lebih dari 150 peserta, dilanjutkan dengan sambutan dari Plt Kepala Balai Besar POM di Padang Hilda Murni. Pada kesempatan ini juga diadakan minum jamu bersama dengan para peserta yang hadir dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diantaranya Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumtera Barat, BKKBN Provinsi Sumtera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Acara dilanjutkan dengan penyuluhan terkait Layanan Balai Besar POM di Padang diselingi dengan tanya jawab dan diberikan hadiah kepada para peserta yang berhasil menjawab dengan benar. Pada kesempatan ini juga tersedia Layanan Mobil Keliling untuk pengujian cepat dan pameran produk-produk berbahaya dan produk tanpa izin edar.

KIE Pada Car Free Day "Balanjuang Durian"



Pada CFD tanggal 2 Februari 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan acara yang bertajuk Balanjuang Durian dengan membagikan sekitar 15.000 durian secara gratis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas keberkahan yang diberikan kepada Sumbar sekaligus momen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjelang Ramadhan. Balai Besar POM (BBPOM) di Padang hadir di kegiatan CFD dengan booth mini pameran untuk edukasi masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Pangan yang mengandung bahan berbahaya serta obat tradisional dan kosmetik yang illegal atau tidak memiliki izin edar terpajang di pameran. Aplikasi BPOM mobile juga diperkenalkan kepada pengunjung sebagai salah satu cara untuk melihat keaslian izin edar dari suatu produk.

KIE Kepada Mahasiswa M. Natsir Dalam Rangka “Early Exposure”

Kunjungi Balai Besar POM di Padang pada tanggal 10 Februari 2025 sebanyak 120 Mahasiswa Farmasi bersama Dosen dari Universitas M. Natsir Bukittinggi lakukan Early Exposure. Pada kesempatan ini dilakukan KIE Keamanan Obat dan Makanan dan penyerahan paket edukasi. Selanjutnya diadakan kuis kahoot untuk meningkatkan interaksi kepada peserta dengan pertanyaan seputar materi yang telah diberikan. Kegiatan diakhiri dengan kunjungan langsung ke Laboratorium Balai Besar POM di Padang.



Terima Kunjungan Audiensi ISMAFARSI Wilayah Sumatera BaratI



Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) Wilayah Sumatera II pada tanggal 11 Februari 2025 melakukan audiensi ke Balai Besar POM di Padang sehubungan kegiatan Stake Holder Visit Sumatera II. Diskusi menarik terjalin dalam pembahasan program kerja yang dipaparkan dengan berbagai masukan dari Balai Besar POM di Padang kepada ISMAFARSI Wilayah Sumatera II.

Audiensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan

Pada tanggal 24 Maret 2025 Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang (Hilda Murni) beserta Tim melakukan audiensi kepada Bupati Kabupaten Solok (Jon Firman Pandu) berserta OPD terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang meluputi: Desa Pangan Aman, Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang akan dilaksanakn pada Kabupaten Solok sepanjang Tahun 2025. Pada kesempatan ini juga disampaikan kriteria calon pasar, sekolah dan pasar yang akan diintervensi. Diharapkan melalui audiensi ini dapat membangun komunikasi, sinergitas dan dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program



Penindakan terhadap pengedar obat bahan alam illegal dan mangandung bahan kimia obat berbahaya

Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap peredaran obat bahan alam illegal dan mengandung bahan kimia obat yang beredar di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, PPNS BBPOM di Padang melakukan penindakan terhadap pelaku pengedar obat bahan alam illegal dan yang mengandung bahan kimia obat yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Operasi penindakan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat yaitu pada bulan Maret. Pada operasi penindakan tersebut, PPNS BBPOM di Padang menyita obat bahan alam ilegal dan mengandung bahan kimia obat berbahaya sebanyak 4 Kardus , 1 Box , HP Vivo dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.450.000,- dengan nilai ekonomi Rp. 100.000.000,-. Perkara tersebut, setelah melalui tahapan gelar perkara, disimpulkan telah memenuhi unsur pidana pasal 435 Undang-Undang no.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP. Dengan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BBPOM di Padang tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pengedar obat bahan alam illegal dan mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan obat bahan alam sehari-hari.



BAB I

Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Di Propinsi Sumatera Barat terdapat 3 unit pelaksana teknis yang memiliki cakupan wilayah pada 19 Kabupaten/Kota. Salah satunya Balai Besar POM di Padang, memiliki 9 kabupaten/kota yang menjadi wilayah yang diawasi dalam peredaran obat dan makanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi dilaksanakan secara berkesinambungan. Sedangkan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk tanpa izin edar dan produk-produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Padang.

Balai Besar POM di Padang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa obat-obatan dan makanan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Pengawasan Terhadap Iklan dan label produk obat dan makanan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan produk yang akan dikonsumsi. Dengan adanya Balai Besar POM di Padang, penduduk Sumatera Barat atau masyarakat pada 9 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memiliki keyakinan bahwa obat dan makanan yang mereka konsumsi telah melewati proses pengawasan dan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sampai akhir Tahun 2025 yang merupakan tahun kesatu atau tahun pertama Renstra 2025-2029 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek

keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang dan Penetapan Renstra selanjutnya. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip- prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk Implementasi Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat da Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang masih terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis lainnya yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 9 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok.

Untuk 10 Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan lainnya yaitu:

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh**,** dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung, dengan wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;

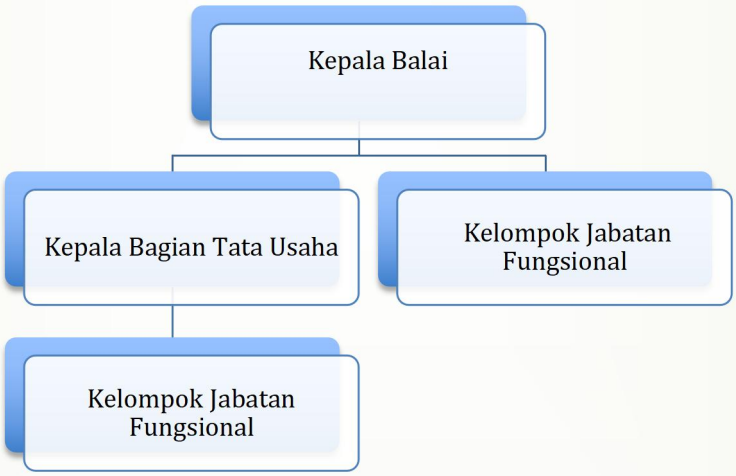
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala Balai;
b. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi

komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangandan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan Adminstrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsioanal sesuai dengan bidang tugas masing-masing

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 Aspek Strategis Organiasi

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 BBPOM di Padang untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis SWOT BBPOM di Padang sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan

farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta Masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai.

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*, kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*. Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah kerjanya meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan

perundangundangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerjannya;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

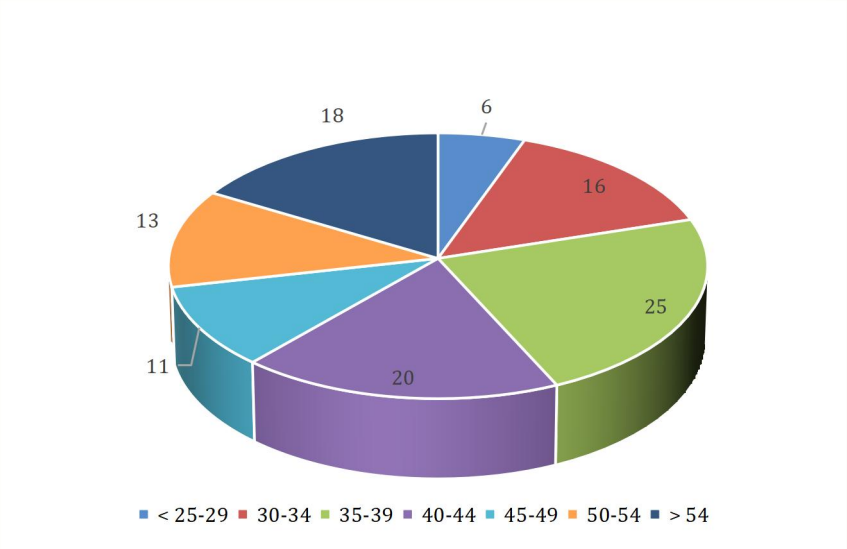
A. Analisis Lingkungan Strategis Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Maret 2025 adalah 109 orang, dengan rincian jumlah berdasarkan umur, golongan dan pendidikan:

a. Umur

Grafik ASN berdasarkan kelompok Umur



Gambar 1.2. Profil SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan umur

b. Golongan

Tabel 1.1. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan II b	2
2	Golongan II c	5
3	Golongan III a	7
4	Golongan III b	25
5	Golongan III c	15
6	Golongan III d	24
7	Golongan IV a	18
8	Golongan IV b	3
9	Golongan IV c	2
10	Golongan IX	7
11	Golongan X	1
Total		**109**

c. **Tingkat Pendidikan**

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 Farmasi	8
2	S2 Teknologi Pangan	1
3	S2 Biomedik	1
4	S2 Kesehatan Masyarakat	1
5	S2 Kimia	1
6	S2 Hukum	2
7	S2 Manajemen	2
8	S2 Teknik Elektro	1
9	S2 Akuntansi	1
10	Apoteker	27
11	S1 Farmasi	3
12	S1 Biologi	7
13	S1 Kimia	11
14	S1 Hukum	5
15	S1 Akuntansi	4
16	S1 lainnya	10
17	D3 Analis Farmasi	11
18	D1	1
19	SMF	5
20	SMAK	1
21	SLTA Umum	6
Total		**109**

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja, total kebutuhan SDM di BBPOM di Padang adalah 132 orang, dengan demikian masih terdapat kekurangan SDM sebesar 23 orang. Saat ini, BBPOM di Padang memiliki 10 orang PPNPN.

2. Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3167 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor BBPOM di Padang yang digunakan seluas 3186 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m2. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan *e-government* setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di *update*. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (*Internet Service Provider*) *Speedy Indihome* 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. BBPOM di Padang sendiri pada tahun 2021 berlangganan internet ISP Lintas Arta dengan kapasitas bandwidth 20 Mbps dan 1 IP Publik, dan pada tahun 2023 di upgrade menjadi 35 Mbps dan 5 IP publik. Pada Tahun 2024, langganan internet pindah ke Fibernet dengan kapasitas bandwidth 80Mbps dengan 5 IP Publik. Tahun 2025, karena kebutuhan internet yang cukup tinggi, Balai Besar POM di Padang berlangganan internet ke ISP icon plus dengan kapasitas bandwidth 100 Mbps dengan 5 IP publik, dan layanan cloud server. Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya *Storage Server, Network Management Sistem (NMS) Server* dan *MRTG Web Server* yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI BBPOM di Padang.

Pasca Pandemi, BBPOM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait dan digunakan sampai sekarang untuk kegiatan daring ataupun *hybrid*. Selain itu BBPOM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Tahun 2021 BBPOM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh *customer* BBPOM di Padang dimana saja dan kapan saja. Sampai saat ini aplikasi Galamai terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan Teknologi Informasi diantaranya menu Buku Tamu Elektronik, Form Kaji Ulang Permintaan Tender dan Kontrak untuk Pengujian Sampel Pihak ke-3, Sistem Mutu. Pada Tahun 2022 Galamai dikembangkan dengan menu Pengukuran Kinerja SDM dan pengukuran kinerja Lapkin.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2025 untuk pemenuhan standar laboratorium, terdapat pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebanyak 21(dua puluh satu) unit

6. Pagu Anggaran Tahun 2025

Anggaran pada awal tahun yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 No SP DIPA-063.01.2.432810/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 36.739.481.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.087.481.000.,- Belanja Barang Rp. 22.525.838.000,- dan Belanja Modal Rp. 5.126.162.000,- . Pada triwulan I ini terjadi efisiensi anggaran pada Badan POM, ini berdampak pada pagu anggaran Balai Besar POM di Padang. Anggaran yang dieffisiensi atau diblokir sebesar Rp. 17.106.396.000,- sehingga pagu anggaran Balai Besar POM di Padang menjadi Rp. 19.633.085.000, - terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.087.481.000,- Belanja Barang Rp. 6.302.574.000,- dan Belanja Modal Rp. 4.243.030.000,-

B. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat

Wilayah Kerja

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.252,24 km^2, yang merupakan *catchment area* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Sijunjung.



Kota

- Padang
- Pariaman
- Padang Panjang
- Bukittinggi
- Payakumbuh
- Solok
- Sawahlunto

Kabupaten

- Padang Pariaman
- Agam
- Sijunjung
- Pesisir selatan
- Mentawai
- Solok
- 50 kota
- Tanah Datar
- Pasaman Barat
- Pasaman Timur
- Solok Selatan
- Dharmasraya

Gambar 1.3. Peta WilayahSumatera Barat

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana yang diawasi target tahun ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sarana Distribusi		Jumlah
1.	PBF	17
2.	Instalasi Farmasi Kesehatan	10
3.	Pusat Kesehan Masyarakat	45
4.	Rumah Sakit	33
5.	Klinik	45
6.	Apotek	99
7.	Toko Obat	25
8.	Distributor OT	74
9.	Distributor SK	28
10.	Distributor Kosmetik	97
11.	Klinik Kecantikan	15
12.	Distributor Makanan	194
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		**682**
Sarana Produksi		
1.	Industri Obat	0
2.	Industri OT	1
3.	UMOT	1
4.	UKOT	1
5.	Industri Kosmetik	3
6.	Industri Makanan (MD)	36
7.	Industri RT (PIRT)	9
8.	Industri Makanan Fortifikasi (MD)	5
TOTAL SARANA PRODUKSI		**51**

1.4.2 Isu Strategis Pengawasan Obat dan Makanan

1. **Pengawalan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)**

   Program Makan Bergizi gratis sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 secara nasional dan juga dilaksanakan juga di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Dalam pelaksanaanya MBG dievaluasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. MBG menjadi isu strategis bagi Badan POM karena ditugasi untuk pengawalan sampling dan pengujian kimia dan mikrobiologi makanan yang akan di bagikan kepada siswa sekolah dan memberikan edukasi tentang pangan yang aman dan bermutu, disamping itu dilakukan

juga inspeksi pada rantai distribusi pasokan makanan. BBPOM di Padang juga menjadi narasumber terkait makanan pada kegiatan program nasional ini dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat.

Dalam pengawalan ini telah dilakukan sampling dan pengujian di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi titik lokasi kegiatan di Sumatera Barat. Untuk kota Padang sudah dilakukan koordinasi dengan Pemda serta Badan Gizi Nasioanl serta Balai Besar POM Padang telah masuk dalam tim keamanan MBG kota Padang. Pada tingkat pemerintah Provinsi telah dilakukan rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait dan melakukan sinergi antar OPD.

2. Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, maka seluruh unit kerja di lingkungan BPOM baik di Pusat dan UPT melakukan pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja. Akibat kebijakan efisiensi anggaran ini maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan melakukan penyesuaian target dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di sembilan Kab/Kota yang menjadi wilayah kerja. Hal ini mempengaruhi perubahan prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi dan distribusi, target kegiatan penyidikan, dan pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi dari luring menjadi daring. Kemudian juga penyederhanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan kondisi kebijakan efisiensi anggaran ini maka akan mempengaruhi ketercapaian target terkhususnya target prioritas nasional yang telah ditetapkan pada DIPA Tahun Anggaran 2025.

Pada akhir Maret terdapat relaksasi anggaran sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sehingga perlu diajaukan revisi pembukaan blokir anggaran 100% untuk 7 rincian output priotas nasional yaitu: Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang, Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT, dan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Namun, pengesahan DIPA atas diajukan revisi buka blokir baru ditetapkan pada tanggal 09 April 2025, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan 1 sesuai anggaran relaksasi. Jadi penyesuaian rencana pelaksanaan kembali kegiatan 7 prioritas nasional tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2, tentunya dengan usaha yang lebih maksimal untuk mengejar tercapainya target.

3. Peran UPT Pencapaian WHO Listed Authority (WLA)

Badan POM terus mengupayakan untuk memperoleh level pengakuan sebagai otoritas regulator obat dan makanan kelas dunia melalui status WHO Listed Authority (WLA). Sejak November 2023, BPOM telah memulai persiapan menuju perolehan status WLA tersebut. Dengan pengakuan WLA, BPOM dapat sejajar dengan otoritas regulatori obat negara maju, seperti United States Food and Drug Administration (US FDA), European Medicines Agency (EMA) Uni Eropa, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) United Kingdom, Health Canada, dan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang. Ini bukan hanya tentang kredibilitas, tetapi juga memastikan produk farmasi Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.

Kantor perwakilan daerah atau Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Badan POM memainkan peran krusial dalam membuktikan bahwa sistem regulasi Badan POM berfungsi efektif hingga level operasional di daerah. Tahapan WHO penilaian lapangan, mengirim tim evaluator internasional untuk melakukan *assessment* langsung ke kantor pusat dan kantor perwakilan daerah. Tim evaluator akan melakukan wawancara dengan manajemen dan teknisi, tinjau pelaksanaan di lapangan (inspeksi, sampling, pengujian) dan cek kesesuaian praktik dengan standar WHO. Balai Basar POM harus mempersiapkan seluruh tahapan evaluasi lapangan apabila dijadikan perwakilan yang akan dikunjungi Tim evaluator WHO.

4. **Renstra Baru 2025 - 2029**

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025 -2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan yang tertuang dalam dokumen RPJPN dan RPJMN. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Perencanaa ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan BPOM untuk periode 2025-2029, disusun indikator yang akan menjadi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Sumatera Barat. Indikator Kinerja merupakan turunan dari sasaran strategis Badan POM, sasaran program dan sasaran kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan metode penyusunan berdasarkan kerangka logis kinerja (*logframe*). Indikator kinerja memuat target-target yang telah disepakati antara Kepala UPT dan Kepala Badan POM yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 25 indikator turunan dari sasaran kegiatan tersebut. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja merupakan pengukuran yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang selama periode yang ditetapkan.

5. **Penyimpangan penyaluran obat yang sering disalahgunakan**

Banyaknya pelanggaran penyaluran obat merupakan suatu tantangan bagi BBPOM di Padang dalam melakukan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Obat-obat yang berpotensi disalahgunakan antara lain OOT, Ketamin, Misoprostol, Semaglutide injeksi dan Dulaglutide injeksi. Adanya peningkatan jumlah peredaran belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh fasilitas distribusi dan pelayanan, bahkan menfasilitasi penyimpangan ini sehingga berdasarkan data Badan POM, banyak

ditemukan pelanggaran pengelolaan OOT dan Ketamin selama tahun 2022 sampai 2024. Selain ini, pengawasan juga lebih diperketat terhadap bahan kimia obat yang sering disalahgunakan dicampurkan ke dalam obat tradisional maupun kosmetik. Beberapa BKO yang pernah disebutkan dalam public warning antara lain Sildenafil Sitrat dan turunannya, Parasetamol, Tadalafil, Dexametason, Sibutramine Hidroklorida, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, dan Piroksikam (Obat Tradisional), Hydroquinone, Tretinoin, Cilndamycin dan Mometasone (Kosmetik). Sehubungan dengan trend ini, BBPOM di Padang memiliki target melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan potensi tinggi pelanggaran peraturan perundan-undangan di bidang obat dan makanan.

6. Stategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 BPOM ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan kegiatan *konvergensi* dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah. Badan POM juga ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fortifikasi pangan. Sesuai dengan tugas yang di berikan pemerintah kepada BPOM pada strategi Nasional percepatan penurunan stunting, Balai Besar POM di Padang mengimplementasikannya dalam sasaran kegiatan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Selain itu juga diimplementasikan pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan indikator kinerja Efektifitas KIE, Jumlah sekolah dengan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan target sekolah di tahun 2025 sebanyak 14 sekolah, Jumlah desa pangan aman dengan target 6 desa ditahun 2025 dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 1pasar ditahun 2025

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Padang sehinga tidak tersedianya pangan fortifikasi yang sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah peningkatkan pembinan dan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, KIE - Langsung maupun KIE Media dan penanganan melibatkan pendekatan komprehensif dengan lintas sektor terkait.

Balai Besar POM di Padang senantiasa mengedukasi masyarakat melalui media sosial (Intagram, Facebook dan Tiktok: @bpom.padang; X: @bbpompadang; subsite: padang.pom.go.id; Galamai: bbpompadang.id) dengan konten "Cegah Stunting" series setiap bulannya. Pelaksanaan KIE Langsung dengan tema "Cegah Stunting" pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 35%. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan pada 2 *locus* stunting yang ada di Wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan plevalensi stunting yang tinggi yaitu: Kelurahan Koto Panjang Kota Solok dan Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

7. Pengawasan Kandungan Gula, Garam dan Lemak Dalam Pangan Olahan

Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan. Peraturan ini mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi kandungan gula, garam dan lemak pada label produk mereka, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih sehat.. Balai Besar POM di Padang dalam kegiatan pengawasan rutin terhadap sarana produksi makanan selalu memberikan edukasi terhadap hal ini karen resiko yang tidak sesuai persyaratan produksi akan membahayakan kesehatan konsumen. Pendampingan UMKM yang terdapat gula, garam dan label gula petugas selalu melakukan edukasi terkait peraturan Badan POM.

Balai Besar POM di Padang mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas melalui kegiatan KIE. Materi batasan konsumsi Gula, Garam dan Lemak dan juga cermat dalam membeli produk dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi terkait kandungan Gula, Garam dan Lemak selalu diikutkan dalam KIE yang dilaksanakan.

8. Penggunaan Antibiotik Tidak Rasional

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menjadi masalah serius dalam kesehatan, beberapa data melaporkan peningkatan resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak terkendali. Resistensi ini bisa membuat antibiotik menjadi tidak efektif dalam mengobati infeksi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan biaya perawatan medis. Masalah antibiotic kompleks dan melibatkan beberapa pihak, solusi yang efektif biasanya melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk edukasi publik yang lebih baik, penegakan regulasi yang ketat, serta kerjasama antara semua pihak terkait untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional tahun 2020 – 2024 mengacu pada Inpres No. 4 tahun 2019 dan PMK No. 7 tahun 2021 telah diupayakan

pengendalian kejadian resistensi antimikroba di Indonesia yang melibatkan multi sektor yaitu manusia, hewan dan lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang terlibat seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotek. Beberapa kegiatan KIE juga secara rutin dilakukan kepada masyarakat baik melalui KIE dengan menghadirkan tokoh masyarakat maupun melalui penyebaran informasi, terakhir dilaksanakan menghadirkan selebgram profesional, Rahmat Hidayat, Apt, B. Pharm, M.Sc sebagai narasumber. Selain itu juga diperlukan pengawasan penggunaan antibiotik di sektor hewan melalui join inspection dengan lintas sektor terkait. Untuk kegiatan ini Badan POM dan Kementerian Pertanian telah membuat pedoman pemeriksaan bersama terhadap rantai distribusi antimikroba antara sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pendekatan ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Balai Veteriner Bukittinggi dan Dinas Pertanian Kota Padang Bidang Kesmavet. Melalui kegiatan koordinasi ini telah disepakati akan melakukan pemeriksaan bersama pada sektor kesehatan hewan dan ke depannya diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan sesuai perencanaan.

9. Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dengan Benar

Sampah obat merupakan salah satu jenis sampah yang dapat berasal dari penggunaan obat-obatan yang tidak maksimal maupun peresepan yang irasional, sehingga menyebabkan adanya obat sisa, tidak terpakai, kemudian menjadi kedaluwarsa. Sampah obat berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan hidup, kesehatan maupun kelangsungan makhluk hidup. Tanpa disadari, menyimpan sampah obat di rumah dapat membahayakan kesehatan karena obat dapat terurai menjadi membentuk senyawa lain. Oleh karena itu, sampah obat harus dikelola dengan baik. Gerakan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar telah diluncurkan oleh Badan POM mulai pada tahun 2019. Balai Besar POM di Padang telah melakukan kegiatan KIE ABSO ini baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dan untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Melalui Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar, masyarakat diberikan edukasi dan diajak untuk melakukan pemusnahan sampah obat secara mandiri sesuai ketentuan. Masyarakat yang tidak dapat memusnahkan sampah obatnya secara mandiri diberikan edukasi dengan tidak membuang sampah obat secara sembarangan.

10. Pendampingan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional dan sektor UMKM tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. BBPOM di Padang selalu mendukung percepatan perkembangan UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik melalui bimbingan teknis dan pendampingan serta berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan bersinergi dengan lintas sektor sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018. Pendampingan dimulai dari penyiapan denah banguan ruang produksi, bimbingan terhadap penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB hingga proses pendaftaran produk UMKM di aplikasi. Pendampingan ini dilaksanakan dengan menerapkan SI JEMPOL (Siap Jemput Bola) sehingga layanan dapat dipercepat dan pelaku usaha merasa puas karena petugas akan langsung melakukan pembinaan ke sarana produksi. Target pendampingan UMKM tahun 2025 sebanyak 11 UMKM Pangan, 1 UMKM Kosmetik dan 1 UMKM Obat Tradisional.

Permasalahan UMKM yang di rasakan petugas di lapangan terkait ketersediaan dana UMKM untuk persiapan ruang produksi, implementasi penerapan cara produksi yang baik dan kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan perangkat dan aplikasi pendaftaran. UMKM di wilayah kerja memiliki budaya dalam berusahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hariannya saja, tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dan nilai dari produk yang di produksinya.

11. Tren Penjualan Obat dan Makanan llegal Secara Online

Terjadinya pergeseran pola distribusi dan promosi sediaan farmasi dan pangan olahan secara online telah menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menglariskan produknya. Penjualan secara online menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, tiktok dan platform *e-commerce.* Untuk itu, penertiban produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu target pengawasan BPOM berdasarkan analisis risiko. BPOM telah melakukan patroli siber secara berkesinambungan untuk mencegah dan menelusuri praktik peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan hasil patroli siber ini dilaporkan ke Direktorat Siber BPOM yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Indonesia E-commerce Association (idEA) untuk dilakukan penurunan konten/*takedown* terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE. Apabila ditemukan indikasi pidana maka akan dilakukan proses Pro justitia oleh PPNS BPOM.

12. Penjualan Obat dan Makanan Secara Daring

Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring menyatakan bahwa produk yang dapat diedarkan secara daring meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Semua komoditi tersebut harus memiliki nomor izin edar sesuai ketentuan dan diedarkan oleh sarana yang memiliki perizinan sesuai ketentuan . Terdapat larangan untuk mengedarkan secara daring untuk obat dan kosmetika tertentu secara langsung kepada masyarakat yaitu obat golongan Narkotika dan Psikotropika, sediaan injeksi dan implan KB sedangkan untuk kosmetika adalah yang mengandung Alpha hidroxy acid (AHA) diatas 10 %, pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan Hydrogen peroxide diats 6% dan Kosmetika isi ulang. Terdapat jenis obat yang dibatasi dalam peredaran daring ini yaitu prekursor farmasi, obat keras golongan Obat-obat tertentu, obat disfungsi ereksi.

13. Optimalisasi Fungsi Media Sosial sebagai jembatan Komunikasi dengan masyarakat

Untuk pengelolaan Media Sosial yang baik Badan POM telah mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada saat ini semakin penting pengelolaan media sosial yang strategis dan bertanggung jawab, terlebih bagi instansi pemerintahan seperti BPOM, untuk dapat menyampaikan kebijakan maupun informasi strategis kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Tak bisa dipungkiri, saat ini media sosial telah menjadi kekuatan baru saluran informasi. Pengguna media sosial di Indonesia yang semakin bertambah pada akhirnya mampu mengikis sekat dan batas seperti waktu, lokasi, maupun demografis dengan lembaga pemerintah, termasuk BPOM. Apabila realitas digital ini tidak disadari dan media sosial tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik dapat membawa dampak negatif. Potensi netizen alih-alih turut membangun kepercayaan terhadap BPOM, malah sebaliknya dapat memberikan sentimen negatif terhadap citra BPOM. Media sosial memungkinkan BPOM untuk menyampaikan kebijakan dan informasi penting dengan cara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, media sosial juga menjadi alat untuk melawan misinformasi dengan menyediakan klarifikasi yang cepat dan tepat.

Balai Besar POM di Padang aktif menggunakan media sosial dalam rangka mengedukasi masyarakat. Akun media sosial Balai Besar POM di Padang, antar lain: Subbsite (https://padang.pom.go.id), Instagram (@bpom.padang), Facebook bpom.padang), Youtube (bpom.padang), X (bbpompadang) dan Galamai (https://bbpompadang.id). Melalui akun tersebut Balai Besar POM di Padang mengedukasi masyarakat dengan konten yang sesuaiakan dengan agenda settingan bulanan yang ditetapkan Badan POM, konten kinerja Balai Besar POM di Padang, konten edukasi, konten pelayanaan publik dankonten lain yang dirasa penting.

1.4.3 Permasalahan Utama

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Terdapatnya perubahan jumlah pagu anggaran dikarenakan kebijakan blokir, relokasi dan relaksasi anggaran, menyebabkan tahapan pengadaan seperti perencanaan dan persiapan mengalami perubahan, tidak sesuai dengan rencana awal.

- Terkendala kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana karena efisiensi anggaran, sehingga kerusakan bangunan ruang laboratorium belum bisa dilakukan perbaikan secara menyeluruh

- Terdapatnya efisiensi anggaran menyebabkan sampling yang telah direncanakan di bulan Januari 2025 mengalami perubahan perubahan sehingga target awal yang direncanakan tidak bisa terpenuhi.

- Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang, alat gelas, baku banding disebabkan karena adanya pemotongan anggaran secara Nasional, masalah ini diatasi dengan koordinasi katim fungsi pemeriksaan dan pengujian untuk menyesuaikan perencanaan sampling dengan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium

- Adanya kerusakan pada alat ICP MS dan KCKT sehingga membutuhkan perawatan secepat mungkin, diatasi dengan elakukan koordinasi dengan PPK untuk segera merealisasikan dan menginput data permintaan pada aplikasi yang digunakan

- Relaksasi anggaran untuk pemeriksaan dan pengujian mengakibatkan terjadinya penumpukan sampel pada triwulan 2 dan 3, sedangkan anggaran penunjang

laboratorium (listrik,daya tahan tubuh dan MCU) tidak dilakukan relaksasi sehingga beresiko terhadap keberlangsungan proses pengujian yang menumpuk.

- Pada awal tahun masih sedikit pelaku usaha dan lintas sektor yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarananya, karena inspeksi mulai dilakukan pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan terakhir

- Pelaku usaha UMKM pangan dan kosmetik belum memahami GMP Pangan dan Kosmetik
  dan kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri

- Kegiatan KIE bersama tomas belum bisa dilaksanakan pada triwulan I 2025 karena kegiatan tomas yang semua diawal tahun, *direschedule* menjadi bulan Mei 2025 dan daerah penyebaran kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat belum merata, karena mengikuti daerah pilihan anggota DPR terkait.

BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) dan Satuan Kerja (satker) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rancangan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai Satuan Kerja dan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Sumatera Barat. Sasaran dan indikator kinerja merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan POM dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Unit Pengampu pusat berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis.

Dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025-2029 yaitu:

> ***" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Padang melakukan analisis strategis dengan metode analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan f*armakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebikan, Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode 2025-2029 sesuai dengan penjelasan di atas adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang berdasarkan Dokumen Badan POM

Visi	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045
Misi	1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Tujuan	1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan

	Olahan yang Aman dan Bermutu 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima
Arah Kebijakan	1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline 3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM 4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Strategi	1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan f*armakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional 6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK

	yang moderen dan relevan 7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator , dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang NOMOR HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari Sasaran Startegis Badan POM dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*). RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana(anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima danpemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dansanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75 Persen
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5 Persen
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09 Persen
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		3	Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Indeks
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90 Nilai
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82 Nilai
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95 Indeks

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per bulan dengan anggaran per indikator kinerja. Berdasarkan Surat Kepala BBPOM di Padang nomor B-PR.02.01.3A.04.25.178 tanggal 17 April 2025 dan direvisi melalui surat B-PR.02.01.3A.04.25.179 tanggal 17 April 2025 perihal usulan revisi target indikator kinerja utama bulanan serta dijawab dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 21 April 2025 nomor B-PR.02.01.21.04.25.102 tentang Tanggapan terhadap Usulan Revisi Target RAPK Tahun 2025 BBPOM di Padang, maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 21 April 2025 dengan perubahan target triwulan 1 2025 terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase cakupan sarana produksi fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
		1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			76,7	76,7	76,7	76,8	76,8	76,8	76,9	76,9	76,9	77
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	25	50	60	65	70	75	90	100 Persen	14
		3	Jumlah desa pangan aman			5	25	50	60	70	80	90	100	100	6
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	25	50	60	100	100	100	100	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4,16	10,33	14,5	23,32	30,84	34,33	52,5	60	68,5	71	79,17	80

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,5	42,5	42,5	42,5	50	50	70	70	70	85	85	90
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90,00
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)												90
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)												82
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,95

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

NILAI KINERJA ORGANISASI

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 No. HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang tanggal 12 Februari 2025. Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025 telah direalisasikan pada Triwulan I Tahun 2025 dengan baik yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan.

Kinerja Balai Besar POM di Padang mengacu kepada Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Pembahasan dan analisis capaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Padang 2025-2029.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Padang adalah 93,47% mendapatkan kategori Baik. Untuk meningkatkan pencapaian nilai NKO ini perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang optimal dan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan kinerja dalam rangka evaluasi kinerja. Upaya perbaikan perlu dilaksanakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dan peningkatan data kinerja yang mampu terukur dan andal juga harus dilakukan serta dilengkapi data dukung yang akurat.

Pencapaian sasaran strategis diperoleh dari capaian sembilan sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN NORMALISASI	KATEGORI
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,78	90,67	Baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	100	Baik
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,87	105,87	Sangat baik

4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	99,48	99,48	Baik
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	124,14	110	Tidak dapat disimpulkan
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	47,06	47,06	Kurang
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	100	Baik
8.	Layanan Publik UPT yang prima	-	-	-
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-	-

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

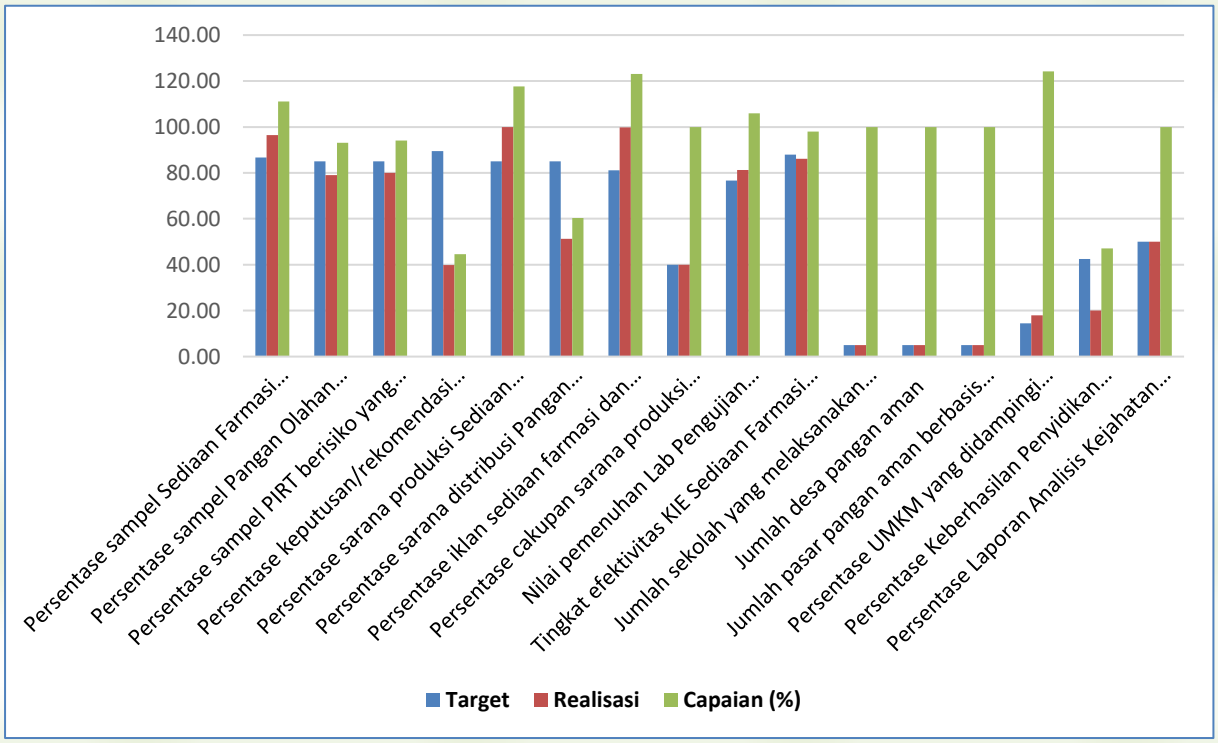
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW I – 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2025	MARET				CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN
					TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN NORMALISASI	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	96.38	111.10	110.00	111.10
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	-	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	92.82

		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	92.65
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	89.50	39.88	44.56	44.56	44.56
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	110.00	117.65
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	-	-	-	-
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	92.00	-	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	74.64
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	99.78	123.05	110.00	123.05
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	40	40.00	100	100	63.49

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00	76.70	81.20	105.87	105.87	105.45
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.00	88.00	86.17	97.92	97.92	97.92
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
		16	Jumlah desa pangan aman	6.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	5.00	5.00	100.00	100	5.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00	14.50	18.00	124.14	100	14.50
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90.00	42.50	20	47,06	47.06	22,22
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50.00	50.00	100.00	100.00	55.56

	yang efektif di wilayah kerja UPT								
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-	-	-		-
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90.00	-	-	-		-
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82.00	-	-	-		-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	-	-	-		-
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	-	-	-		-



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025

Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 4 indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan , 1 indikator dengan kategori sangat baik, 8 indikator , dengan kategori baik, 1 indikator dengan kategori cukup, dan 2 indikator dengan kategori kurang. Sebanyak 9 indikator belum dapat dihitung pencapaiannya karena belum ada realisasi pada

periode Triwulan I Tahun 2024. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut.

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 11 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 93,78% dengan capaian normalisasi sebesar 90,67% dengan kategori Baik.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2025	MARET			CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	96.38	111.10	110	111.10
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	-	-	-		-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	92.82
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-		-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	92.65
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	89.50	39.88	44.56	44,56	44.56

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.0	117.65	110	117.65
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	-	-	-	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	92.00	-	-	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	74.64
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	99.78	123.05	110	123.05

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pada IKU ini yang dimaksud Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait .

Cara Perhitungan Dan Formula

Perhitungan realisasi kinerja IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata capaian kinerja masing-masing komoditi, dengan formula sebagai berikut :

= (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Masing-masing komoditi memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda, secara garis besar aspek yang dinilai adalah persentase sampel berbasis risiko yang diselesaikan sesuai ketentuan dibandingkan terhadap target yang telah direncanakan per bulan, Perhitungan untuk bulan berikutnya dihitung secara kumulatif.

Tabel 3.4 Capaian Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		NORMALISASI CAPAIAN TRIWULAN	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	96.38	111.1	Tidak dapat disimpulkan	110,00	111,10	Tercapai/ melampaui ▲

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 96.38% bila dibandingkan dengan target 86.75%, maka capaian yang diperoleh adalah 110,10% dinormalisasi menjadi 110%, mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan

Tingginya capaian indikator kinerja pada TW I ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mempengaruhi pada penurunan target sampling pada bulan Februari dan Maret lebih kurang sebesar 80% dari target yang telah disusun pada awal tahun, sehingga

timeline sampling, timeline pengujian dan timeline pelaporan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Begitu juga dalam pemenuhan parameter uji pada TW I ini masih dapat dipenuhi oleh laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi BBPOM di Padang, karena jumlah sampel uji masih dibawah kapasitas uji laboratorium.

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari	62.00	86.75	100.00	#DIV/0!	84.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	79.00	86.75	95.73	94.44	92.00	98.57	95.19
Maret	95.00	86.75	95.88	100.00	92.00	97.62	96.38

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 96,38 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 86,75%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 111,10% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.6 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	96,38	102,81%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 93,75%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 102,81% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Adanya kebijakan efesiensi anggaran pada bulan Februari s/d Maret 2025 menyebabkan perubahan terhadap perencanaan yang telah dibuat di awal tahun,, yaitu penurunan jumlah sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per bulan hingga 20%., Sementara target per bulan tidak dilakukan perubahan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Realisasi yang dicapai pada TW I tahun 2025 belum dapat dijadikan patokan keberhasilan untuk pencapaian target tahunan karena realisasi tersebut hanya menggambarkan ±10% dari target pengawasan. Jika dibandingkan sisa target pengawasan produk sediaan farmasi yang harus dilaksanakan sampai dengan akhir tahun yaitu sebanyak ±90 %, dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan sekitar 9 bulan atau 75 % dari waktu setahun, maka target pengawasan jauh lebih tinggi dari waktu yang tersedia untuk penyelesaian. Untuk itu perlu upaya lebih untuk menjaga agar realisasi kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya yang dilaksanakan meliputi :

a. Melakukan revisi terhadap perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian perbulan, dengan mempertimbangkan kapasitas laboratorium dalam melaksanakan pengujian.
b. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan target bulanan yang telah disusun pada perencanaan sampling dan pengujian
c. Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, reagensia, suku cadang dan alat gelas untuk mendukung terlaksananya pengujian
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian :

- Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengukuran tahun 2025
- Kesesuaian pemilihan parameter uji dengan parameter uji yang telah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2025
- Waktu pelaksanaan sampling (maksimal 10 HK), pengujian (maksimal 15 HK) dan pelaporan (maksimal 5 HK)
- Ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian dan penilaian penandaan
- Ketepatan pelaporan hasil sampling dan pengujian pada SIPT
- Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pengawasan produk sediaan farmasi sesuai dengan surat edaran masing-masing kedeputian

e. Melakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi dan menetapkan rencana atau langkah-langkah perbaikan segera, apabila realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja meliputi :

1. Kegiatan pengadaan reagensia, suku cadang, alat gelas serta alat laboratorium, karena kegiatan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengujian
2. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang melaksanakan sampling dan pengujian, agar pelaksanaan sampling dan pengujian terlaksana sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
3. Penyesuaian anggaran untuk mendukung keberhasilan realisasi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berbasis risiko, terkait pengadaan anggaran dalam proses sampling maupun pengujian.

B. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. KIE ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tenaga kesehatan dalam hal pelaporan KTD/ESO, dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%**

IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur pada akhir tahun sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan I 2025.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Farmakovigilans untuk tenaga kesehatan/tenaga medis telah dilaksanakan pada Hari Rabu, 26 Februari 2025 secara daring melalui zoom meeting dan dihadiri oleh tenaga medis dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Padang. Narasumber KIE adalah praktisi dari RS M Jamil, Dr. dr Gestina Aliska, SpFK, Ketua Kelompok staf medis farmakologi RS M Jamil dan PFM Ahli Madya Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Dra. Ega Febrina, Apt. Semua peserta telah memahami materi yang diberikan yang dibuktikan dengan nilai post test semua peserta diatas 70.

Hasil pemantauan pelaporan KTD/ESO setelah pelaksanaan KIE farmakovigilans telah dilaporkan pada laporan pemantauan bulan Maret 2025 dimana terdapat **4** laporan dari 3 sarana pelayanan kesehatan.

C. **PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan Dan Formula =

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C.Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2024			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	78,90	92,82	Baik	92,82	Akan tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025 adalah 78,90% , bila dibandingkan dengan target 85,00%, maka capaian adalah 92,82 % dengan kategori Baik.

Pada triwulan I 2025 ini, IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pusat dengan realisasi sebesar 78,90% dan capaian 92,82%. Rendahnya realisasi dan capaian yang belum terpenuhi ini dikarenakan adanya beberapa hasil pengujian sampel yang diuji dan dilaporkan terlambat untuk ditindaklanjuti sehingga perhitungan untuk formula F (tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya) tidak terpenuhi 100 % yang berpengaruh pada total perhitungan realisasi dan capaian pada triwuan I ini. Tindak lanjut akan dilaksanakan pada awal bulan April atau pada triwulan II.

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	38.00	0.00	52.73	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	70.55
Februari	45.00	85.00	88.73	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	77.75
Maret	55.00	85.00	94.51	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	78.90

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 78,90% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 92,82% dengan kategori akan tercapai.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	78,90	84,84	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 93%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 84,84% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

a. Adanya perubahan perencanaan dan target yang telah disusun pada awal tahun sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian pada bulan Februari-Maret 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Ketua Tim Pemeriksaan dan Pengujian harus menyusun ulang semua perencaan seperti perencanaan sampling, perencanaan jumlah dan kategori, perencanaan parameter uji yang harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan proses sampling dan pengujian.

b. Keterlambatan waktu pelaksanaan sampling sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penerimaan sampel dilaboratorium setiap bulannya sehingga laporan pengujian tidak dapat diterbitkan pada bulan yang sama dengan bulan pelaksanaan sampling.

c. Keterbatasan ketersedian sarana dan prasarana di laboratorium karena adanya efisiensi anggaran

d. Kesalahan pada kategori sampel yang disampling (tidak sesuai dengan renlak) sehingga petugas harus melakukan pembatalan sampel tersebut dan diganti dengan sampel baru yang telah dikoordinasikan kategorinya dengan fungsi pengujian.

Penyesuaian kategori juga sudah mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana laboratorium seperti instrumen/alat, reagensia, suku cadang, alat gelas, baku banding,

e. Keterlambatan dalam hal menindaklanjuti sampel dengan hasil uji tidak memenuhi syarat (TMS) yang dilakukan pada bulan yang berbeda dengan waktu pelaporan sampling dan laporan pengujian.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu 1 sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama
b. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian
c. Melakukan percepatan realisasi anggaran terutama anggaran yang berhubungan dengan sampling dan sarana prarana pengujian laboratorium
d. Meningkatkan kompetensi dari petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian dengan memahami isi dari pedoman sampling dan pengujian serta petunjuk teknis

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim masing-masing fungsi untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis
b. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan

D. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan

atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan,

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Dalam melakukan pemeriksaan sampel KLB Keracunan Pangan yang berasal dari Dinas Kesehatan sebelum diuji terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan surat pengantarnya. Untuk dugaan pangan KLB Keracunan Pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan yang disampling oleh UPT atau yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dengan parameter uji sampel yang sesuai dengan hasil investigasi dan mengacu pada pedoman sampling pangan

Pada Triwulan I ini Sampel KLB ylang diterima dan diuji di Balai Besar POM di Padang sebanyak 8 (delapan) item. Pada bulan Januari terdapat 1 (satu) kasus pengaduan keracunan pangan dengan 3 sampel pangan yang harus diuji dari sekolah dasar yang dilaporkan oleh Dinkes Kota Padang Bulan Februari sebanyak 1 (satu) kasus pengaduan dari Dinkes Kabupaten Pasaman untuk kasus keracunan pangan yang terjadi di sekolah menengah kejuruan dengan 4 (empat) sampel yang harus diuji dan 1 (satu) kasus keracunan pangan dengan sampel yang diuji sebanyak 1 (satu) sampel pada bulan Maret dilaporkan yang terjadi pada masyarakat kembali dilaporkan oleh Dinkes Kota Padang. Semua sampel telah diperiksa dan diuji serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Target IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah ditetapkan, namun realisasi belum dapat dihitung karena sesuai arahan dari Pusat dikeluarkan dulu dari perhitungan capaian di triwulan I karena DO nya masih dalam pembahasan.

E. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	78,75	92,65	Baik	92,65	Akan Tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025 adalah 78,75% , bila dibandingkan dengan target 85,00%, maka capaian adalah 92,65% dengan kategori baik.

Pada triwulan I ini, rendahnya realisasi dan capaian dikarenakan adanya beberapa hasil pengujian sampel yang diuji dan dilaporkan terlambat untuk ditindaklanjuti sehingga perhitungan untuk formula F (tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya) tidak terpenuhi 100 % yang berpengaruh pada total perhitungan realisasi dan capaian pada triwulan 1 ini. Tindak lanjut dilaksanakan pada awal bulan April atau triwulan II

Tabel 3.11 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	85.00	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	78.75

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 78,75 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 80%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 92,65% dengan kategori akan tercapai.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	78,75	82,89%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 95%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 82,89% termasuk kategori akan tercapai. Supaya target pada akhir Renstra dapat tercapai maka diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat dan evaluasi berkesinambungan.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

a. Adanya perubahan perencanaan dan target yang telah disusun pada awal tahun sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian pada bulan Februari dan Maret 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyebabkan ketua tim fungsi pemeriksaan dan ketua tim pengujian harus menyusun ulang semua perencanaan seperti perencanaan sampling, perencanaan jumlah dan kategori, perencanaan parameter uji yang harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan proses sampling dan pengujian.

b. Keterlambatan waktu pelaksanaan sampling sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penerimaan sampel di laboratorium setiap bulannya

sehingga laporan pengujian tidak dapat diterbitkan pada bulan yang sama dengan bulan pelaksanaan sampling.

c. Keterbatasan ketersedian sarana dan prasarana di laboratorium karena adanya efisiensi anggaran sehingga

d. Kesalahan pada kategori sampel yang disampling (tidak sesuai dengan renlak) sehingga petugas harus melakukan pembatalan sampel tersebut dan diganti dengan sampel baru yang telah dikoordinasikan kategorinya dengan fungsi pengujian. Penyesuaian kategori juga sudah mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana laboratorium seperti instrumen/alat, reagensia, suku cadang, alat gelas, baku banding,

e. Keterlambatan dalam hal menindaklanjuti sampel dengan hasil uji tidak memenuhi syarat (TMS) yang dilakukan pada bulan yang berbeda dengan waktu pelaporan sampling dan laporan pengujian.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu 1 sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama

b. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian

c. Melakukan percepatan realisasi anggaran terutama anggaran yang berhubungan dengan sampling dan sarana prasarana pengujian laboratorium

d. Meningkatkan kompetensi petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian tentang pemahaman **isi pedoman sampling dan pengujian serta petunjuk teknis terkait**

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim masing-masing fungsi untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis

b. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS

c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan

F. **PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER.**

Pada IKU ini yang dimaksud Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Tindak lanjut ini dapat berupa tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha ataupun lintas sektor terkait agar ketidaksesuaian tidak berulang lagi. Untuk ini kepada pelaku usaha diberikan waktu selama 21 hari kerja sebagai batas waktu maksimal dalam mengirimkan data dukung CAPA yang telah dilakukan. Terhadap CAPA ini akan dilakukan evaluasi oleh petugas sehingga temuan ketidaksesuaian dapat dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti atau masih belum sesuai ditindaklanjuti. Jika belum sesuai, maka kepada pelaku usaha diminta lagi memperbaiki sampai semua temuan dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti.

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B)/2

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%

B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100%

Tabel 3.13 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	89,50	39,88	44,56	Kurang	44,56	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 39,88% bila dibandingkan dengan target 89,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 44,56% dan mendapatkan kategori Kurang.

Nilai 39.88% diperoleh sebagai rata-rata dari nilai % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (46,43%) dan % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (33,33%). Nilai 46,43% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari pelaku usaha (13 CAPA) dari 28 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada pelaku usaha. Sedangkan nilai 33,33% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari lintas sektor (1 CAPA) dari 3 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada lintas sektor terkait.

Tabel 3.14 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	0.00	20.00	100.00	60.00
Februari	89.50	40.00	33.33	36.67
Maret	89.50	46.43	33.33	39.88

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 39,88 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 89,50%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 44,56% dengan kategori perlu upaya keras

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.15 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	39,88	43,58%	Perlu upaya keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,50%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 43,58% termasuk kategori perlu upaya keras. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

Rendahnya nilai capaian kinerja ini disebabkan pada awal tahun masih sedikit sarana yang bisa mengirimkan CAPA nya dimana sarana masih membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Selain itu pemeriksaan baru mulai dilakukan pada akhir bulan Januari sehingga sarana yang diperiksa baru sedikit dan hal ini menurunkan peluang untuk mendapatkan CAPA yang lebih banyak dari pelaku usaha maupun lintas sektor terkait.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk mencapai target kinerja ini, diperlukan pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan. Kegiatan ini dapat berupa:

a. Mengingatkan petugas sarana terkait agar memastikan surat tindak lanjut/ keputusan rekomendasi hasil pemeriksaannya terkirim kepada pelaku usaha, baik secara hardcopy maupun softcopy
b. Mengingatkan petugas sarana terkait agar selalu melakukan komunikasi secara terus menerus dan melakukan pengawalan sehingga pelaku usahanya segera mengirimkan CAPA
c. Melaksanakan koordinasi dan jika diperlukan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait agar segera melakukan pembinaan kepada pelaku usaha daerah binaannya. Pembinaan ini merupakan suatu output CAPA yang dapat dikirimkan lintas sektor terkait dan dapat dihitung sebagai respon tindak lanjut lintas sektor

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian target kinerja ini, dapat didukung oleh adanya:

a. Kegiatan desk CAPA yang memberikan arahan dan saran teknis terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

b. Secara rutin berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam memberikan pembinaan atau bimbingan teknis pentingnya cara produksi/ distribusi yang baik kepada pelaku usaha terkait obat dan makanan

G. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada : regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Jumlah target sarana produksi sediaan farmasi BBPOM di Padang selama tahun 2025 adalah sebanyak 6 sarana, antara lain 1 sarana IOT, 1 sarana UKOT, 1 sarana UMOT dan 3 sarana IKOS. Sarana industri obat tidak lagi menjadi target karena sejak akhir tahun 2024, sarana tersebut tidak lagi melakukan kegiatan operasional produksi obat.

Cara Perhitungan Dan Formula

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

Parameter penilaian sarana produksi OBA dan kosmetik dilakukan berdasarkan parameter pemeriksaan yang meliputi persentase pelaksanaan inspeksi, persentase kelengkapan dan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Tabel 3.16 Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	Tidak dapat disimpulkan	110	117,65	Tercapai/ melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,65% dinormalisasi menjadi 110% dan mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan. Nilai 100% diperoleh karena sarana yang diperiksa baru satu sarana yaitu industri kosmetik, dimana sarana ini telah ditindaklanjuti sesuai parameter pemeriksaan sarana dimana setiap parameter bernilai 100%.

Tabel 3. 17 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.18 Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 109,89% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Tercapainya kinerja ini disebabkan terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan, antara lain:

a. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan terealisasi sebanyak 100 persen dari jumlah yang ditargetkan
b. Persentase kelengkapan dan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, dimana seluruh sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu melalui SIPT
c. Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dimana kesimpulan yang diberikan petugas telah sesuai dengan pedoman cara produksi kosmetik yang baik

d. Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana semua sarana yang diperiksa 100% telah disurati dalam batas waktu yang ditentukan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan, diperlukan komitmen petugas yang ditunjuk agar semua parameter pemeriksaan terpenuhi secara konsisten. Selain itu diperlukan kerjasama tim yang solid agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi kosmetik

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh:

a. Program pelatihan teknis inspektur pemeriksaan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memastikan tersedianya personil yang kompeten dan secara disiplin melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
b. Tersedianya kelengkapan dan atribut petugas sesuai pedoman pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi
c. Kepatuhan pelaku usaha dalam bekerjasama mengikuti semua proses pemeriksaan sehingga inspeksi dapat berjalan dengan lancar

H. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa. Sarana yang diperiksa adalah fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Dan indikator yang digunakan untuk menilai persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau

ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi :

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Target IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah ditetapkan, namun realisasi belum dapat dihitung karena sesuai arahan dari Pusat dikeluarkan dulu dari perhitungan capaian di triwulan I karena defenisi operasional sedang dalam pembahasan oleh unit pengampu.

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan pada triwulan I telah dilakukan terhadap 3 sarana produksi pangan olahan dengan izin edar MD di Kota Padang dengan kategori 1 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan terhadap 5 sarana IRTP di Kota Padang dan Kota Solok dengan kategori 1 sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.

I. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Cara perhitungan dan Formula

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

Target IKU Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah ditetapkan, namun realisasi belum dapat dihitung karena sesuai arahan dari Pusat dikeluarkan dulu dari perhitungan capaian di triwulan I karena Defenisi Operasional nya masih dalam pembahasan unit pengampu.

Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I adalah pemeriksaan sarana distribusi dan sediaan farmasi sesuai analisa resiko, penyusunan tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut dan pelaporan kedalam aplikasi SIPT sesuai dengan timeline. Kesesuaian tindak lanjut pada aplikasi SIPT sebagian telah diverifikasi oleh masing-masing kedeputian, namun belum semua sarana telah diverifikasi sesuai dengan timeline.

J. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut:

jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C)

Tabel 3.19 Capaian **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	63,44	74,64	Cukup	74,64	Akan tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 63,44% bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 74,64% dan mendapatkan kategori Cukup. Capaian kategori cukup ini disebabkan oleh tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan yang belum optimal, sehingga pada triwulan II akan dimaksimalkan tindak lanjut terhadap sarana distribusi ini.

Tabel 3.20 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	85	10	10	20	7	10	49.00	10	10	10.00	79.00
Feb	85	20	19	21.05	19	20	66.50	18	20	9.00	96.55
Maret	85	66	66	20	66	66	70.00	63	66	9.55	63.44

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 63,44 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 76,64% dengan kategori akan tercapai untuk pencapaian target akhir.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.21 Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	63,44	66,78%	Perlu upaya keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 95%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 66,78% termasuk kategori perlu upaya keras. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

a. Frekuensi pengawasan terhadap sarana peredaran pangan berkurang karena adanya efisiensi anggaran termasuk masih banyaknya peredaran pangan ilegal
b. Adanya relaksasi anggaran sehingga kegiatan pemeriksaan sarana meningkat dibulan Maret, namun tindak lanjut dilaksanakan pada bulan berikutnya
c. Belum optimal kompetensi SDM dalam menindaklanjuti sarana sesuai timelinenya
d. Pengetahuan Pelaku usaha distribusi pangan yang belum optimal dalam penerapan cara distribusi pangan olahan yang baik
e. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan terpadu pangan di sarana peredaran.
f. Masih kurangnya petugas yang memperoleh pelatihan terkait pangan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Meningkatkan pengetahuan Pelaku usaha distribusi pangan yang belum optimal dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan.
b. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dengan melibatkan petugas yang kompeten
c. Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap sarana peredaran pangan ilegal dengan berbasis risiko
d. Meninfkatkan pelatihan kepada petugas tentang pengawasan pangan olahan

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang melibatkan pimpinan dalam pengawasan terpadu pangan di sarana peredaran
b. Mengusulkan pelatihan peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan pangan olahan di sarana peredaran
c. Meningkatkan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana pangan di peredaran

K. **PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN**

Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan didefinisikan sebagai setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Balai Besar POM di Padang melaksanakan pengawasan iklan baik iklan komoditi sediaan farmasi maupun pangan olahan pada berbagai jenis media iklan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pengampu masing-masing komoditi.

Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan mencakup penetapan target, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, evaluasi hasil pengawasan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh tahapan pelaksanaan pengawasan iklan ini didasarkan kepada berbagai regulasi atau peraturan terutama pedoman pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi. Pedoman pengawasan tersebut yang dilengkapi dengan edaran terkait pengawasan iklan dari pengampu masing-masing komoditi sekaligus menjadi acuan dalam tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan di Balai Besar POM di Padang.

Kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dipantau dan dievaluasi capaiannya setiap bulan berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SIPT yang nilainya diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan Rerata

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan rumusan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kinerja terbaik pada pengawasan iklan untuk setiap komoditi diperlukan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja sesuai dengan atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.22 Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	99,78	123,05	Tidak dapat disimpulkan	110	123,05	Tercapai/ melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Balai Besar POM di Padang berupa Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar 81,09%. Berdasarkan hasil evaluasi yang merupakan gabungan nilai capaian selama tiga bulan (Januari, Februari dan Maret) di triwulan I tahun 2025, nilai capaian yang diperoleh ada sebesar 99,78%. Nilai capaian ini adalah 123,05% bila dibandingkan dengan target, yang jika dinormalisasikan sesuai dengan ketentuan menjadi sebesar 110% dengan memberikan kategori capaian sebagai Tidak dapat disimpulkan.

Rincian capaian hasil pengawasan berdasarkan penilaian data laporan yang disampaikan melalui SIPT setiap bulan selama triwulan I tahun 2025 untuk masing-masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 3.23 Data pada tabel menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target pengawasan yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100% untuk semua komoditi pada bulan Januari, dan persentase capaian gabungan sebesar 99,68% pada bulan Februari dan 99,78% di bulan Maret yang disebabkan adanya penurunan capaian pada pengawasan iklan Obat Bahan Alam sebesar 98,41% dan 98,89% pada kedua bulan tersebut.

Tabel 3. 23 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	81.09	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Februari	81.09	100.00	100.00	98.41	100.00	100.00	99.68
Maret	81.09	100.00	100.00	98.89	100.00	100.00	99.78

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 99,78%. Nilai realisasi ini berubah secara dinamis pada setiap bulan sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaporan pengawasan yang dilaksanakan setiap bulan. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 81,09%, maka nilai realisasi tersebut memberikan capaian kinerja sebesar 123,05% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	99,78	112%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 89,09%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 112% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dipengaruhi oleh beberapa kategori yang menjadi dasar penilaiannya yaitu kesesuaian jumlah dan fokus iklan yang diawasi dengan perencanaan, kesesuaian jenis media iklan, ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian penilaian pemenuhan ketentuan iklan antara petugas pengawasan iklan Balai Besar POM di Padang dengan hasil penilaian Pusat. Dengan dijadikannya kategori-kategori penilaian tersebut sebagai dasar penilaian kinerja pengawasan iklan, maka kualitas kinerja sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan pengawasan iklan dapat berjalan dengan efektif untuk memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa komoditi mempersyaratkan ketentuan pengawasan yang spesifik yang harus dipenuhi. Pada komoditi obat, misalnya, pengawasan iklan difokuskan pada produk yang dihasilkan oleh industri-industri farmasi tertentu. Pengawasan iklan pada komoditi Obat Bahan Alam, mengharuskan pemenuhan sejumlah iklan atas produk dengan klaim tertentu. Begitu pula dengan komoditi pangan yang menetapkan jumlah kategori pangan yang harus diawasi pada media iklan online.

Perencanaan yang disusun telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengawasan spesifik yang ditetapkan pada masing-masing komoditi. Hal ini termasuk kepada perencanaan jumlah

atau proporsi jenis media iklan yang diawasi. Selain itu, penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan juga memiliki pengaruh terutama pada ketepatan waktu pelaporan. Pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pengawasan iklan memiliki tugas utama lainnya, sehingga waktu pelaksanaan pengawasan harus diatur sedemikian sehingga tidak mempengaruhi kualitas kinerja yang diharapkan oleh yang bersangkutan pada masing-masing tugas utamanya. Selanjutnya, kesesuaian penilaian petugas dengan penilaian pusat dipengaruhi oleh kompetensinya dalam melakukan penilaian kesesuaian iklan terhadap ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pengawasan iklan belum mendapatkan pelatihan untuk pengawasan iklan untuk semua komoditi, sehingga penilaian kesesuaian sebagiannya berdasarkan kepada hasil pembelajaran mandiri masing-masing petugas untuk memahami ketentuan pengawasan iklan tersebut.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Terlepas dari nilai realisasi dan capaian yang baik pada triwulan I tahun 2025 ini, tetap diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kinerja terbaik pada periode mendatang hingga akhir tahun anggaran 2025 terselesaikan. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah dengan tetap mempertahankan kualitas perencanaan yang baik dan matang dengan memperhatikan adanya perubahan-perubahan ketentuan yang ditetapkan oleh pengampu masing-masing komoditi terutama selepas diberlakukannya relaksasi atas anggaran pelaksanaan kegiatan di Balai Besar POM di Padang. Perencanaan termasuk mengatur penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang mampu mengantisipasi adanya potensi keterlambatan pelaporan dengan tidak menyebabkan adanya gangguan pada target-target kinerja lainnya. Lebih lanjut, diperlukan pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pegawai.

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran, tata kelola teknologi informasi pendukung, serta manajemen sumber daya manusia. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait tersebut akan sangat membantu untuk memberikan kinerja yang terbaik pada pencapaian target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

PENILAIAN RISIKO TERHADAP SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pada sasaran kegiatan ini terdapat penilaian risiko yang teridentifikasi antara lain :

1. Dalam hal pegelolaan sampel terdapat risiko yang mungkin terjadi adalah Identitas dan jumlah sampel yang diserahkan TPS ke Pengujian tidak sesuai dengan data sampel yang tercantum pada SPU, sampel dalam kondisi rusak, tidak ditemkukan data sampel dalam SIPT pada akun MT, jumlah sampel yang diterima tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian, jenis/kategori sampel yang masuk ke laboratorium tidak sesuai dengan yang tertulis pada SPU, serta jumlah item sampel rutin yang masuk tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah verifikasi data sampel di TPS dijalankan sesuai prosedur, melakukan penanganan sampel sesuai prosedur, koordinasi antara TPS, tim sampling dan pengujian,. Melakukan penginputan data sesuai kategori dan dilakukan verifikasi oleh TPS, monitoring terhadap kesesuaian jumlah item sampel yang masuk ke laboratorium dengan perencanaan yang telah disusun secara berkala.

2. Pelaksanaan pengujan Tidak sesuai Metoda Analisa/Instruksi Kerja/parameter uji yang ditetapkan pada pedoman sampling, belum tersedianya Metoda Analisa untuk sampel kasus, kerusakan alat laboratorium, personil laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, penanganan alat laboratorium belum sesuai SOP, pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu, personil Laboratorium terpapar bahan kimia, pengambilan kesimpulan hasil uji yang tidak tepat pada SIPT dan tidak real time serta penginputan hasil uji pada SIPT tidak berjalan lancar.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah melakukan kepenyeliaan kepada petugas oleh penyelia/MT, melakukan konsultasi dengan PPPOMN dalam pelaksanaan pengujian dan mengajukan kepada PPPOMN untuk membuat / Validasi Metoda analisa baru. Melakukan monitoring dan pencatatan pemeliharaan alat oleh penangung jawab alat, Memberikan sosialisasi kepada petugas tentang SOP penanganan alat laboratorium, Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan reagen, suku cadang dan suku cadang. Melaksanakan protokol K3 di laboratorium dan pemenuhan kebutukan atribut K3 di Laboratorium.

3. Dalam kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi uraian peristiwa risiko terdiri dari pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Lainnya belum optimal , Petugas pemeriksa sarana belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai persyaratan, CAPA yang telah dibuat oleh Sarana belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku, manipulasi hasil

pemeriksaan sarana oleh petugas, petugas menerima suap dari pelaku usaha untuk mengurangi / menghilangkan ketidaksesuaian, Pelaporan iklan obat secara SIPT tidak sesuai dengan Timeline yang ditentukan, Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) petugas inspeksi terhadap pelaku usaha yang diperiksa, untuk melakukan pemeriksaan, terjadi ketidaktepatan penentuan kriteria MK-TMK dan tindak lanjut.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Meningkatkan kompetensi kepada petugas terkait tindak lanjut melalui sosialisasi dan pelatihan, sosialisasi dan desk CAPA kepada pelaku usaha, evaluasi dan monitoting hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana oleh ketua tim. Sosialisasi pedoman tindak lanjut melalui pertemuan daring dan pembagian file pedoman tindak lanjut dan melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait cara pelaporan iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Memperkuat kesadaran dan komitmen petugas melalui pelatihan character building dan sosialisasi SMAP, pencantuman kalimat "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, pengecekan harga pasar, dan identifikasi personil yang memiliki Benturan kepentingan,

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu :

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi

kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara Perhitungan dan Formula

Cara perhitungan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Tabel 3.25 Capaian Persentase Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	40	40	100	Baik	63,49	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I

tahun 2025 adalah 40% bila dibandingkan dengan target 40%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kategori baik. Pemeriksaan terhadap sarana pangan fortifikasi telah dilakukan terhadap 2 industri garam di Kota Padang. Kedua industri garam ini telah melaksanakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap sarana produksinya dengan dokumen CAPA yang telah dievaluasi dan telah memenuhi ketentuan

Tabel 3.26 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	2	2	5	40.00
Februari	2	2	5	40.00
Maret	2	2	5	40.00

1. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

   Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 40% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 63,%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 63,49% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.27 Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I -2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	40	53,33%	Perlu upaya keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 75%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 53,33% termasuk kategori Perlu upaya keras. Untuk itu

diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

3. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Keberhasilan capaian kinerja sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh antara lain :

a. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
b. Pengawalan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan mendorong pelaku usaha agar mampu melakukan pengawasan mandiri.
c. Komunikasi yang baik secara langsung atau melalui media terkait regulasi produksi pangan olahan menyebabkan kesadaran pelaku usaha untuk dapat menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Keberhasilan capaian kinerja sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh antara lain :

a. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
b. Pengawalan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan mendorong pelaku usaha agar mampu melakukan pengawasan mandiri.
c. Komunikasi yang baik secara langsung atau melalui media terkait regulasi produksi pangan olahan menyebabkan kesadaran pelaku usaha untuk dapat menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten.

4. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a. Konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi

b. Bimbingan kepada pelaku usaha pada saat pelaksanaan inspeksi agar pelaku usaha mampu memproduksi produk yang memenuhi persyaratan.

PENILAIAN RISIKO TERHADAP SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang terdidentifikasi pada sasaran ini adalah CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Sosialisasi dan desk CAPA kepada pelaku usaha

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN MAKANAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama :

NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1) Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;

3) Standar Kompetensi Laboratorium;
4) Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

BBPOM di Padang sebagai laboratorium tingkat 3 dalam Region Medan, tahun 2025 menetapkan target Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 77.

Pada penilaian tahun 2025 ini sudah digunakan Tools Monev SKL yang baru untuk tahun 2025-2029 dan Standar Kemampuan Laboratorium berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 470 Tahun 2023, tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

A. Standar Ruang Lingkup

Pemenuhan Standar Ruang Lingkup untuk tahun 2025 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengharuskan verifikasi untuk metoda analisa yang akan ditingkatkan kemampuan ujinya. Metoda analisa yang sudah bisa dinyatakan terpenuhi (dihitung penilaiannya) oleh P3OMN jika sudah terverifikasi metoda analisanya.

B. Standar Peralatan Laboratorium.
C. Standar Kompetensi Laboratorium.

   Penilaian Standar Kompetensi Pengujian dilakukan dengan matriks yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 ini, standar kompetensi dinilai berdasarkan personil yang mampu melaksanakan pengujian (penguji pengampu) untuk metoda analisa yang sudah mampu uji berdasarkan jumlanya.

D. Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi.

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3
C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2
D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

Tabel 3.28 Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77	76,7	81,20	105,87	Sangat baik	105,45	Tercapai/melampaui ▲

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 81,20% bila dibandingkan dengan target 76,7%, maka capaian yang diperoleh adalah 105,87% dan mendapatkan kategori sangat baik

Capaian sangat baik disebabkan rencana pemenuhan SKL di TW I yang meliputi pemenuhan Standar MA yang Terverifikasi, semuanya terealisasi dengan baik atas kerja sama tim pengujian, dimana terdapat 12 (dua belas) Metoda Analisa yang sudah terverifikasi yang terdiri dari 1 (satu) MA hasil verifikasi laboratorium Obat, 4 (empat) MA hasil verifikasi laboratorium OBASKK dan 7 (tujuh) verifikasi MA dari laboratorium kosmetik.

Tabel 3.29 Hasil Perhitungan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I 2025

SRL	STANDAR PERALATAN	STANDAR KOMPETENSI LABORATORIUM	STANDAR METODE TERVERIFIKASI	NILAI PEMENUHAN SKL TW I
83,4	87	100	21,3	81,2

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 81,20% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 77,%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 105,45% dengan kategori Tercapai/melampaui.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.30 Perbandingan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	81,20	94,53%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 85,90%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 94,531% termasuk kategori Akan tercapai. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Pada TW I ini kinerja pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium berhasil meraih capaian sangat baik karena target terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Hasil yang diperoleh tidak terlepas dari kolaborasi pengawalan dan kerja sama tim laboratorium untuk meningkatkan kinerja, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian yang handal dan terpercaya.

a. Standar Ruang Lingkup

   Pada Triwulan I ini masing-masing laboratorium belum merencanakan peningkatan Standar Ruang Lingkup yang baru, tetapi memprioritaskan pemenuhan verifikasi metoda analisa yang sudah ada dalam Standar Ruang Lingkup yang sudah mampu pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Standar Peralatan Laboratorium.

   Pemenuhan jumlah peralatan yang masuk dalam Standar Peralatan Laboratorium pada Triwulan I ini belum bisa terealisasi karena masih dalam proses transaksi oleh PPK dan beberapa ada yang masih menetapkan spesifikasi alat yang dibutuhkan oleh tim laboratorium yang akan menggunakan. Terdapat 16 item peralatan laboratorium yang akan diadakan tahun 2025 ini, 4 diantaranya adalah peralatan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium BBPOM di Padang, yaitu Conductivity Meter, Spektrofotometer UV-Vis, Timbangan Mikro dan TLC System.

c. Standar Kompetensi Laboratorium.

   Untuk triwulan I ini, penilaian kompetensi laboratorium mendapatkan nilai 100 karena semua metoda analisa yang sudah mampu uji, personil pengampu untuk pengujiannya rata-rata semua personil yang ada di laboratorium tersebut.

d. Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi.

   Verifikasi metoda analisa pada triwulan 1 direncanakan oleh hampir semua laboratorium, kecuali pangan yang merencanakan di triwulan IV. Laboratorium Obat merencanakan 1 (satu) MA yang diverifikasi dan sudah terealisasi, Laboratorium OBASKK merencanakan 4 (empat) MA yang harus diverifikasi pada TW I ini dan sudah terealisasi, Laboratorium yang paling banyak melaksanakan verifikasi MA adalah kosmetik dengan 7 (tujuh) MA sesuai dengan perencanaannya. Sedangkan Laboratorium mikrobiologi sudah melaksanakan verifikasi 1 (satu) MA tetapi masih tahap penyelesaian laporan, jadi belum dimasukkan dalam penilaian SKL.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk triwulan selanjutnya akan diupayakan pemenuhan standar laboratorium sesuai perencanaan yang telah dibuat sebagai target dan akan dilaksanakan secara maksimal agar Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Padang semakin meningkat lagi.

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Ketersediaan sampel peningkatan ruang lingkup di peredaran (keberhasilan sampling), tersedianya fasilitas/sarana prasarana pengujian serta SDM yang melakukannya sangat menentukan tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan**.**

   PENILAIAN RISIKO SASARAN NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

   Risiko yag teridentifikasi dari sasaran kegiatan ini adalah : terdapatnya uji profisiensi, uji banding dan uji kolaborasi yang ditawarkan oleh provider tidak bisa diikuti, standar minimal Ruang Lingkup pengujian tidak tercapai dan terdapat kesalahan pengiriman sampel dari UPT lain.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Merencanakan kebutuhan sarpras yang diperlukan untuk uji profisiensi, uji banding dan uji kolaborasi, monitoring pengadaan baku pembanding dan suku cadang, dan pembuatan POA sampling pegionalisasi yang dilakukan oleh semua balai dalam satu region.

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama,. Hasil capaian rata-rata keempat indikator tersebut adalah 99.48% Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88	88	86,17	97,92	Baik	97,92	Akan tercapai
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	5	5	100.00	Baik	5	Perlu upaya keras
3	Jumlah desa pangan aman	6	5	5	100	Baik	5	Perlu upaya keras
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	5	5	100	Baik	5	Perlu upaya keras

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

A. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis kegiatan KIE terbagi menjadi KIE Langsung/ Tatap Muka dan KIE Media (Tidak Langsung).

KIE Langsung/ Tatap Muka meliputi:

1. KIE bersama Tokoh Masyarakat,
2. Sosialisasi/ Penyuluhan,
3. Seminar, Webinar,
4. Talkshow,

5. Penyebaran informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD) dan
6. Pameran.

KIE Media meliputi:

1. Media Sosial melalui kanal media sosial official Balai Besar POM di Padang antara lain: Facebook, Instafgram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube.
2. KIE Non Media Sosial melalui media digital, media online, media elektronik, media cetak, media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kategori yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 3 bulan terakhir. Pada TW I Tahun 2025 ini, pengukuran indeks efektifitas KIE belum optimal dilakukan pada semua kegiatan KIE yang diselenggarakan karena terkendala aplikasi pengukuran indeks efektifitas KIE yang masih dalam pengembangan sehingga pengukuran indeks efektifitas KIE pada bulan Januari tidak dilakukan. Pengukuran indeks efektifitas KIE sementara menggunakan *link* kobotoolbox per UPT pada bulan Februari dan Maret 2025.

Cara Perhitungan Dan Formula

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Tabel 3.32 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88	88	86,17	97,92	Baik	97,92	Akan tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 86.17 dari target sebesar 88 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 97,92% dengan kategori Baik.

Indeks Efektifitas KIE sebesar **86.17** dengan kategori **Efektif** diperoleh dari hasil survei KIE Tatap Muka dan KIE Media yang berasal dari 68 responden. Indeks Efektifitas KIE tatap Muka sebesar 83.70 hasil survei terhadap 34 responden. Sementara Indeks Efektifitas KIE Media lebih tinggi yaitu sebesar 88.63 hasil survei terhadap 34 responden.

Tabel 3.33 Perhitungan realisasi Tingka Efektifitas KIE Triwulan I 2025

RESPONDEN				INDEKS			
UNIT PELAKSANA TEKNIS	**Tatap Muka**	**Media**	**Total Responden**	**INDEKS TATAP MUKA**	**INDEKS MEDIA**	**INDEKS KIE**	**KATEGORI INDEKS**
BBPOM Padang	34	34	68	83.70	88.63	86.17	Efektif

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2024

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 86,17 bila dibandingkan dengan target sebesar 88, maka capaian yang diperoleh sebesar 97,92% dengan kategori akan Tercapai. Tahun 2025 merupakan periode awal menyusunan Restra 2025-2029 dengan target yang berbeda dari tahun sebelumnya karena kuisioner yang digunakan pada survei juga terdapat pembaharuan dari tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.34 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,52	86,17	94,15%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,52%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 94,15% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

   Belum tercapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

   a. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan secara optimal.
   b. Penyusunan ulang perencanaan karena penyesuaian target dengan anggaran yang masih tersedia.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk mencapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang sebesar 88.00, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

a. Mengoptimalkan KIE melalui media sosial.
b. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan.
c. Meningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan dengan melalukan reviu terhadap materi KIE
d. Meningkatkan kompetensi petugas.
e. Meningkatkan interaksi dengan peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab, dsb.
f. Meningkatkan pemahaman peserta dengan menggunakan alat peraga seperti: contoh produk, poster, brosur, dll.

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
   a. Pelaksanaan KIE dan indeks efektifitas KIE Balai Besar POM di Padang pada triwulan I belum optimal karena terjadi efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan.
   b. KIE yang telah dilaksanakan pada triwulan I antara lain:
      - Penyebaran Informasi pada kegiatan *Car Free Day* dalam rangka "HUT BPOM 24"
      - Sosialisasi kepada mahasiswa M. Natsir dalam rangka "Kegiatan *Early Explosure"*
      - Penyebaran Informasi pada kegiatan *Car Free Day* dalam rangka "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat"
      - KIE melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube)
      - KIE melalui Non Media Sosial (Running Teks dan Videotron)
      - KIE Tatap Muka melalui layanan pengaduan dan informasi

B. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah/madrasah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kategori Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah = 25
- Sosialisasi Keamanan Pangan = 20%
- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah = 25%
- Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan = 25%
- Pengawalan = 5%

Tabel 3.35. Capaian Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	14	5	5	100.00	Baik	5	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 5% dari target sebesar 5% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori Baik.

Pada Triwulan I dengan target 5% untuk kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Daerah yang akan diintervensi yang merupakan bagian dari tahapan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah dengan bobot total 25% yang pelaksanaan kegiatannya pada Triwulan II.

Tabel 3.36. Progres IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I 2025 :

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi
Januari	0	0.00					0.00
Februari	0	0.00					0.00
Maret	5	5.00	0.00	0.00			5.00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target akhir Tahun 2024

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 5%, bila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 14 (100%) maka diperoleh capaian sebesar 5% kategori Perlu upaya keras karena pembobotan bersifat kumulatif sehingga realisasi capaian target 100% dapat diperoleh pada akhir tahun setelah semua tahapan program terlaksana sesuai target.

Masih perlu upaya untuk dapat meraih capaian target yang telah ditetapkan bila dibandingkan dengan target akhir tahun 100% dengan jumlah sekolah sebesar 14 sekolah. Kondisi efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan jumlah target sekolah menjadi 50% dari jumlah awal sehingga menjadi 7 sekolah.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.37 Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	21	5	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 21, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah sekolah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah yang diintervensi sehingga pelaksanaan Audiensi dapat terlaksana sesuai dengan target pada Triwulan I.
b. Pemilihan sekolah/madrasah intervensi dipilih berdasarkan kategori yang telah disampaikan kepada lintas sektor terkait.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah sehingga dapat terlaksana dengan baik
b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor terkait dan sekolah/madrasah yang diintervensi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait sehingga pelaksanaan audiensi dan pemilihan calon sekolah/madrasah intervensi dapat terlaksana dengan baik sesuai target walaupun sedikit tertunda.
b. Kegiatan yang menunjang pelaksanaan program triwulan I ini berupa pelaksanaan Audiensi dalam rangka pengenalan program kepada Kabupaten/Kota Intervensi di Kabupaten Solok.

C. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi

Perhitungan dan formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kategori Desa Pangan Aman

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi = 25%

- Pelatihan Kader = 25%
- Bimbingan Teknis Komunitas = 20%
- Monitoring dan Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

Tabel 3.38. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	6	5	5	100	Baik	5	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I tahun 2025

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 5%, dengan target 5%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori baik.

Pada Triwulan I dengan target 5% untuk kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Daerah yang akan diintervensi yang merupakan bagian dari tahapan Advokasi Lintas Sektor Desa Pangan Aman dengan bobot total 25% yang pelaksanaan kegiatannya pada Triwulan II.

Tabel 3.39 Progres IKU Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Januari		0.00					0.00
Februari	5	0.00					0.00
Maret	10	5.00					5.00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 5 %, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% (6 desa), maka capaian yang diperoleh sebesar 5% dengan kategori Perlu upaya keras. Program desa pangan aman bersifat kumulatif sehingga berdasarkan bobot tahapan program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan diperkirakan akan dapat dicapai pada triwulan berikutnya. Efisiensi anggaran yang dilakukan berimbas pada jumlah desa pangan aman yang diintervensi menjadi 3 desa dari 6 desa yang ditargetkan.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.40 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	10	5	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029 Jumlah desa pangan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 10, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah desa.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

a. Pelaksanaan Audiensi kepada Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik
b. Pemilihan nagari intervensi dipilih berdasarkan kategori yang telah disampaikan kepada lintas sektor terkait.
c. Perubahan tahapan program dari petunjuk teknis dari unit pengampu menyebabkan terjadi penyesuaian kembali perencaaan tahapan program

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Mempertimbangkan segala kemungkinan kendala yang dapat terjadi diluar kondisi rutin dalam penyusunan rencana kegiatan

b. Jadwal pelaksanaan kegiatan dikomunikasikan kembali dengan baik bersama pihak terkait sehingga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait sehingga pelaksanaan audiensi dan pemilihan calon nagari intervensi dapat terlaksana dengan baik sesuai target walaupun sedikit tertunda.
b. Kegiatan yang menunjang pelaksanaan program triwulan I ini berupa pelaksanaan Audiensi dalam rangka pengenalan program kepada Kabupaten/Kota Intervensi di Kabupaten Solok.

D. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Cara Perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Forum Advokasi Komitmen Pemda = 25%
- Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar = 25%
- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar = 20%
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2024			(%)	KRITERIA	(%)	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	5	100	Baik	5	Perlu Upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 5% dari target sebesar 5% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Baik

Pada Triwulan I dengan target 5% untuk kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Daerah yang akan diintervensi yang merupakan bagian dari tahapan Advokasi Lintas Sektor Desa Pangan Aman dengan bobot total 25% yang pelaksanaan kegiatannya pada Triwulan II.

Tabel 3.42. Progres IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TW I - 2025

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Januari	0	0.00					0.00
Februari	5	0.00					0.00
Maret	10	5.00					5.00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 5% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% (1 pasar) maka capaian yang diperoleh sebesar 5% dengan kategori Perlu upaya keras. Realisasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif untuk semua tahapan program yang telah dilaksanakan, maka target akhir tahun sebesar 100% akan tercapai setelah semua tahapan kegiatan selesai dilaksanakan.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.43 Perbandingan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 2, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah pasar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

a. Audiensi kepada Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik
b. Pemilihan pasar intervensi dipilih berdasarkan kategori yang telah disampaikan kepada lintas sektor terkait sehingga diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan program.
c. Perubahan tahapan program dari petunjuk teknis dari unit pengampu menyebabkan terjadi penyesuaian kembali perencaaan tahapan program

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Memperkuat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah/stakeholder untuk keberlangsungan dan keberlanjutan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

b. Membentuk grup Whatsapp dengan petugas Pasar dan OPD terkait sehingga semua tahapan kegiatan dapat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik

c. Penyesuaian perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan kalender kegiatan lain yang sudah ditetapkan pemerintah.

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu baru terlaksana hingga tahap Audiensi di Triwulan I dengan pertimbangan pelantikan pimpinan daerah yang baru dilaksanakan pada Februari 2025.

b. Terdapat tahapan program yang dihilangkan dan pelaksanaan digabung sehingga terjadi penyesuaian penyusunan perencanaan pelaksanaan program

PENILAIAN RISIKO SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Risiko yang teridntifikasi pada sasaran kegiatan ini adalah : Pada kegiatan KIE terdapat penggelapan penggantian uang transpor/uang harian yang diberikan kepada peserta KIE oleh pelaksana kegiatan KIE, kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tidak terlaksana sesuai perencanaan, dan pesan pesan KIE tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Untuk kegiatan desa pangan aman, adanya risiko penyampaian program keamanan pangan terpadu tidak jelas dan rinci, kader keamanan pangan yang dibimtek tidak sesuai kriteria kader, program desa pangan aman tidak dilanjutkan setelah berakhirnya intervensi. Untuk kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaaan keamakan pangan, dimana sekolah yang telah diintervensi tidak melanjutkan program secara mandiri di tahun pengawalan

Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah : pencantuman nomor Hp pada daftar hadir untuk dihubungi secara acak dalam memastikan kesesuaian keuangan, materi KIE dibuat dengan bahasa yang sederhana dan design menarik. Melakukan KIE secara langsung secara lebih luas kepda masyarakat dan melaksanakan audiensi kepada pemerintah daerah sebelum pelaksanaan program. Pemilihan kader keamanan pangan desa yang lebih kompeten, penandatanganan

komitmen kepala desa, menyediakan link materi dan bahan edukasi keamanan pangan yang dapat diakses oleh peserta dan monitoring melalui grup whatsapp program PJAS, desa dan pasar setiap Kabupaten/Kota yang diintervensi.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN.

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMK Pangan Olahan adalah (a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, dan (b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek

CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Kategori yang didampingi untuk UMKM OBA adalah (a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar; (b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK); (c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam; (d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap; (e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan (f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Obat Bahan Alam yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM obat tradisional, Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMKM Kosmetik adalah (a) UMKM yang memproduksi kosmetik; (b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*); (c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan (d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Kosmetik yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM Kosmetik, Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cara Perhitungan dan formula

Cara perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

Tabel 3.44 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	14,5	18	124,14	Tidak dapat disimpulkan	110	14,5%	Perlu Upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 18% bila dibandingkan dengan target 14,5%, maka capaian yang diperoleh adalah 124,14% dan mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.45 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

BULAN	TARGET	UMKM PANGAN OLAHAN	UMKM OBA	UMKM KOSMETIK	PROGRESS
Januari	4.16	4.00	0.00	0.00	4.00
Februari	10.33	9.00	13.00	13.00	11.67
Maret	14.5	22.00	15.50	16.50	18.00

Tahapan kegiatan pendampingan pada Triwulan 1 yang telah dilakukan adalah penetapan target UMKM Pangan, UMKM OBA, UMKM Kosmetik, dan telah dilaksanakan pendampingan terhadap UMKM Pangan dan Kosmetik. Fasilitasi pendampingan sarana OBA *start up* belum dapat dilaksanakan disebabkan belum ada pelaku usaha OBA yang mengajukan permohonan di

Triwulan 1 ini. Hasil capaian pendampingan UMKM di sarana pangan olahan adalah 124,14% (Tidak dapat disimpulkan), hal ini disebabkan KIE Keamanan Pangan direncanakan pada triwulan 2 mengingat jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan IP CPPOB masih terbatas, dalam realisasinya kegiatan KIE Keamanan Pangan dapat dilaksanakan pada bulan Maret sehingga hasil capaian pendampingan UMKM jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 18% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 80% (selesai tahap 100%) maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 18% dengan kategori Perlu upaya keras

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.46 Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84	18	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 84, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress pendampingan, sedangkan target Renstra adalah jumlah persentase UMKM yang didampingi.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Penetapan target sarana UMKM pangan. OBA dan kosmetik yang akan di dampingi dilakukan dengan memastikan komitmen masing-masing pelaku usaha akan melaksanakan tahapan pendampingan secara konsisten.
b. KIE Keamanan Pangan pada Triwulan I dapat dilaksanakan pada Triwulan I yang sebelumnya direncanakan pada Triwulan II mengingat jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan IP CPPOB masih terbatas.
c. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada UMKM yang yang sudah didampingi pada tahun 2024 tetapi belum terbit sertifikat IP CPPOB/sertifikat CPOTB bertahap/SPA CPKB.
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha yang sedang melakukan pengajuan izin edar, sehingga tahapan pendampingan oleh pelaku usaha akan ditindaklanjuti fasilitator dengan melanjtkan tahap pendampingan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

a. Melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif untuk percepatan perbaikan sarana produksi pangan. OBA, kosmetik dan pemenuhan dokumen mutu, baik secara langsung ataupun *on line*.
b. Melakukan revisi sarana produksi yang menjadi target pendampingan jika pelaku usaha tidak memenuhi komitmennnya atau mengundurkan diri pada tahapan pendampingan umkm.
c. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka menjaring pelaku usaha UMKM**.**

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a. Melakukan seleksi awal pada penetapan target UMKM didampingi dengan menerapkan Layanan Si Jempol, dimana petugas akan melakukan jemput bola ke sarana produksi pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin edar.

b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangkamelaksanakan tahapan pendampingan UMKM. Pada proses pendampingan pembuatan dokumen beberapa instansi memiliki fasilitator UMKM yang dapat dilibatkan pada tahapan pendampingan ini.

c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan agar dapat melaksanakan pendampingan terhadap UMKM lebih baik. **.**

PENILAIAN RISIKO MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Uraian peristiwa risiko pada sasaran ini adalah permohonan audit/ kunjungan pembinaan yang diajukan pelaku usaha tidak dapat segera ditindaklanjuti, penyampaian informasi terkait sertifikasi secara langsung oleh petugas layanan publik kurang lengkap

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Membuat daftar prioritas sarana produksi yang akan segera ditindaklanjuti dan segera menghubungi pelaku usaha untuk pendampingan tahap awal secara daring. Memberikan sosialisasi dan penjelasan tatacara dan persyaratan sertifikasi kepada petugas layanan tentang persyaratan layanan yang tercantum dalam standar layanan publik.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

A. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian keberhasilan penyidikan kajahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Cara Perhitungan Dan Formula

: Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Tabel 3.47. Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	42,5	20	47,06	Kurang	22,22	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pembobotan tersebut diatas realisasi nilai tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 20% bila dibandingkan dengan target 42,5%, maka capaian yang diperoleh adalah 47,06% dan mendapatkan kategori kurang. Penetapan target 42,5 % berdasarkan adanya carry over perkara yang sampai tahap P21 yang dihitung terhadap target perkara effisiensi anggaran sebanyak 1 perkara sehingga jika diperhitungkan terhadap target perkara buka blokir anggaran sebanyak 4 perkara ditambah 1 perkara carry over akhirnya

terjadi penurunan nilai keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan karena pembagi dari perhitungan bobot perkara adalah 5 perkara.

Pada triwulan I tahun 2025 ini, PPNS BBPOM di Padang berhasil menindak 1 perkara tindak pidana di bidang obat bahan alam yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 3.48 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	4	1	0	0	0			0		1	0			0	17
Februari	4	1	0	0	0			0		1	0			0	17
Maret	4	1	1		0.15			0		1	0.85			0	20.00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 20% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 90%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 22,22% dengan kategori perlu upaya keras. Selisih kedua persentase tersebut adalah 67,78% dengan menyisakan waktu 9 bulan target 90 % diprediksi dapat tercapai.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.49 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	94	20	21,28%	Perlu upaya keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 21,28% termasuk kategori Perlu upaya keras. Untuk itu diperlukan perencanaan yang efektif dan program yang tepat agar target pada akhir Renstra dapat tercapai

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

Rendahnya nilai persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan disebabkan oleh penentuan target perkara yang sebelumnya telah dihitung perencanaan 1 tahun sesuai effisiensi anggaran sebanyak 1 perkara dan ternyata ada perubahan dari unit pengampu untuk dihitung sesuai pembobotan perkara sebelum effisiensi anggaran sebanyak 4 perkara sehingga dengan pembagi pembobotan besar hasil yang didapat menjadi kecil. Keterlambatan dalam informasi terhadap adanya kejelasan penentuan target pada masa transisi target effisiensi dan buka blokir sehingga perencanaan kurang optimal. Meskipun target belum tercapai, tetap ada ruang untuk peningkatan dan penyempurnaan kinerja ke depan**.**

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan yang matang, pengembangan taktik dan teknik intelijen yang harus semakin dikembangkan mengingat modus kejahatan sering berubah dan semakin canggih. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi petugas dan melengkapi peralatan intelijen sesuai pedoman.

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang kerja pada triwulan I tahun 2025 adalah operasi intelijen yang dilaksanakan dengan taktik dan teknik yang tepat. Selama triwulan I telah dilakukan operasi intelijen serta koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan BeaCukai dengan hasil tindak lanjut berupa operasi penindakan sebanyak 1 kali.

PENILAINAN RISIKO TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang teridentifikasi dalam sasaran ini adalah : Informasi yang diterima tidak lengkap dari petugas, personil dengan sengaja tidak melaporkan sarana yang melakukan pelanggaran tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan karena adanya kepentingan pribadi dengan petugas dan adanya benturan kepentingan. Proses penyidikan dapat dihentikan sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Petugas pengelola Barang Bukti menghilangkan barang bukti atau barang bukti rusak dalam gudang barang bukti.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan penugasan bersama, dan kegiatan intelijen dilakukan berdasarkan rencana kegiatan intelijen, dilakukan oleh tim yang terdiri dari minimal 3 orang dan dilakukan rotasi terhadap anggota tim tersebut saat melakukan kegiatan intelijen. Meningkatkan koordinasi secara intens antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, serta Kepala Balai Besar POM di Padang dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk kelancaran pemberkasan dan proses penyidikan. Melakukan audit terhadap penyimpanan barang bukti

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DIBIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu

PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Cara Perhitungan Dan Formula

: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Tabel 3.50 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	Baik	55,56	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target 50%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kategori Baik

Tabel 3.51 Hasil Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Bulan Januari, Februari dan Maret 2025

Fungsi	Nilai	

Patroli Siber			Profiling						Nilai Akhir (x bobot 50%)		
B1	B2	B3	B1	B2	B3	1	2	3	1	2	3
T	T	T	T	T	T	100%	100%	100%	50%	50%	50%

Keterangan:

Kolom B diisikan dengan kode sebagai berikut pada setiap bulannya:

T : Tepat Waktu

L : Lewat Waktu

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 90%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 55,56% dengan kategori perlu upaya keras.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.52 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50	53,19	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 53,19% termasuk kategori perlu upaya keras . Untuk ini perlu dilakukan perencanaan dan program-program yang akurat untuk tercapai target Renstra

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

Telah melakukan pelaporan tepat waktu yang dilakukan oleh petuga yang kompeten untuk melakukan pelaporan patroli siber dan profiling siber tepat waktu dan didukung oleh sarana informadsi teknologi yang mumpuni.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan yang matang dan pengembangan informasi tentang peredaran sediaan faramasi dan pangan olahan ilegal secara online.

5. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Program yang menunjang kerja pada triwulan I tahun 2025 adalah patroli siber dan profiling siber yang dilaksankan terencana dan tepat waktu.

PENILAIAN RISIKO TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DIBIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang teridentifikasi pada sasaran kegiatan ini adalah : Informasi lengkap mengenai data dan personal pelaku peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring seringkali merupakan data fiktif dan tidak lengkap.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan undercover menggunakan akun palsu untuk berkomunikasi dengan pemilik akun

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran ini diwujudkan melalui 1 indikator utama yaitu :

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Cara Perhitungan dan formula

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Target Indikator Pelayanan Publik ini ditetapkan mulai dari B09 (Bulan September) sehingga di triwulan I ini belum terdapat realisasi .

PENILAIAN RISIKO LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Identifikasi risiko pada sasaran kegiatan ini adalah : Izin edar terbit dengan rekomendasi yang belum memenuhi persyaratan.Keterlambatan verifikasi dan pendelegasian

pengajuan IP CPPOB. Pelaksanaan audit sarana dan Penerbitan rekomendasi CPPOB/CPOTB/CPKB//SMKPO/CDOB tidak sesuai timeline yang ditetapkan. Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu. Hasil audit tidak segera dibuatkan surat tindaklanjut/pemberitahuan kepada pelaku usaha. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan,

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Evaluasi berjenjang Informasi dan Koordinasi dengan pusat terkait ketentuan dan persyaratan terbaru. Pengecekan aplikasi secara berkala. Memberikan pendampingan dalam proses penginputan data. Memberikan Sosialisasi dan Bimtek cara pengajuan IP CPPOB kepada pelaku usaha, mengkomfirmasi alamat pelaku usaha pada esertifikasi dengan data oss. Melakukan monitoring wa layanan secara berkala. Monitoring timeline evaluasi pada aplikasi e-sertifikasi. Melakukan bimtek kepada pelaku usaha terkait update terbaru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pengaturan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana dengan memperhatikan benturan kepentingan dan penerapan Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) kepada seluruh petugas.

3. 1. 9 CAPAIAN SASARAN KEGIAYAN IX

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Nilai Pembangunan ZI UPT
B. Nilai AKIP UPT
C. Nilai Kinerja Anggaran
D. Indeks Manajemen Risiko

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-XI sebagai berikut :

A. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja

diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Perhitungan dan formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Target kinerja IKU Nilai pembangunan ZI diukur pada akhir tahun sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan I 2025.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pada triwulan I antara lain: Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Padang dan Tim AOC. Penyusunan Rencana Kerja dan Target Prioritas. Melaksanakan penilaian mandiri (self assesment) atas pebangunan ZI dengan mengisisi Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang telah dikirimkan pada tanggal 15 April 2025 setelah direviu oleh auditor internal. Balai Besar POM di Padang sebagai unit yang telah mendapatkan predikat WBBM, maka akan dievaluasi untuk mengukur capaian IKU Nilai Pembangunan ZI dan monitoring implementasi pembangunan ZI di Balai Besar Pom di Padang

Realisasi IKU Nilai pembangunan ZI tahun 2024 belum tercapai, maka terhadap rekomendasi atau rencana perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024 telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Telah menetapkan program prioritas dalam rencana kerja pembangunan ZI pada seluruh area perubahan
2. Telah mendokumentasikan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
3. Telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja ZI secara bulanan

4. Telah melakukan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan kesenjangan dengan standar kompetensi
5. Telah membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi, pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik secara berkala
6. Telah dilakukan analisis terhadap nihilnya WBS
7. Telah mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan
8. Telah berupaya untuk melakukan pengembangan inovasi pada semua area perubahan

B. NILAI AKIP UPT

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja Internal dan (5) Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Padang Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	18,24
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,40	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	15,86	16,49
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	80,38	81,77
Predikat			**A**	**A**

Realisasi IKU Nilai AKIP tahun 2024 belum tercapai, maka terhadap rekomendasi atau rencana perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024 telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Telah memanfaatkan subsite BBPOM di Padang sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja dengan telah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2025
2. Telah melakukan input data dan capaian indikator secara tertib dan telah dilakukan reviu berjenjang dan diverifikasi setiap bulan
3. Telah melakukan pengisian data kinerja pada aplikasi simetris secara lengkap termasuk informasi terkait kendala dan rekomnedasi dan rencana rindak lanjut.
4. Telah menetapkan kebijakan pimpinan tentang pemberian reward and punishment dan telah mengiplementasikan kebijakan tersbut.

5. Telah menyusuna laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi peggunaan anggaran per sasarn strategis dan indikator
6. Telah menyusun kertas kerja dan perhitungan data capaian kinerja dan memasukkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja

C. NILAI KINERJA ANGGARAN

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1. Revisi DIPA (bobot 10%)
    2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
    3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
    4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
    5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
    6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
    7. Capaian Output (bobot 25%)
    8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
    1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
    2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahu sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I 2025

E. INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Cara Perhitungan dan Formula :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh evaluator Inspektorat, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Padang dapat dikategorikan Risk Aware dengan nilai 2,906. Terhadap kelemahan implementasi SPIP BBPOM di Padang, Inspektorat Utama telah merekomendasikan melakukan perbaikan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaika ini adalah : Memastikan seluruh ASN sudah ikut pelatihan Manrisk di IDEAS, menyusun kategori atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak, akan membuat rumusan risk event yang jelas/spesifik, akan lebih teliti membuat atribut dan aktifitas pengendalian, memastikan nilai risiko inheren dan risidu yang ditetapkan sesuai pedoman dan membuat tindakan mitigasi yang berbeda dengan pengendalian existing serta membuat daftar risiko dengan mempertimbangkan isu internal/eksternal.

PENILAIAN RISIKO TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Identifikasi risiko pada sasaran ini adalah : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. Adanya kelebihan bayar uang makan kepada pegawai. Unit Pengolah (UP)belum optimal dalam mengimplementasikan persuratan tentang penulisan naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND). Tidak lengkapnya komponen pengelolaan kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN. Ketidaktepatan dalam menetapkan target RAPK per bulan. pengumpulan dan pengolahan data yang salah, pengiriman laporan tidak tepat waktu dan terdapatnya kesalahan data pada Laporan kinerja interim. Revisi anggaran melebihi batas

maksimal dalam 1 semester serta Realisasi Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan koordinasi dengan semua fungsi untuk mendapatkan kegiatan pengganti apabila tidak jadi dilaksanakan. Konfirmasi Kehadiran kepada seluruh pegawai oleh kepegawaian sebelum pembayaran uang makan diproses. Untuk kearsipan melakukan koordinasi antara petugas unit pengolah dengan unit kearsipan dan Sosialisasi terkait tata naskah dinas. Melakukan onev pengelolaan kinerja pegawai dan reminder kepada Ketua Tim terkait hasil monev tersebut, Ketua Tim juga melakukan reviu terhadap SKP anggota tim pada saat penilaian kinerja.

Aktifitas pengendalian terkait sistem akuntabilitas adalah Menyusun target RAPK per bulan dengan perhitungan yag akurat, memonitoring realisasi RAPK per bulan, mengajukan revisi target RAPK untuk bulan yang belum berjalan sekiranya ada estimasi tidak tercapai. Konfirmasi data kepada Katim bila ada ketidaksesuaian. Melakukan pengumpulan data dengan cermat dan tepat waktu. Verifikasi data realisasi di bit.ly RAPK oleh tim Monev TU, pengisian form perbaikan data apabila ada kesalahan data dan Pengisian data di bit.ly RHPK lebih awal melalui memo dinaa Kepala BBPOM di Padang. Terkait revisi dengan meminimalkan revisi dengan menggabungkan beberapa jenis revisi dalam 1 pengajuan revisi dan mengajukan revisi target untuk bulan yang belum berjalan sekiranya ada estimasi tidak tercapai.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	JANUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/ Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	0,00	0,00	1. Ketentuan pelaksanaan sampling sesuai pedoman sampling yang terbaru (berbasis risiko) mengharuskan adanya evaluasi terlebih dahulu atas pemenuhan penilaian risiko terhadap produk obat yang ada di sarana terhadap ketentuan yang ada di pedoman sampling. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan sampling yang memenuhi kriteria sesuai perencanaan pada sarana yang dikunjungi sehingga mengharuskan sampling dilakukan pada sarana yang lain yang memenuhi kriteria risiko yang berdampak pada diperlukannya lebih banyak waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sampling. 2. Selain itu, tidak selalu sarana yang dijadikan target sampling memiliki jenis dan/atau jumlah yang memadai untuk sampel yang ditargetkan untuk disampling.	Meningkatkan pemahaman petugas melalui pembelajaran daring IDEAS dan membuat perencanaan sampling per bulan sesuai analisis resiko	Januari	selesai	Meningkatkan pemahaman petugas melalui pembelajaran darin IDEAS dan membuat perencanaan sampling per bulan sesuai analisis resiko	-	sampling dan pengujian sediaan Farmasi dilaksanakan dan dilaporkan sesuai ketentuan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Pelaksanaan KIE farmakovigilans direncanakan Bulan Februari 2025, sesuai Juknis, pelaporan dihitung dari jumlah laporan sarana pelayanan kesehatan / jumlah sarana yang mengikuti KIE Farmakovigilans	Menyiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans secara daring untuk 45 sarana pelayanan kesehatan.	Februari 2025	progres		`- pendataan peserta, `- identifikasi narasumber eksternal, `- menyiapkan surat laporan rencana	Terlaksananya KIE Farmakovigilans

												pelaksanaan KIE farmakovigilans `- menyiapkan surat permintaan narasumber dan undangan peserta	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	-	70,55	-	Tidak ada kendala di pengujian, keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji melalui aplikasi SIPT	Februari 2025	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Melakukan monitoring terhadap sampling produk dan pengujian pangan olahan, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam tindak lanjut hasil uji produk pangan olahan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	-	100,00	-	sampel masuk bulan januari selesai uji dilaksanakan sesuai time line	terus meningkatkan koordinasi internal dalam melakukan tindak lanjut terhadap sampel kasus KLB	Februari 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter uji sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		melakukan monitoring terhadap sampel KLB yang diuji di laboratorium BBPOM Padang
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	-	0,00	-	Belum ada sampel PIRT yang disampling pada bulan Januari	melaksanakan sampling sampel PIRT pada bulan Februari	Desember 2025	Progres		sampling dilakukan bertahap pada bulan selanjutnya	melakukan monitoring terhadap capaian sampling dan pengujian sesuai ketentuan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjut	89,50	Flat	-	60,00	-	Di bulan ini belum ada pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarananya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja

	i oleh stakeholder						januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.	Februari 2025	Selesai	- Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	- Monitoring proses penarikan mandiri produk yang TMK dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik

9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	0,00	0,00	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	79,00	92,94	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Melakukan monitoring terhadap
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	100,00	123,32	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- - Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Melaksanakan	Februari 2025	Selesai	- - Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh	- Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana telah dikirimkan kepada pelaku usaha

								pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.			pelaku usaha. - Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	Kumulatif Triwulan	-	-	-	Penyesuaian perencanaan dengan Tools SKL konsep terbaru 2025-2029 (SRL, Kompetensi, Peralatan, Verifikasi MA (tambahan di konsep terbaru)	Penyusunan perencanaan sesuai dengan Tools SKL	Februari	Selesai	Penyusunan perencanaan sesuai dengan Tools SKL		Perencanaan 4 Aspek SKL dalam Tools sudah diselesaikan semua lab
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	-	-	-	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - Instruksi Kedeputi II untuk mengadakan KIE melalui Car Free Day dalam rangka HUT BPOM ke 24. - Belum tersedia link survei Efektifitas KIE.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Melaksanakan KIE melalui CFD sesuai instruksi Kedeputian II dengan merevisi anggaran. - Pengukuran survei Efektifitas KIE	Januari	Progress	- Telah dilaksanakan KIE melalui CFD sesuai instruksi Kedeputian II dengan merevisi anggaran pada tanggal 19 Januari 2025 yang dihadiri oleh 150 peserta.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Pengukuran survei Efektifitas KIE menunggu Link	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Tingkat efektivitas KIE

												dari Pusat.	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program terbaru	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait petunjuk teknis pelaksanaan program	Penyusunan Perencanaan pelaksanaan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Desa Pangan Aman Tahun 2025	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program terbaru	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait petunjuk teknis pelaksanaan program	Penyusunan Perencanaan pelaksanaan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
17	Jumlah pasar pangan aman	1,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Pasar	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunj	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait	Penyusunan Perencanaan pelaksan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan

	berbasis komunitas						Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025	uk Teknis Pelaksanaan Program terbaru			petunjuk teknis pelaksanaan program	aan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	4,16	4,00	96,15	- Pelaku usaha UMKM belum memahami CPPOB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Februari 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan dalam rangka penerapan CPPOB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi		-Telah dillakukan pembinaan dalam rangka penerapan CPPOB - Telah dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	17,00	40,00	Maraknya peredaran obat bahan alam mengandung BKO, obat bahan alam ilegal dan kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik ilegal di wilayah Sumatera Barat.	Melakukan kegiatan intelijen dan laporan informasi kegiatan intelijen yang diinput pada aplikasi dashboard penindakan.	Desember 2025	progress	Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen	Penyelesaian perkara carry over	Penilaian perkara carry over yang diperoleh pada tahap P21 sesuai perencanaan

20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun rencana laporan analisis kerawanan kejahatan	
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	-	1. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA	Januari 2025		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	Zona 1 *- Program prioritas tahun 2024 tidak semua terlaksana, * Belum tersedia Rencana Kerja RB tahun 2025 *- Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur llaporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan Zona 2: *Program prioritas	Zona 1 *- Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * - membuat rencana kerja RB 2025 *- Memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai	Maret 2025	Progress	Zona 1 Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 * Monev	Zona 1 Progres Zona 2 Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan	Tercapainya target Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang Tahun 2025 Zona 1 * Program prioritas terlaksana * Monev Bulanan terlaksana sesuai ketentuan

							zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU Zona 3 Zona 4 : Rencana kerja Zona Akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik. Terdapat kendala dalam penyusunan dan pelaporan capaian kinerja terkait realisasi, monev dan ketepatan waktu, hal ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi bersama tim Sakip, namun Nilai komponen hasil pada LHE RB tahun 2024 terkait capaian Kinerja masih rendah karena masih terdapat beberapa target IKU yang belum tercapai dan belum terdapat inovasi pada Zona Akuntabilitas Zona 5 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	pedoman Zona 2 *Melaksanakan Renja 2025 *Menjalankan program prioritas zona 2 (helpdesk) *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya Zona 3 Zona 4 *Membuat rencana Kerja 2025 *Melakukan Monev Renja *Melaksakan inovasi terkait Monev Kinerja yaitu googlesite monev Kinera Zona 5 *Implementasi SAKIP untuk pencapian kinerja semua IKU di setiap bulan Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaa			Renja Tahun 2024 telah disusun * Zona 5 Zona 6: -	*Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Zona 2: *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana * Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .

								n dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .					
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	Belum tercapainya nilai AKIP tahun 2024 sehingga berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat harus dilakukan perbaikan terhadap SAKIP BBPOM di Padang antara lain : 1. Belum memanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang 2. Masih terdapat hasil input data capaian indikator yang tidak sesuai, belum tertib, dan terdapat kesalahan data 3. Pelaksanaan pencapaian kinerja belum sepenuhnya sesuai SOP 4. Masih terdapat pengisian monev yang belum lengkap terkait permasalahan, rekomendasi dan rencana aksi dan ada yang belum berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan 5. Belum maksimal implementasi kebijakan pimpinan dalam pemberian reward and ounisment terkait dengan kierja 6. Masih terdapat Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, RAPK dll yang belum sesuai ketentuan dan	1. Memanfaatkan subsite untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang yang terdiri dari RKT, PK, RAPK, Lakip, Laptah dll 2. Melakukan input data capaian indikator dan aplikasi online lainnya secara akurat, tertib, dan tepat waktu 3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian dan pelaporan kinerja sesuai SOP dan mensosialisasikan SOP, cara pengisian monev dan pedoman terkait 4. Pengisian monev oleh semua ketua Tim dengan lengkap berkesinambungan dan	Desember 2025	Progres	1. RKT, PK dan RAPK sudah diupload, Lakip dan Laptah perlu finishing terlebih dahulu 2. Input data realisasi bualan Desember 2024 3. Implementasi sakip sesuai SOP 4. Pengisian monev capaian kinerja Desember 2024 oleh ka Tim 5. Terdapat SK reward and punisment 6. Laporan Evaluasi Internal TW 4 dan Lakip tahunan telah dikirim	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari 5. Implementasi Reward and punismen t	Tercapainya target indikator Nilai AKIP Tahun 2025

							tepat waktu dan kertas kerja yang belum lengkap	selaras antar periode pelaporan sesuai petunjuk pengisian matriks 5. Membuat SK dan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemberian reward and punisment 6. Membuat Rancangan Renstra 2025-2029, RKT, PK, RAPK, Realisasi RAPK/RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, sesuai dengan pedoman dan dikirimkan tepat waktu					
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Nilai kinerja anggaran tahun 2024 telah mencapai target dengan nilai EKA 85,40 dan IKPA 99,13. Perhitungan NKA = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Pada tahun 2025 ini target berupa kriteria, yatu kriteria 5 (sangat baik) dengan range nilai 90,01 s.d. 100.	1. Mengontrol Jumlah Revisi DIPA yang dilakukan per semester 2. Mengontrol Deviasi Halaman III DIPA per bulan 3. Mempercepat Penyerapan Anggaran 4. Mempercepat Belanja Kontraktual 5. Mempercepat Penyelesaian Tagiahan 6. Menyelola UP dan TUP dengan tepat waktu per bulan 7. Melaporkan Capaian Output	Desember 2025	Progres	1. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan januari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan januari. 3. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan januari. 4. Telah mnyelesaikan pertanggungjawaba	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

								secara tepat dan tepat waktu per bulan 8. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan RO SBK			n UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan Januari.	dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 1 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan februari 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 7. Melaporkan capaian output Bulan Januari secara tepat dan tepat waktu 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	Tidak tercapainya target Tingkat Maturitas SPIP BBPOM Padang Tahun 2024 antara lain disebabkan oleh : '- Belum terdapat kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko - Masih terdapat risk event yajg belum jelas atau spesifik - Terdapat atribut penegndalian yang tidak selaras dengan aktifitas pengendalian - Masih terdapat penentuan level risiko yang tidak tepat - Terdapat tindakan mitigasi yang sama dengan pengendalian exixting - Masih kurangnya	1. Membuat kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko 2. Membuat rumusan risk event yang jelas dan spesifik 3. Membuat atribut pengendalian yang diselaraskan dengan aktifitas pengendalian 4. Menetapkan level risiko sesuai dengan pedoman dan terdapat	Agustus 2025	1. Selesai 2 sd 5 Semester 1 sudah dilaksanakan, progres untuk Daftar risiko semester 2 6 sd 8 Progres	1. Telah disusun kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko 2. Telah disusun rumusan risk event yang jelas dan spesifik dengan melakukan reviu terhadap daftar risiko yang ada 3. Telah membuat atribut pengenda	1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifkasi	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

							pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada	penurunan setelah dilakukan pengendalian 5. Menetapkan tindakan mitigasi yang tepat dan diluar pengendalian existing yang telah dilakukan sebelumnya 6. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dilakukan pengendalian 7. Meningkatkan pemahaman dan refresment pegawai tentang Manajemen risiko melalui sosialisasi pada apel pagi 8. Melakukan identifkasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada			lian yang diselaraskan dengan aktifitas pengendalian 4. Telah Menetapkan level risiko sesuai dengan pedoman dan sudah terdapat penurunan risiko pada level risidu setelah dilakukan pengendalian 5. Telah membuat tindakan mitigasi yang tepat dan diluar pengendalian existing yang telah dilakukan sebelumnya	risiko dengan memperti mbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Akan Melakukan penilaian risiko Semester II secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	FEBRUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,19	109,73	1. Perbedaan perhitungan Time Line pengujian untuk komoditi obat pada Pedoman Sampling (TL : 30 HK) dan Juknis Regional (TL : 15 HK), Juknis regional baru disosialisasikan pada awal Maret, Time Line pengujian pada Januari dan Februari masih mengacu pada Pedoman Sampling , sehingga beberapa item sampel yang dilaporkan pada bulan Februari tidak memenuhi Time Line 15 HK 2. Tidak terpenuhinya parameter uji pada sediaan multivitamin, pengujian hanya dilakukan terhadap Vitamin C dan vitamin B6, namun tidak dilakukan pengujian terhadap kandungan vitamin A.	1. Menginformasikan kepada Tim Pengujain komoditi obat terkait perubahan Time Line dari 30 HK menjadi 15 HK 2. Mempelajari kembali pedoman penetapan parameter uji pada Pedoman Sampling dan Pengujian serta perBPOM terkait persayaratan keamanan dan mutu masing-masing komoditi untuk memastikan acuan/syarat untuk masing-masing parameter uji	Maret	Selesai	1. Menginformasikan kepada Tim Pengujain komoditi obat terkait perubahan Time Line dari 30 HK menjadi 15 HK 2. Mempelajari kembali pedoman penetapan parameter uji pada Pedoman Sampling dan Pengujian serta perBPOM terkait persayaratan keamanan dan mutu masing-masing komoditi untuk memastikan acuan/syarat untuk masing-masing parameter uji	-	- Tim pengujian obat telah mengetahui perbahan Time line pengujian menjadi 15 HK, sehingga pelaksanan pengujian sampel berikutnya telah mengacu timeline 15 HK - penetapan parameter uji telah mengacu pada pedoman sampling dan pengujian
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25	Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25		Progres		Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25	penghitungan capaian target diakhir tahun

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	77,75	91,47	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini		37 sampel dapat diselesaikan pengujian sampai dengan Februari	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00			Tidak ada kendala	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Februari 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		Tercapai target
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam mencapai target sampel PIRT karena adanya efisiensi sehingga ketersediaan reagen disesuaikan dg kemampuan lab dalam pengujian sampel PIRT,	4 sampel disampling bulan Februari	Progres		sampel dilakukan secara bertahap	Peningkatkan kinerja
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	36,67	40,97	Di bulan ini masih sedikit pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarananya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	-	-	Pelaku usaha industri pangan rumah tangga belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pangan industri rumah tangga	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Solok dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan yang diproduksi aman dan bermutu.	Maret 2025	Selesai	- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kota Solok dalam rangka pembinaan dan pengawasan IRTP melalui peningkatan pembinaan IRTP di Kota Padang seperti penyuluhan PKP bagi UMKM pangan olahan, pengawalan label pre-market dan post-market, pengawasan penguna an bahan berbahaya, BTP dan bahan lain yang dilarang digunakan pada produk pangan. -	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	- Telah dikirimnya surat tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kota Padan dan Dinas Kesehatan Kota Solok Telah dikirimnya surat tindak lanjut kepada pelaku usaha pangan olahan

											Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik - Membuat surat tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kota Padang terkait hasil pengawasan 3 sarana IRTP Kota Padang dan 3 sarana IRTP Kota Solok. - Membuat surat tindak lanjut kepada industri pangan olahan di Kota Padang - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik		
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	-	-	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam	Tercapai target

												penerapan CAPA yang telah dibuat	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	96,55	113,59	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Melakukan monitoring terhadap
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,68	122,93	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan	Maret 2025	Selesai	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses	-	Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha

								yang dilaksanakan oleh pelaku usaha			evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	Kumulatif Triwulan	-	-	-	Verifikasi MA banyak yang harus dipenuhi karena baselinenya SRL Tools SKL yang sebelumnya (lama)	Masing2 Lab sudah mengangsur penyelesaian verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun di TW 1	Maret	Progres		Target Verifikasi TW I (diselesaikan paling lambat sesuai Time Line)	Verifikasi MA sesuai target TW 1 sudah diangsur diselesaikan masing-masing lab.
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	-	-	-	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - Pelaksanaan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" - Permintaan KIE dari Universitas M. Natsir - Belum tersedia link survei Efektifitas KIE.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Melaksanakan KIE untuk Universitas M. Natsir - Pelaksanaan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" - Pengukuran survei Efektifitas KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan pusat	Februari	Progress	- Telah dilaksanakan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" pada tanggal 2 Februari 2025. - Telah dilaksanakan KIE untuk Universitas M. Natsir pada tanggal 10 Februari 2025 - Pengukuran survei Efektifitas KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan puast.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program sekolah yang melaksanakan keamanan pangan	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program desa pangan aman	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	10,33	11,67	112,97	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM kosmetik belum memahami CPKB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Maret 2025	selesai	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	-	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	17,00	40,00	Tidak ada kendala. Terjadi penurunan target karena revisi anggaran dari 4 perkara menjadi 1 perkara		Desember 2025	progress	Laporan kemajuan perkara	Penyelesaian Perkara cary over	Penilaian perkara carry over yang diperoleh pada tahap P21 sesuai perencanaan
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun perencanaan laporan analisis kerawanan kejahatan	

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	#VALUE!	1. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA	Maret 2025		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	Zona 1 * Program prioritas tahun 2025 belum ditetapkan *Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur llaporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan Zona 2 *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional	Zona 1 *- Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * - membuat rencana kerja RB 2025 *- Memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai pedoman Zona 2 Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana	Desember 2025	Progress	Zona 1 Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan Zona 5 Zona 6: -	Zona 1 Monitoring penyusunan program prioritas tiap zona dengan melengkapi rencana aksi Verifikasi penyusunan Renja 2025 Verifikasi monev bulanan pelaksanaan rencana kerja Zona 2 Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan	Zona 1 Zona 2 *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .

							manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU Zona 3 Zona 4 *Inovasi zona 4 belum dilaksanakan Zona 5 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .				*Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	

23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Masih belum termanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang, karena laporan kinerja dan tahunan belum final 2. Realisasi RAPK, pengisian monev online dan manual bulan Januari belum bisa dilaksanakan karena realisasi belum bisa dihitung terkait DO yang belum final.	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari 5. Implementasi Reward and punisment	Desmber 2025	Progress	5. Implementasi Reward and punisment dengan pemberian penghargaan kepada pegawai berakhlak terbaik dan si paling rajin baraja serta realisasi anggaran dan capaian kinerja terbaik	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari dan Februari	Tercapainya target indikator INilai AKIP Tahun 2025
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari belum bisa dilaporkan karena belum dibukanya periode pelaporan oleh Kemenkeu sehingga Nilai IKPA dan EKA belum maksimal	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 1 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan	Desember 2025	Progres	1. Telah melakukan Revisi DIPA sekaligus revisi RPD pada bulan februari 2. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan februari 4. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan februari.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

								februari 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 7. Melaporkan capaian output Bulan Januari secara tepat dan tepat waktu 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK			5. Telah melakukan pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 6. Telah mnyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan februari.	anggaran TW 1. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan maret. 7. Melaporkan capaian output bulan januari-februari secara tepat dan tepat waktu. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifkasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Akan Melakukan penilaian	Agustus	Progres		"1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

								risiko Semester II secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain				internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MARET			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	96,38	111,10	Angka realisasi belum dapat disimpulkan karena terkendala metode perhitungan pencapaian untuk komoditi OBASK dan Kosmetik	Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan evaluasi, terkait rumus perhitungan yang ada pada template RHPK	Maret	Selesai	Melakukan perbaikan rumus hitung RHPK	Mengkomunikasikan dengan tim Roren BPOM terkait rumus perhitungan capaian RHPK	Capaian dapat dihitung dan dapat disimpulkan (Masih menggunakan perhitungan sementara)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 2 sarana pelayanna kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen padang dan RS Saanin	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Memngingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan	setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Progres		`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Memngingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan	belum tercapai, penghitungan di Bulan Desember 2025

								hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan				penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	78,90	92,82	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	50 sampel dapat diselesaikan pengujian	Maret	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Maret 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		Tercapai target
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	78,75	92,65	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	4 sampel dapat diselesaikan pengujian	Maret	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	39,88	44,56	Di bulan ini masih sedikit pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarananya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	-	-	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - - Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	April 2025	Selesai	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	- Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	92,00	Flat	92,00	-	-	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai	Mendampingi pelaku usaha dan penyusun	Tercapai target

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan						ketentuan perundang-undangan	pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan			timeline dan melakukan monev CAPA	an CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	63,44	74,64	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Melakukan monitoring terhadap
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,78	123,05	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring	April 2025	Progres	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasark	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha

								proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai			dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	an hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	Kumulatif Triwulan	76,70	81,20	105,87	Verifikasi MA banyak yang harus dipenuhi karena baselinenya SRL Tools SKL yang sebelumnya (lama)	Masing2 Lab sudah mengangsur penyelesaian verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun di TW 1	Maret	Selesai	Verifikasi MA TW I sesuai target	-	Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	86,17	97,92	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - KIE untuk UMK Pangan Olahan - Jumlah responden pengukuran survei Efektifitas KIE belum memenuhi target TW I.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - KIE untuk UMK Pangan Olahan. - Pengukuran survei Efektifitas	Maret	Selesai	- Perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkanJuknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Pelaksan	- Pengukuran survei Efektifitas KIEsudah memenuhi jumlah responden yang telah ditetapkan untuk TW I namun belum mencapai target perlu dilakukan beberapa interfensi seperti: meminta lebih spesifik	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.

								KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan pusat sesuai dengan jumlah responden yang telah ditetapkan untuk TW I			aan KIE untuk UMK Pangan Olahan tanggal 16 Maret 2025	judul materi yang diinginkan, meningkatkan interaksi dan meningkatkan layanan.	
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi perubahan bobot tahapan program	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan pengenalan program - Penyampaian kriteria Sekolah/Madrasah yang akan dijadikan sebagai pilot project	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret 2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Sekolah Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan sekolah/ madrasah intervensi (7 sekolah)	- Penetapan Sekolah/ Madrasah intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret	- Penetapan Desa/Nagari intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target

							perubahan bobot tahapan program	pengenalan program - Penyampaian kriteria Desa/Nagari yang akan dijadikan sebagai pilot project			2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Desa Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan nagari/desa intervensi (3 nagari)	Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi perubahan bobot tahapan program	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan pengenalan program - Penyampaian kriteria Pasar yang akan dijadikan sebagai pilot project	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret 2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Pasar Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan pasar intervensi (1 pasar)	- Penetapan Pasar intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	14,50	18,00	124,14	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM kosmetik belum memahami CPKB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan	April 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan	-	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan

							CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi			langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi		penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	20,00	47,06	Masih beredarnya sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu di wilayah Sumatera Barat.	Melakukan kegiatan intelijen dan intensifikasi operasi penindakan	Desember 2025	Progress	Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. Melakukan intensifikasi operasi penindakan	Penyelesaian carry over	tidak tercapainya target disebabkan realisasi perkara dihitung berdasarkan target awal Dipa (4 perkara) bukan terhadap target efisiensi (1 perkara) sedangkan perencanaan dihitung terhadap target effisiensi anggaran. Perlu dilakukan perubahan perencanaan target keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun rencana laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan	

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	-	1. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA	April 2025		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA		1. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	Zona 1 * Program prioritas tahun 2025 belum dituliskan target dan rencana aksi * Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI bulan maret belum ada Zona 2 *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU Zona 3 Zona 4 :	Zona 1 * Penetapan program prioritas 2025 * menyiapkan laporan pemantauan terhadap rencana kerja pembangunan ZI Zona 2 *Melaksanakan Renja 2025 *Menjalankan program prioritas zona 2 (helpdesk) *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja	Desember 2025	Progress	Zona 1 Program prioritas sudah ditetapkan Rencana kerja sudah ditetapkan Monev rencana kerja sudah terlaksana Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 Rencana Kerja dan target prioritas sudah ditetapkan Monev tw sudah diisi Persiapa	Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja bulan Maret 2025 *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau	Zona 1 * Program prioritas sudah ditetapkan * Rencana kerja sudah ditetapkan * Monev rencana kerja sudah terlaksana Zona 2 *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan

							*Rencana kerja dan program prioritas belum finalisasi *Masih diperlukan waktu untuk merancang inovasi googlsite monev kinerja Zona 5 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .			n inovasi Zona 4 Zona 5 Zona 6: - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik	hasil manajemen risiko .	kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Masih belum termanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang, karena laporan kinerja dan tahunan belum final 2. Realisasi RAPK, pengisian monev online dan manual bulan Januari dan Februari	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 di subsite 2. Input data monev online bulan januari, februari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip	Desember 2025	Progress		1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi 3.	Tercapainya target indikator INilai AKIP Tahun 2025

							belum bisa dilaksanakan karena realisasi belum bisa dihitung terkait DO yang belum final.	monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari dan Februari				Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret	
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari-februari belum bisa dilaporkan karena belum dibukanya periode pelaporan oleh Kemenkeu sehingga Nilai IKPA dan EKA belum maksimal. Target realisasi anggaran untuk belanja barang dan modal TW 1 tidak tercapai karena pada bulan februari dilakukan efisiensi anggaran dengan mekanisme pemblokiran dan untuk belnja modal adanya isntruksi untuk dihold dulu pengadaannya. Kemudian utntuk belanja barang ada relaksasi angagaran pada beberapa RO PN dengan emkanisme buka blokir yang usulan revisnya diajukan di akhir maret dan pengesahan DIPAnya keluar pada awal april sehingga target anggaran TW 1 menjadi lebih besar setelah relaksasi buka blokir. Namun untuk nilai IKPA TW 1 ada dispensasi dari Kemenkeu karena adanya kebijkan efisiensi	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 1. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan maret. 7. Melaporkan capaian output bulan januari-	Desember 2025	Progres	1. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan maret. 3. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 4. Telah melakukan pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari maret. 5. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan maret.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan april yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pd bulan april. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan april. 7.	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

							dan juga libur hari raya yang cukup panjang.	ferbuari secara tepat dan tepat waktu. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.				Melaporkan capaian output bulan januari-maret secara tepat dan tepat waktu. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	"1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	Agustus	Progress		1. Akan mendata pegawai yg telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Sisialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan memperti mbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan sehingga memeberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pemanfaatan Informasi dapat berupa :

1. Penyesuaian aktifitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikunya

Pemanfaatan Informasi Kinerja terhadap capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I sebagai berikut :

1. IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
   IKU ini baru muncul pada target Renstra 2025-2029. Pada defenisi operasional dinyatakan bahwa tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil uji. UPT juga harus melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampel banyak faktor yang harus menjadi perhatian dan harus dilaksanakan karena menjadi penentu realisasi IKU tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian. Target IKU ii tercapai, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampel sediaan farmasi telah dilakukan sesuai pedoman
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
   Realisasi IKU ini dihitung pada akhir tahun, namun progress sudah bisa dihitung setelah diberikan KIE Farmakovigilans berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang tinggi maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens untuk meningingatkan kembali tenaga kesehatan/piv farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Yang dimaksud ditindaklnajuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak anjut pengawasan antaralain terhadap produk TIE, rusak, kadaluarsa, TMS pemgujian, pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pemeriksaan terkait hasil pengujian TMS, koordinasi dengan pusat terkait sampel TMS dan Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa.

Dari hasil triwulan 3 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa perlunya pelaksanaan tahap-tahap pengelolaan sampel sesuai defenisi operasional dengan ketepatan waktu penyelesaian pengujian dan sampling, percepatan sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS). Dapat dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu pertama setiap bulan sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

   Yang dimaksud sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB. Sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan sampel KLB melibatkan berbagai pihak oleh karena itu perlu meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB. Nilai IKU ini belum bisa ditetapkan karena masih pembahasa defenisi operasional di unit pengampu.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

   Usaha yag dilakukan untuk pencapaian target ini adalah dengan melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu 1 sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama serta melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

   Rendahnya nilai capaian kinerja ini disebabkan pada awal tahun masih sedikit sarana yang bisa mengirimkan CAPA nya, dimana sarana masih membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. diperlukan pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Tercapainya kinerja ini disebabkan telah terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan. Diperlukan komitmen petugas yang ditunjuk agar semua parameter pemeriksaan terpenuhi secara konsisten. Selain itu diperlukan kerjasama tim yang solid.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Keberhasilan pencapaian IKU ini belum terlihat karena realisasi belum dihitung, karena masih ada pembahasan defenisi operasional oleh unti pengampu

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Kriteria diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. namun realisasi belum dapat dihitung karena sesuai arahan dari Pusat dikeluarkan dulu dari perhitungan capaian di triwulan I karena defenisi operasional masih dalam pembahasan unit pengampu.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL

pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Penyebab tidak tercapainya target IKU ini karena belum dipenuhinya kriteria sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Untuk itu perlu pelatihan peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan pangan olahan di sarana peredaran dan meningkatkan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana pangan di peredaran.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

    Berdasarkan rumusan perhitungan IKU ini dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Perencanaan yang disusun telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengawasan spesifik yang ditetapkan pada masing-masing komoditi, sehingga target IKU ini datap tercapai pada triwulan I tahun 2025

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa pada triwulan I telah memenuhi target yang ditetapkan. Terdapat kesalahan dalam menetapkan target IKU ini yang semula frekuensi bulanan bersifat flat sehingga dilakukan perbaikan target untuk menyesuaikan dengan manual IKU dan perhitungan target yang baru berdasarkan jumlah sarana yang telah diperiksa dan diselesaikan pada triwulan I yaitu sebanyak 2 sarana.

13. Nilai pemenuhan Laboratoeium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

    Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Standar Ruang Lingkup, standar peralatan laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi. Capaian diperoleh sangat baik disebabkan rencana pemenuhan SKL di TW I yang meliputi pemenuhan Standar MA yang Terverifikasi, semuanya terealisasi dengan baik dan target terealisasi sesuai perencanaan serta karena kolaborasi pengawalan dan kerja sama tim laboratorium untuk meningkatkan kinerja, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian.

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Belum tercapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan perlunya penyusunan ulang perencanaan karena penyesuaian target dengan anggaran yang masih tersedia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU ini adalah dengan Mengoptimalkan KIE melalui media sosial. meningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan, Meningkatkan interaksi dengan peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab, menggunakan alat peraga pada saat sosialisasi dan Meningkatkan kompetensi petugas.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan I ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksankan dapat memenuhi target revisi ini.

16. Jumlah desa pangan aman

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan I ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksankan dapat memenuhi target revisi ini.

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan I ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksankan dapat memenuhi target revisi ini.

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Keberhasilan Pencapaian Indikator ini adalah karena Penetapan target sarana UMKM pangan. OBA dan kosmetik yang akan di dampingi telah dilakukan dengan memastikan komitmen masing-masing pelaku usaha akan melaksanakan tahapan pendampingan secara konsisten.KIE Keamanan Pangan pada Triwulan I dapat dilaksanakan pada Triwulan I yang sebelumnya direncanakan pada Triwulan II mengingat jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan IP CPPOB masih terbatas. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan mendahului perencanaan awal mengakibatkan progress meningkatkan sehingga mendapat capaian katergori tidak dapat disimpulkan.

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Rendahnya realisasi IKU ini disebabkan oleh penentuan target perkara yang sebelumnya telah dihitung perencanaan untuk 1 tahun sesuai target efisiensi anggaran sebanyak 1 perkara . Namun terdapat perubahan dari unit pengampu untuk menghitung realisasi sesuai pembobotan perkara sebelum efisiensi anggaran (awal) sebanyak 4 perkara menyebabkan pembagi pembobotan besar sehingga hasil yang didapat menjadi kecil. Keterlambatan dalam informasi terhadap adanya kejelasan penentuan target pada masa transisi target efisiensi dan buka blokir sehingga perencanaan kurang optimal. Untuk menindaklanjuti ini maka akan dilakukan revisi Target bulan April sd Desember berdasarkan perhitungan 4 perkara.

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Nilai IKU ini terdiri dari Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan. Nilai Balai Besar POM di Padang mendapatkan 50% sesuai dengan target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dan jumlah laporan analisis penelusuran siber BBPOM di Padang telah sesuai kualitas analisanya nya dan dikirimkan tepat waktu.

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

    Nilai Indeks Pelayanan baru dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan nilai IPP tahun 2024 dapat dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap nilai yang masih rendah dan pemenuhan data dukung.

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.

    Nilai Pembangunan ZI dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan nilai Indeks RB BBPOM di Padang Tahun 2024 belum memenuhi syarat untuk WBBM (90), untuk itu telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi Inspekytorat nilai RB tahun 2024 yang dituangkan dalam penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi RB 2025.

23. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

    Nilai AKIP dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan evaluasi Inspektorat atas nilai AKIP tahun 2024 maka telah dilakukan perbaikan terhadap rekomendasi atas hasil penilaian AKIP 2024 dan perbaikan juga akan dimasukkan dalam lembar kerja Evaluasi Sakip Tahun 2025

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

    Nilai Kinerja Anggaran dihitung pada akhir tahun, namun untuk nilai IKPA dihitung setiap bulan. Untuk itu ditargetkan BBPOM di Padang mendapatkan nilai IKPA maksimal pada setiap bulan. Untuk itu diperlukan perencanaan, program, dan pelaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan butir-butir indikator penilain IKPA.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

    Nilai Indeks Manajemen Risiko diukur pada akhir tahun. Nilai Maturitas Risiko BBPOM di Padang belum mencapai 3 dengan nilai 2,906. Untuk itu perlu perbaikan penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Padang supaya mendapatkan nilai 3 dengan Tingkat maturitas risk defined.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran dengan pagu awal sebesar Rp.36.739.481.000 (termasuk blokir sebesar Rp.4.867.946.000) sesuai yang telah ditetapkan pada DIPA Nomor: SP DIPA-063.01.2.432810/2025 tanggal 02 Desember 2024. Kemudian terdapat perubahan dan pergeseran pagu sebagai berikut:

1. Pemblokiran mandiri dalam rangka Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara pada belanja barang dan belanja modal dengan total sebesar Rp.17.106.396.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 01 Pada tanggal 22 Februari 2025.
2. Pemanfaatan belanja modal dari rincian output pengadaan alat laboratorium ke rincian output layanan perkantoran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran gaji PPNPN sampai Desember 2025 sebesar Rp.272.970.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Maret 2025.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengelola anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Kemudian dalam rangka kebijakan efisiensi anggaran maka telah dilakukan penyesuaian target anggaran dan ouput yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2025. Pagu anggaran akhir pada triwulan 1 tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebesar Rp.36.739.481.000 dengan total blokir pada belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 17.106.396.000 sesuai dengan DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Maret 2025. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.3.111.535.304 atau 8,47%. Adapun realisasi setelah dikurangi pagu blokir sebesar 15,85%, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	PAGU BLOKIR (Rp.)	REALISASI (Rp.)*	PERSENTASE REALISASI (%)	
				SEBELUM DIKURANGI BLOKIR	SETELAH DIKURANGI BLOKIR
Belanja Pegawai	9,087,481,000	-	2,363,124,310	26.00%	26.00%
Belanja Barang	22,525,838,000	16,223,264,000	748,410,994	3.32%	11.87%
Belanja Modal	5,126,162,000	883,132,000	-	0.00%	0.00%
Total	**36,739,481,000**	**17,106,396,000**	**3,111,535,304**	**8.47%**	**15.85%**

*Ket: *SAKTI Basis SP2D*

Realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 yang telah mencapai target anggaran per jenis belanja adalah belanja pegawai sedangkan untuk belanja barang belum mencapai target dan belanja modal belum ada realisasi. Anggaran belanja modal belum ada realisasi karena adanya kebijakan efisiensi belanja pada bulan februari sehingga anggaran belanja modal dihold dahulu pengadaannya sampai revisi efisiensi blokirnya selesai dan disahkan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 25 indikator kinerja dengan 9 sasaran strategis serta 23 rincian output sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran per Kinerja

Tabel 3.54. Realisasi Anggaran per Indikator Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR					ANGGARAN		
		TARGET TAHUN 2025	MARET		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)		2025		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	PAGU*	REALISASI	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	96.38	111.10	111.10	586,056,000	19,906,795	3.40
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	-	-	-	-	36,100,000	-	0.00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	399,354,650	6,296,919	1.58
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-	-	32,888,030	518,570	1.58
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	37,586,320	592,651	1.58
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	89.50	39.88	44.56	44.56	27,412,110	529,155	1.93

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	5,350,560	122,400	2.29
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	-	-	-	39,237,440	897,600	2.29
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	92.00	-	-	-	557,379,570	10,759,485	1.93
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	301,533,210	5,820,705	1.93
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	99.78	123.05	123.05	27,412,110	529,155	1.93
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	5,033,000	680,000	13.51
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76.70	76.70	81.20	105.87	105.87	7,518,001,000	21,464,240	0.29
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.00	88.00	86.17	97.92	97.92	8,429,205,000	600,000	0.01
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14.00	5.00	5.00	100.00	35.71	574,628,000	-	0.00
16	Jumlah desa pangan aman	6.00	5.00	5.00	100.00	83.33	882,108,000	-	0.00
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	5.00	5.00	100.00	500.0	120,163,000	-	0.00

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00	14.50	18.00	124.14	22.50	40,082,000	340,000	0.85
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90.00	42.50	20.00	47.06	22.22	480,364,000	14,729,000	3.07
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	144,506,000	-	0.00
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-	-	-	-	124,228,000	3,470,000	2.79
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.00	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.00	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
TOTAL							36,739,481,000	3,111,535,304	8.47

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja tertinggi sebesar 124,14% yaitu pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan realisasi anggaran sebesar 0,85%. Sedangkan untuk capaian kinerja terendah sebesar 44,56% yaitu pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan realisasi anggaran sebesar 1,93%.

Kemudian untuk realisasi anggaran indikator tertinggi sebesar 18,47% yaitu pada indikator:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM namun capaian indikator kinerja diukur pada akhir tahun.
2. Nilai AKIP UPT BPOM namun capaian indikator kinerja diukur pada akhir tahun.
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM namun capaian indikator kinerja diukur pada akhir tahun.
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM namun capaian indikator kinerja diukur pada akhir tahun.

Sedangkan untuk realisasi anggaran terendah sebesar 0% yaitu pada indikator:

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO namun capaian indikator kinerja diukur pada akhir tahun
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian indikator 100%.
3. Jumlah desa pangan aman dengan capaian indikator 100%.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian indikator 100%.
5. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian indikator 100%.

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.55. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Rata-Rata Nilai Indikator	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93.78	2,050,310,000	45,973,435	2.24
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	5,033,000	680,000	13.51
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105.87	7,518,001,000	21,464,240	0.29
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	99.48	10,006,104,000	600,000	0.01
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	124.14			

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	47.06	480,364,000	14,729,000	3.07
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	144,506,000	0	0.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	124,228,000	3,470,000	2.79
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	16,370,853,000	3,024,278,629	18.47
Total		**95.76**	**36,739,481,000**	**3,111,535,304**	**8.47**

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian sasaran tertinggi 124.14% yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan realisasi anggaran sebesar 0,85%. Sedangkan nilai pencapaian sasaran terendah 47,06% yaitu pada sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar 3,07%.

Kemudian realisasi anggaran sasaran strategis tertinggi sebesar 18,47% yaitu pada sasaran strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan nilai pencapaian sasaran belum dapat diukur. Sedangkan realisasi anggaran sasaran strategis terendah sebesar 0% yaitu pada sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai pencapaian sasaran 100%.

c. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu 2025*	Realisasi	%
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,135,067,000	100,960,480	0.46
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,604,414,000	3,010,574,824	20.61
Total		**36,739,481,000**	**3,111,535,304**	**8.47**

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	KRO /RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	3	21.42	21.42	144,506,000	-	0
2	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	150	13.4	18.96	124,228,000	3,470,000	2.79
3	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	150	0	0.55	8,287,390,000	-	0
4	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	24.99	24.99	884,000,000	13,703,805	1.55
5	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	7	21.21	21.21	141,815,000	600,000	0.42
6	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	0	121,000,000	-	0
7	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	0	100,000,000	-	0
8	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	0	661,439,000	-	0
9	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	24.99	24.99	3,274,278,000	21,464,240	0.66
10	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	1	5	5	480,364,000	14,729,000	3.07
11	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	5	5	574,628,000	-	0
12	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	5	5	882,108,000	-	0
13	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	5	5	120,163,000	-	0

14	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36,100,000	-	0
15	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	18	18	40,082,000	340,000	0.85
16	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	59	11.17	11.17	469,829,000	7,408,140	1.58
17	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	95	9.19	9.19	586,056,000	19,906,795	3.4
18	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	9	17.64	17.64	44,588,000	1,020,000	2.29
19	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	2	40	40	5,033,000	680,000	13.51
20	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	98	14.36	14.36	913,737,000	17,638,500	1.93
21	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	10	15	4,243,723,000	-	0
22	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	24.99	24.99	8,000,000	5,970,000	74.63
23	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	24.99	24.99	14,596,414,000	3,004,604,824	20.58
Total				**30432**	**-**	**619**			**36,739,481,000**	**3,111,535,304**	**8.47**

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel di atas menunjukkan rincian output dengan progres tertinggi 100% yaitu pada rincian output Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Kemudian realisasi anggaran tertinggi sebesar 74,63% yaitu pada rincian output Layanan BMN dengan capaian rincian output 24.99%.

d. Pengukuran Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.58. Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output (Target)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	96.38	111.10	24,271,362	19,906,795	82.02	**1.35**	**0.35**	**95 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	78.90	92.82	7,341,853	6,296,919	85.77	**1.08**	**0.08**	**100 %**	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	604,623	518,570	85.77	-	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	78.75	92.65	690,998	592,651	85.77	**1.08**	**0.08**	**100 %**	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	39.88	44.56	812,100	529,155	65.16	**0.68**	**-0.32**	Tidak Efisien	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	-	122,400	-	-	-	-	-

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	-	-	-	897,600	-	-	-	-	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	-	-	16,512,699	10,759,485	65.16	-	-	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	63.44	74.64	8,933,099	5,820,705	65.16	**1.15**	**0.15**	Tidak Efisien	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	99.78	123.05	812,100	529,155	65.16	**1.89**	**0.89**	**88 %**	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40.00	40.00	100.00	680,000	680,000	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**	Efisien
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76.70	81.20	105.87	69,613,997	21,464,240	30.83	**3.43**	**2.43**	**75 %**	Tidak Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	88.00	86.17	97.92	23,010,000	600,000	2.61	**37.55**	**36.55**	**75 %**	Tidak Efisien

	wilayah kerja UPT										
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5.00	5.00	100.00	2,720,000	-	0.00	-	-	-	-
16	Jumlah desa pangan aman	5.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.50	18.00	124.14	-	340,000	-	-	-	-	-
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.50	20.00	47.06	18,034,995	14,729,000	81.67	**0.58**	**-0.42**	Tidak Efisien	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	2,099,998	-	0.00	-	-	-	-
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	9,040,000	3,470,000	38.38	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
TOTAL				**88.97**	**154,805,127**	**71,667,190**	**46.30**	**1.93**	**0.93**	**88 %**	Efisien

*Ket: * Target Anggaran TW 1 sesuai RPD TW 1*

Pada triwulan I tahun 2025 telah terdapat 17 indikator yang dapat diukur dari 25 indikator, dan 11 indikator yang dapat dihitung efisiensinya. Dari 11 indikator berdasarkan tingkat efisiensi maka 6 indikator dikategorikan efisien dengan persentase 88%, 95%, dan 100% dan 5 indikator tidak efisien. Jadi secara secara total tingkat efisien 88% dengan nilai tingkat efisiensi 0,93.

Tabel 3.59. Nilai Efisiensi Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Output (Target %)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.90	74.84	**1.20**	**0.20**	**100 %**	Efisien
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	100.00	**1.00**	**-**	**100 %**	Efisien
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105.87	0.65	**162.40**	**161.40**	**75 %**	Tidak Efisien
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	97.92	2.61	37.55	36.55	**75 %**	Tidak Efisien
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	124.14	0.00	**-**	**-**	**-**	**-**
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	47.06	81.67	**0.58**	**-0.42**	Tidak Efisien	
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	0.00	**-**	**-**	**-**	**-**

SS8	Layanan Publik UPT yang prima	-	38.38	-	-	-	-
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	110.30	-	-	-	-
Total		**88.13**	**51.95**	**1.70**	**0.70**	**90 %**	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas maka 2 sasaran strategis efisiensi, 3 sasaran strategis tidak efisien, dan 4 sasaran strategis belum dapat diukur.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Realisasi anggaran pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah Rp.45,973.435 dari pagu RPD triwulan I Rp.61.978.834. dengan persentase capaian anggaran 74,18%. Sasaran strategis ini memiliki 11 indikator namun tingkat efisensi yang telah bisa diukur adalah 7 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0,17, capaian sasaran strategis lebih besar daripada realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025. Hal menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis yaitu kegiatan sampling, pengujian, dan pengawasan sarana.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah Rp.680.000 dari pagu RPD triwulan I Rp.680.000 dengan persentase capaian anggaran 100%. Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0, capaian sasaran strategis sama dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025. Hal menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis yaitu kegiatan pengawasan sarana produksi fortifikasi..

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
   Realisasi anggaran pada sasaran Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah Rp.21.464.240 dari pagu RPD triwulan I Rp69.613.997 dengan persentase capaian anggaran 30,83%. Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator dan

berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai TE 161,40 sehingga tidak efisien, capaian sasaran strategis lebih besar dari realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT adalah Rp.600.000 dari pagu RPD triwulan I Rp.25.730.000 dengan persentase capaian anggaran 2,33%. Sasaran strategis ini memiliki 4 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai TE 36,55,sehingga tidak efisien, capaian sasaran strategis lebih besar realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025..

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT adalah Rp.14.729.000 dari pagu RPD triwulan I Rp.18.034.995 dengan persentase capaian anggaran 81,67%. Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai TE -0.42 sehingga tidak efisien, capaian sasaran strategis lebih rendah dari realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensi adalah dengan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran secara proporsional dan memaksimalkan ketercapaian target kinerja. Secara total per sasaran strategis efisiensi anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 90% dengan nilai TE 0,70. Jadi dengan sumber daya anggaran yang terbatas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tetap dapat mencapai sasaran strategis melebihi yang ditargetkan. Dalam konteks ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output kinerja dan input dalam bentuk anggaran.

BAB IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2025 BBOM di Padang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran strategis yang diukur dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Padang.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan 25 (Dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Padang tahun 2025.

Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

1. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Padang dengan membandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 93,47% dengan kategori Baik.

2. Balai Besar POM di Padang mencapai 1 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik, 3 sasaran dengan kategori baik, 1 sasaran dengan kategori cukup, 2 sasaran dengan kategori kurang dan 1 sasaran dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

3. Dari 25 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target Triwulan I Tahun 2024, terdapat 1 indikator yang nilai capaian kinerja diantara 100% < s.d ≤ 110% dengan kategori Sangat Baik, 8 indikator yang nilai capaian kinerja 90% < s.d ≤ 100% dengan kategori Baik, 1 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara 60% ≤ s.d ≤ 90% dengan kategori Cukup, dan 1 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara <60% serta 4 indikator mempunyai capaian melebihi 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

4. Terdapat perbedaan target indikator yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), hal ini dikarenakan adanya perubahan target indikator dari unit pengampu indikator terkait dan berdasarkan kesepakatan antara unit pengampu, Biro perencanaan dan Keuangan dan Balai Besar POM di Padang.

5. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 3.111.535.304 (Tiga milyar seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) atau sebesar 8,47% dari total pagu anggaran Tahun 2025 awal yaitu sebesar RP. 36.739.481.000 (Tiga puluh enama milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 15,85% dari total pagu anggaran setelah blokir yaitu sebesar Rp. 19.633.085.000 (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga jutadelapan puluh lima ribu rupiah) per 31 Maret 2025.

6. Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan capaian persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis dengan persentase capaian masing-masing sasaran strategis BBPOM di Padang maka diperoleh kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 90%.

.

Pernyataan pencapaian setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 93,78% (Baik)
2. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100% (Baik)
3. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Menguatkan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 105,87% (Sangat Baik).

4. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,48% (Baik)
5. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu, nilai capaian sasaran kegiatan 124,14% (Tidak dapat disimpulkan)
6. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 47,06% (Kurang)
7. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksankan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100,00% (Baik)
8. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang prima, capaian belum dihitung pada Triwulan I 2025
9. Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal capaian belum dihitung pada Triwulan I 2025

Capaian kinerja terhadap 16 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 105,87%.

b. Indikator dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 110%) sebanyak 7 IKU yaitu :

1. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 92,82%.
2. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 92,65%.
3. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100,00%.

4. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 97,92%.
5. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%.
6. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%.
7. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
8. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100%.

c. Indikator dengan kriteria Cukup (dengan capaian 60% ≤ x < 90%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 63,44%.

d. Indikator dengan kriteria Kurang (dengan capaian < 60%) sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 44,56%.
2. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 47,06%.

e. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian > 110%) sebanyak 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 111,10%.
2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%.
3. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 123,05%.
4. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 124,14%.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada Tahun 2024 berkisar antara 44,56% sampai dengan 124,14%. Persentase capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dan Persentase capaian indikator tertinggi adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang diperoleh Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut, terutama untuk realisasi yang belum tercapai pada Triwuan I Tahun 2025. Hal ini diperlukan untuk rencana perbaikan kinerja Balai Besar POM di Padang pada periode berikutnya.

Rencana perbaikan kinerja terhadap target indikator yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS), melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian. Melakukan percepatan realisasi anggaran terutama anggaran yang berhubungan dengan sampling dan sarana prarana pengujian laboratorium. Meningkatkan kompetensi petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian tentang pemahaman pedoman sampling dan pengujian serta petunjuk teknis terkait dan mengikuti pelatihan mandiri seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan.

2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS), melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian. Melakukan percepatan realisasi anggaran terutama anggaran yang berhubungan dengan sampling dan sarana prarana pengujian laboratorium. Meningkatkan kompetensi petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian tentang pemahaman pedoman sampling dan pengujian serta petunjuk teknis terkait dan mengikuti pelatihan mandiri seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan.

3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

   Untuk mencapai target kinerja ini, diperlukan pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan. Kegiatan ini dapat berupa : Mengingatkan petugas sarana terkait agar memastikan surat tindak lanjut/ keputusan rekomendasi hasil pemeriksaannya terkirim kepada pelaku usaha, baik secara hardcopy maupun softcopy, mengingatkan petugas sarana terkait agar selalu melakukan komunikasi secara terus menerus dan melakukan pengawalan sehingga pelaku usahanya segera mengirimkan CAPA. Diperlukan koordinasi dan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait agar segera melakukan pembinaan kepada pelaku usaha daerah binaannya. Pembinaan ini merupakan suatu output CAPA yang dapat dikirimkan lintas sektor terkait dan dapat dihitung sebagai respon tindak lanjut lintas sektor.

4. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Meningkatkan pengetahuan Pelaku usaha distribusi pangan yang belum optimal dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dengan melibatkan petugas yang kompeten dengan meningkatkan pelatihan kepada petugas. Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap sarana peredaran pangan ilegal dengan berbasis risiko. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang melibatkan pimpinan dalam pengawasan terpadu pangan di sarana peredaran dan meningkatkan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana pangan di peredaran.

5. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

   Mengoptimalkan KIE melalui media sosial dan eningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan dengan melalukan reviu terhadap materi KIE. Meningkatkan interaksi peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab serta meningkatkan pemahaman peserta dengan menggunakan alat peraga seperti: contoh produk, poster, brosur, dll. Hal ini memerlukan peningkatan kopetensi petugas KIE dalam memeberikan materi. Juga diperlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan. Meningkatkan kompetensi petugas.

6. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

   Perbaikan dan penyempurnaan kinerja dilakukan dengan perencanaan kegiatan yang matang, pengembangan taktik dan teknik intelijen yang harus semakin dikembangkan mengingat modus kejahatan sering berubah dan semakin canggih. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi petugas dan melengkapi peralatan intelijen sesuai pedoman. Juga perlu meningkatkan koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan Bea Cukai.

BBPOM DI PADANG

Jln. Gajah Mada, Gunung Pangilun
Padang - Sumatera Barat
https://padang.pom.go.id - https://bbpompadang,id

Lampiran

Lampiran 1

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Padang - Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, Website : https://padang.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



ABDUL RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBATDAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

ABDUL RAHIM

Lampiran 2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RESNTRA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**36.739.444**	**35.759.891**	**36.277.256**	**37.061.185**	**37.825.306**	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	86.75	88.50	90.25	92.00	93.75						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Provinsi Sumatera Barat	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85.00	87.00	89.00	91.00	93.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Provinsi Sumatera Barat	100	100	100	100	100						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Provinsi Sumatera Barat	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85.00	87.00	88.00	90.00	91.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	63.00	63.00	63.00	75.00	75.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	92.00	93.13	94.25	95.13	96.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	81.09	82.89	84.69	86.89	89.09						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		Provinsi Sumatera Barat	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	528	528	528	528	528						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	1034	1034	1034	1034	1034						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	51	51	51	51	51						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	682	682	682	682	682						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	63	63	63	75	75						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	5	5	5	5	5						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Provinsi Sumatera Barat	77	81.5	82.8	84.4	85.9						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 3: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Provinsi Sumatera Barat	88	88,88	89,76	90,64	91,52						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Provinsi Sumatera Barat	14	16	19	20	21						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Sumatera Barat	6	8	10	10	10						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	2	2						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Provinsi Sumatera Barat	27194	9200	9350	9400	9500						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	33	40	50	60	70						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

	RO 3: Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Provinsi Sumatera Barat	14	16	19	20	21						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 4: Desa Pangan Ama	Provinsi Sumatera Barat	6	16	26	36	47						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Provinsi Sumatera Barat	1	3	5	7	9						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Provinsi Sumatera Barat	80	81	82	83	84						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Provinsi Sumatera Barat	13	14	15	16	17						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Provinsi Sumatera Barat	90	91	92	93	94						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang	Provinsi Sumatera Barat	4	4	4	4	4						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Provinsi Sumatera Barat	90	91	92	93	94						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Provinsi Sumatera Barat	14	14	14	14	14						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Layanan Publik UPT yang Prima	Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	Provinsi Sumatera Barat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Provinsi Sumatera Barat	791	800	810	820	830						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	90	90,05	90,1	90,15	90,2						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	82	82,5	83	83,5	84						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	5	5	5	5	5						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	2.95	3	3,05	3,1	3,15						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Provinsi Sumatera Barat	10	32	32	32	32						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 4: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Layanan BMN		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 6: Layanan Perkantoran		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Lampiran 3

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213,Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



HILDA MURNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DIPADANG

HILDA MURNI

Lampiran 4

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HILDA MURNI
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HILDA MURNI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 36,739,481,000 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,408,037,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,331,444,000

Padang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

HILDA MURNI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 5

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	586.056.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	36.100.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	399.354.650
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	32.888.030
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	37.586.320
		06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	27.412.110

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	5.350.560
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	39.237.440
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	557.379.570
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	301.533.210
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	27.412.110
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63	5.033.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			76.7	76.7	76.7	76.8	76.8	76.8	76.9	76.9	76.9	77	7.790.971.000
4.	04 -	01 - Tingkat			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	8.429.205.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	5	25	50	60	65	70	75	90	100	14	574.628.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	5	25	50	60	70	80	90	100	100	6	882.108.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	5	25	50	50	100	100	100	100	100	1	120.163.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4.16	10.33	14.5	23.32	30.84	43.33	52.5	60	68.5	71	79.17	80	40.082.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.5	42.5	42.5	42.5	50	50	70	70	70	85	85	90	480.364.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	144.506.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	124.228.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	4.520.550.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	3.859.111.000
		03 - Nilai Kinerja												5	3.859.111.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Anggaran UPT BPOM													
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	3.859.111.000
														Total	36.739.481.000

Padang , 21 April 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DIPADANG

HILDA MURNI

Lampiran 6

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) BALAI BESAR POM DI PADANG
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW 1 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	96.38	111.10	111.10	110.00	Tidak dapat disimpulkan
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	92.82	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	92.65	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	39.88	44.56	44.56	44.56	Kurang
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00	Tidak dapat disimpulkan
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	-	-	-	-	
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	-	-	-	-	
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	74.64	Cukup

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW 1 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	99.78	123.05	123.05	110.00	Tidak dapat disimpulkan
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	100.00	Baik
13	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77.00	76.70	81.20	105.87	105.45	105.87	Sangat Baik
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	88.00	86.17	97.92	97.92	97.92	Baik
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Desa	6.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80.00	14.50	18.00	124.14	14.50	110.00	Tidak dapat disimpulkan
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90.00	42.50	20.00	47.06	22.22	47.06	Kurang
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	100.00	Baik
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW 1 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
22	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
23	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
24	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							
TOTAL CAPAIAN PK							**1531.45**		**1495.51**	
NILAI KINERJA ORGANISASI (RATA-RATA CAPAIAN PK)							**95.72**		**93.47**	
PREDIKAT NKO							**BAIK**			

Lampiran 7

PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PADANG
BULAN JANUARI TAHUN 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET JANUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JANUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	0.00	0.00	-		-
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-					-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	-	70.55	#VALUE!	-	#VALUE!	-
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	-			-		-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00		0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	60.00	67.04	67.04	67.04	-
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	0.00	0.00	-		-
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00		0.00	0.00	-	Cukup
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	0	0	-	-	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	79.00	92.94	79.00		Cukup
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	100.00	123.32	100.00	110.00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET JANUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JANUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	100.00	Baik

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET JANUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JANUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77.00		0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00		0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET JANUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JANUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80.00	4.16	4.00	96.15	4.00		Baik
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90.00	42.50	17.00	40.00	18.89	18.89	Kurang
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	100.00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET JANUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JANUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 8

PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PADANG
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET FEBRUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET FEBRUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	95.19	109.73	109.73	109.73	Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-				-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	77.75	91.47	91.47	91.47	Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	-	-				-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	0.00	0.00		0.00	-
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	36.67	40.97	40.97	40.97	Kurang
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	0.00	0.00			-
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	0	0		-	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	0	0		-	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	96.55	113.59	113.59	110.00	Tidak dapat disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	99.68	122.93	122.93	110.00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET FEBRUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET FEBRUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	100.00	Baik

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET FEBRUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET FEBRUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77.00	76.70	0.00	0.00		0.00	-
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	88.00	0.00	0.00		0.00	-
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
SS4		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET FEBRUARI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET FEBRUARI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!	-
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80.00	10.33	11.67	112.97	14.59	110.00	Tidak dapat disimpulkan
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90.00	42.50	17.00	40.00	18.89	40.00	Kurang
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	100.00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 9

PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PADANG
BULAN MARET TAHUN 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MARET (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	96.38	111.10	111.10	110.00	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-				-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	92.82	Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	-	-				-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	92.65	Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	39.88	44.56	44.56	44.56	Kurang
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00	Tidak dapat disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	-			-	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	-			-	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	74.64	Cukup
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	99.78	123.05	123.05	110.00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MARET (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALI SASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	100.00	Baik

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MARET (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALI SASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77.00	76.70	81.20	105.87	105.45	105.87	Sangat Baik
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	88.00	86.17	97.92	97.92	97.92	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik
SS4		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MARET (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80.00	14.50	18.00	124.14	22.50	110.00	Tidak dapat disimpulkan
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90.00	42.50	20.00	47.06	22.22	47.06	Kurang
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	100.00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 10

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan Januari

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)				Belanja (Data OMSPAN)		
					Target	Satuan	S.d Bulan Ini		Pagu	Realisasi	%
							RVRO	PCRO (%)			
1	DR	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	1	7,14	144.506.000	-	0,00
2	DR	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	70	8,85	124.228.000	-	0,00
3	DR	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	150	0,55	8.287.390.000	-	0,00
4	DR	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	8,33	884.000.000	-	0,00
5	DR	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	3	9,09	141.815.000	-	0,00
6	DR	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	121.000.000	-	0,00
7	DR	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	100.000.000	-	0,00
8	DR	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	661.439.000	-	0,00
9	DR	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	8,33	3.274.278.000	-	0,00
10	DR	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	0	0	480.364.000	-	0,00
11	DR	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	0	574.628.000	-	0,00

12	DR	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	0	882.108.000	-	0,00
13	DR	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	0	120.163.000	-	0,00
14	DR	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	0	0	36.100.000	-	0,00
15	DR	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	4	40.082.000	-	0,00
16	DR	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	38	7,2	469.829.000	-	0,00
17	DR	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	62	6	586.056.000	-	0,00
18	DR	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	1	1,96	44.588.000	-	0,00
19	DR	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	2	40	5.033.000	-	0,00
20	DR	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	14	2,05	913.737.000	-	0,00
21	DR	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	0	4.516.693.000	-	0,00
22	WA	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	8,33	8.000.000	-	0,00
23	WA	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	8,33	14.323.444.000	616.326.026	4,30
Total					**30432**	**-**	**341**		**36.739.481.000**	**616.326.026**	**1,68**

Lampiran 11

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan Februari

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
					Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
							RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	DR	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	2	14,28	14,28	144.506.000	-	0
2	DR	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	112	9,86	14,16	124.228.000	1.600.000	1,29
3	DR	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	150	0	0,55	8.287.390.000	-	0
4	DR	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	16,66	16,66	884.000.000	11.275.305	1,28
5	DR	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	5	15,15	15,15	141.815.000	600.000	0,42
6	DR	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	0	121.000.000	-	0
7	DR	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	0	100.000.000	-	0
8	DR	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	0	661.439.000	-	0
9	DR	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	16,66	16,66	3.274.278.000	-	0
10	DR	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	0	0	0	480.364.000	-	0
11	DR	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	0	0	574.628.000	-	0
12	DR	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	0	0	882.108.000	-	0

13	DR	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	0	0	120.163.000	-	0
14	DR	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36.100.000	-	0
15	DR	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	11,67	11,67	40.082.000	340.000	0,85
16	DR	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	49	9,28	9,28	469.829.000	7.034.474	1,5
17	DR	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	79	7,64	7,64	586.056.000	19.056.795	3,25
18	DR	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	7	13,72	13,72	44.588.000	340.000	0,76
19	DR	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	2	40	40	5.033.000	680.000	13,51
20	DR	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	52	7,62	7,62	913.737.000	11.438.500	1,25
21	DR	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	0	0	4.516.693.000	-	0
22	WA	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	16,66	16,66	8.000.000	-	0
23	WA	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	16,66	16,66	14.323.444.000	1.438.583.297	10,04
Total					**30432**	**-**	**503**			**36.739.481.000**	**1.490.948.371**	**4,06**

Lampiran 12

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan Maret

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
					Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
							RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	DR	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	3	21,42	21,42	144.506.000	-	0
2	DR	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	150	13,4	18,96	124.228.000	3.470.000	2,79
3	DR	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	150	0	0,55	8.287.390.000	-	0
4	DR	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	24,99	24,99	884.000.000	13.703.805	1,55
5	DR	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	7	21,21	21,21	141.815.000	600.000	0,42
6	DR	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	0	121.000.000	-	0
7	DR	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	0	100.000.000	-	0
8	DR	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	0	661.439.000	-	0
9	DR	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	24,99	24,99	3.274.278.000	21.464.240	0,66
10	DR	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	1	5	5	480.364.000	14.729.000	3,07
11	DR	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	5	5	574.628.000	-	0
12	DR	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	5	5	882.108.000	-	0
13	DR	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	5	5	120.163.000	-	0
14	DR	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36.100.000	-	0
15	DR	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	18	18	40.082.000	340.000	0,85

16	DR	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	59	11,17	11,17	469.829.000	7.408.140	1,58
17	DR	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	95	9,19	9,19	586.056.000	19.906.795	3,4
18	DR	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	9	17,64	17,64	44.588.000	1.020.000	2,29
19	DR	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	2	40	40	5.033.000	680.000	13,51
20	DR	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	98	14,36	14,36	913.737.000	17.638.500	1,93
21	DR	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	10	15	4.243.723.000	-	0
22	WA	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	24,99	24,99	8.000.000	5.970.000	74,63
23	WA	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	24,99	24,99	14.596.414.000	3.004.604.824	20,58
Total					**30432**	**-**	**619**			**36.739.481.000**	**3.111.535.304**	**8,47**

Lamprian 13

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan Januari 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		JANUARI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	586,056,000	-	0.00
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30.00	26.00	-	-	-	-	-	36,100,000	-	0.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	85.00	-	70.55	-	83.00	75.86	399,354,650	-	0.00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-	-	-	-	32,888,030	-	0.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	-	0.00	-	0.00	0.00	37,586,320	-	0.00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.50	89.50	-	60.00	-	67.04	65.57	27,412,110	-	0.00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,560	-	0.00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,237,440	-	0.00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,379,570	-	0.00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	85.00	79.00	92.94	92.94	83.16	301,533,210	-	0.00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.09	81.09	81.09	100.00	123.32	123.32	112.25	27,412,110	-	0.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	53.33	5,033,000	-	0.00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.90	76.70	-	-	-	-	-	7,790,971,000	-	0.00
		14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88.00	-	-	-	-	-	8,429,205,000	-	0.00

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		JANUARI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21.00	14.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	574,628,000	-	0.00
		16	Jumlah desa pangan aman	10.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	882,108,000	-	0.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	120,163,000	-	0.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84.00	80.00	4.16	4.00	96.15	5.00	4.76	40,082,000	-	0.00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	90.00	42.50	17.00	40.00	18.89	18.09	480,364,000	-	0.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.00	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	53.19	144,506,000	-	0.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.90	4.70	-	-	-	-	-	124,228,000	-	0.00
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90.20	90.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	154,081,507	3.83
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84.00	82.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	154,081,507	3.83
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	154,081,507	3.83
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.15	2.95	-	-	-	-	-	4,024,470,750	154,081,507	3.83
TOTAL											**36,739,481,000**	**616,326,026**	**1.68**

*Ket: *Pagu termasuk pagu blokir*

Lampiran 14

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan Februari 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		FEBRUARI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	86.75	86.75	95.19	109.73	109.73	101.54	586,056,000	19,056,795	3.25
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30.00	26.00	-	-	-	-	-	36,100,000	-	0.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	85.00	85.00	77.75	91.47	91.47	83.60	399,354,650	5,979,303	1.50
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	32,888,030	492,413	1.50
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,586,320	562,758	1.50
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.50	89.50	89.50	36.67	40.97	40.97	40.08	27,412,110	343,155	1.25
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,560	40,800	0.76
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	85.00	85.00	-	-	-	-	39,237,440	299,200	0.76
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	92.00	92.00	-	-	-	-	557,379,570	6,977,485	1.25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	85.00	96.55	113.59	113.59	101.63	301,533,210	3,774,705	1.25
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.09	81.09	81.09	99.68	122.93	122.93	111.89	27,412,110	343,155	1.25
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	53.33	5,033,000	680,000	13.51
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.90	76.70	-	-	-	-	-	7,790,971,000	-	0.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88.00	-	-	-	-	-	8,429,205,000	600,000	0.01
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21.00	14.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	574,628,000	-	0.00
		16	Jumlah desa pangan aman	10.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	882,108,000	-	0.00

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		FEBRUARI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	120,163,000	-	0.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84.00	80.00	10.33	11.67	112.97	14.59	13.89	40,082,000	340,000	0.85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	90.00	42.50	17.00	40.00	18.89	18.09	480,364,000	-	0.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.00	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	53.19	144,506,000	-	0.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.90	4.70	-	-	-	-	-	124,228,000	1,600,000	1.29
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90.20	90.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	362,464,651	9.01
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84.00	82.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	362,464,651	9.01
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	-	-	-	-	-	4,024,470,750	362,464,651	9.01
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.15	2.95	-	-	-	-	-	4,024,470,750	362,464,651	9.01
TOTAL											**36,739,481,000**	**1,490,948,371**	**4.06**

*Ket: *Pagu termasuk pagu blokir*

Lampiran 15

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan Maret 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		MARET		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	86.75	86.75	96.38	111.10	111.10	102.81	586,056,000	19,906,795	3.40
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30.00	26.00	-	-	-	-	-	36,100,000	-	0.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	85.00	85.00	78.90	92.82	92.82	84.84	399,354,650	6,296,919	1.58
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-	-	-	-	32,888,030	518,570	1.58
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	85.00	78.75	92.65	92.65	82.89	37,586,320	592,651	1.58
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.50	89.50	89.50	39.88	44.56	44.56	43.58	27,412,110	529,155	1.93
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	109.89	5,350,560	122,400	2.29
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	85.00	85.00	-	-	-	-	39,237,440	897,600	2.29
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	92.00	92.00	-	-	-	-	557,379,570	10,759,485	1.93
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	85.00	85.00	63.44	74.64	74.64	66.78	301,533,210	5,820,705	1.93
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.09	81.09	81.09	99.78	123.05	123.05	112.00	27,412,110	529,155	1.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	63.00	40.00	40.00	100.00	63.49	53.33	5,033,000	680,000	13.51
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.90	76.70	76.70	81.20	105.87	105.87	94.53	7,518,001,000	21,464,240	0.29
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.52	88.00	88.00	86.17	97.92	97.92	94.15	8,429,205,000	600,000	0.01
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21.00	14.00	5.00	5.00	100.00	35.71	23.81	574,628,000	-	0.00
		16	Jumlah desa pangan aman	10.00	6.00	5.00	5.00	100.00	83.33	50.00	882,108,000	-	0.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.00	1.00	5.00	5.00	100.00	500.00	250.00	120,163,000	-	0.00

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		MARET		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84.00	80.00	14.50	18.00	124.14	22.50	21.43	40,082,000	340,000	0.85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	90.00	42.50	20.00	47.06	22.22	21.28	480,364,000	14,729,000	3.07
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.00	90.00	50.00	50.00	100.00	55.56	53.19	144,506,000	-	0.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.90	4.70	-	-	-	-	-	124,228,000	3,470,000	2.79
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90.20	90.00	-	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84.00	82.00	-	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	-	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.15	2.95	-	-	-	-	-	4,092,713,250	756,069,657	18.47
TOTAL											**36,739,481,000**	**3,111,535,304**	**8.47**

Lampiran 16

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN 1 TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Indikator	Output (Target)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	96.38	111.10	24,271,362	19,906,795	82.02	**1.35**	**0.35**	**95 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	78.90	92.82	7,341,853	6,296,919	85.77	**1.08**	**0.08**	**100 %**	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	-	-	604,623	518,570	85.77	-	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	78.75	92.65	690,998	592,651	85.77	**1.08**	**0.08**	**100 %**	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	39.88	44.56	812,100	529,155	65.16	**0.68**	**-0.32**	Tidak Efisien	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	-	122,400	-	-	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	-	-	-	897,600	-	-	-	-	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	-	-	16,512,699	10,759,485	65.16	-	-	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	63.44	74.64	8,933,099	5,820,705	65.16	**1.15**	**0.15**	Tidak Efisien	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	99.78	123.05	812,100	529,155	65.16	**1.89**	**0.89**	**88 %**	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40.00	40.00	100.00	680,000	680,000	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**	Efisien
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76.70	81.20	105.87	69,613,997	21,464,240	30.83	**3.43**	**2.43**	**75 %**	Tidak Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.00	86.17	97.92	23,010,000	600,000	2.61	**37.55**	**36.55**	**75 %**	Tidak Efisien

No	Indikator	Output (Target)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5.00	5.00	100.00	2,720,000	-	0.00	-	-	-	-
16	Jumlah desa pangan aman	5.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.50	18.00	124.14	-	340,000	-	-	-	-	-
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.50	20.00	47.06	18,034,995	14,729,000	81.67	**0.58**	**-0.42**	Tidak Efisien	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	2,099,998	-	0.00	-	-	-	-
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	9,040,000	3,470,000	38.38	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	685,457,814	756,069,657	110.30	-	-	-	-
TOTAL				**88.97**	**154,200,504**	**71,148,620**	**46.14**	**1.93**	**0.93**	**88 %**	Efisien

Lampiran 17

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS TRIWULAN 1 TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Sasaran Strategis	Output (Target%)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.80	74.84	**1.20**	**0.20**	**100 %**	Efisien
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	100.00	**1.00**	**-**	**100 %**	Efisien
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105.87	0.65	**162.40**	**161.40**	Tidak Efisien	
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	97.92	2.61	**37.55**	**36.55**	Tidak Efisien	
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	124.14	0.00	**-**	**-**	**-**	**-**
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	47.06	81.67	**0.58**	**-0.42**	Tidak Efisien	
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	0.00	**-**	**-**	**-**	**-**
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	-	38.38	**-**	**-**	**-**	**-**
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	110.30	**-**	**-**	**-**	**-**
Total		**88.13**	**51.95**	**1.70**	**0.70**	**90 %**	**Efisien**

Lampiran 18

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indikator	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93.78	2,050,310,000	45,973,435	2.24
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	5,033,000	680,000	13.51
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105.87	7,518,001,000	21,464,240	0.29
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	99.48	10,006,104,000	600,000	0.01
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	124.14	40,082,000	340,000	0.85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	47.06	480,364,000	14,729,000	3.07
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	144,506,000	0	0.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	124,228,000	3,470,000	2.79
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	16,370,853,000	3,024,278,629	18.47
Total		**95.76**	**36,739,481,000**	**3,111,535,304**	**8.47**



KERTAS KERJA IKU TW 1 TAHUN 2025

BALAI BESAR POM DI PADANG

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Januari	38,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	80,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Februari	45,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	121,62	0,00	82,16
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Maret	55,00	85,00	95,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	79,09
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	April			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Mei			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Juni			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesu	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
Diukur akhir Tahun

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember	26,00			#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya	Realisasi (%)
3A	Balai Besar F	3	Persentase sampe	Januari	38,00	0,00	52,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	70,55
		3	Persentase sampe	Februari	45,00	85,00	88,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	77,75
		3	Persentase sampe	Maret	55,00	85,00	94,51	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,90
		3	Persentase sampe	April	111,00	85,00	76,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,21
		3	Persentase sampe	Mei	161,00	85,00	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,49
		3	Persentase sampe	Juni			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase sampe	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

4. Persentase sample KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
   Indikator belum dihitung

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Februari	85,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Maret	85,00	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,75
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	April	85,00	72,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Mei	85,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Juni		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yar	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

6. Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Januari	0,00	20,00	100,00	60,00
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Februari	89,50	40,00	33,33	36,67
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Maret	89,50	46,43	33,33	39,88
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	April		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Mei		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Juni		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Februari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Maret	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	April		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Mei		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Juni		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	9	Persentase sarana pı	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Belum diukur

9. Persentase fasilitas distribusi sedian farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Belum diukur

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Januari	85	10	10	20,00	7	10	49,00	10	10	10,00	79,00
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Februari	85	20	19	21,05	19	20	66,50	18	20	9,00	96,55
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Maret	85	50	58	17,24	26	50	36,40	49	50	9,80	63,44
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	April	85	66	66	20,00	66	66	70,00	63	66	9,55	99,55
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Mei	85	89	89	20,00	80	89	62,92	80	89	8,99	91,91
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Juni			125	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Juli			145	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Agustus			166	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	September			176	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Oktober			189	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	November			194	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar PC	10	Persentase sarana	Desember			194	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Januari	81,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Februari	81,09	100,00	100,00	98,41	100,00	100,00	99,68
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Maret	81,09	100,00	100,00	98,89	100,00	100,00	99,78
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	April		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Mei		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Juni		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Juli		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Agustus		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	September		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Oktober		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	November		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklə	Desember		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

12. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Januari	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Februari	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Maret	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	April	3		5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Mei			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Juni			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Juli			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Agustus			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	September			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Oktober			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	November			5	0,00
3A	Balai Besar PC	12	Persentase Ca	Desember			5	0,00

13. Nilai Pemenuhan Lab. Pengujian SF dan Pangan Olahan UPT Sesuai SKL

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Medan	70,1	78.6	86.0	50	41.9	70.7	69.1		102.3	
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78.9	82.3	80	46.0	76.5	73.5		104.1	
3	BBPOM di Semarang	79,7	85.3	85.2	90	47.3	82.4	70.3	76.2	117.3	108.2
4	BBPOM di Surabaya	80,4	77.2	84.9	30	48.5	66.4	72.7		91.4	
5	BBPOM di Samarinda	58,9	78.4	79.3	60	24.0	69.4	55.3		125.6	
6	BBPOM di Manado	68,7	76.1	85.7	90	35.3	76.7	67.5		113.6	
7	BBPOM di Makassar	73,3	83.3	85.6	80	28.5	77.6	72		107.8	
Rata-rata		**72.2**	**79.7**	**84.1**	**68.6**	**38.8**	**74.3**	**68.6**		**108.9**	

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.3	80.3	50	44.4	72.2	71		101.6	
2	BBPOM di Padang	77	83.4	87.0	100	21.3	81.2	76.7		105.9	
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	81.2	30	26.3	65.9	64		103	
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	20.5	73.9	70		105.6	
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	78.8	76.9	80	44.1	75.2	75		100.2	
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	81.0	50	26.4	67.9	62		109.6	
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.0	85.1	20	17.1	62.2	58		107.3	
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.0	84.6	70	29.5	74.9	72.9		102.7	
9	BBPOM di Bandung	81.7	84.5	86.8	80	64.0	82.0	79		103.8	
10	BBPOM di Jakarta	72.8	81.7	85.9	30	70.4	71.0	65.1	64.6	109.1	109.9

14. Tingkat efektifitas KIE SF dan Pangan Olahan diWilayah Kerja UPT

HASIL SURVEI EFEKTIFITAS KIE
BALAI BESAR POM DI PADANG
TW I TAHUN 2025

UNIT PELAKSANA TEKNIS	BPOM KIE			INDEKS			
	Tatap	Media	Total	INDEKS TATAP	INDEKS	INDEKS KIE	KATEGORI
BBPOM Padang	34	34	68	83,70	88,63	**86,17**	Efektif

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	Pengawalan	Realisasi
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Januari	0	0,00					0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Februari	5	0,00					0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Maret	10	5,00	0,00	0,00			5,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	April	30						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Mei	60						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Juni	62,5						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Juli	65						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Agustus	70						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	September	80						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Oktober	90						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	November	100						0,00
3A	Balai Besar POM	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuda	Desember	14						100,00

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari		0,00					0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5	0,00					0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	10	5,00					5,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	30						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	35						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	52,5						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	65						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	75						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	85						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	95						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100						0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	6						100,00

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Januari	0	0,00					0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Februari	5	0,00					0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Maret	10	5,00					5,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	April	25						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Mei	60						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Juni	70						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Juli	100						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Agustus	100						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	September	100						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Oktober	100						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	November	100						0,00
3A	Balai Besar POM d	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komuni	Desember	1						100,00

18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Januari	4,16	4,00	0,00	0,00	4,00
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Februari	10,33	9,00	13,00	13,00	11,67
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Maret	14,5	22,00	15,50	16,50	18,00
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	April	23,32				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Mei	30,84				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Juni	43,33				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Juli	52,5				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Agustus	60				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	September	68,5				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Oktober	71				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	November	79,17				
3A	Balai Besar POM	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Desember	80				

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Januari	4	1	0	0	0			0		1	0,85			0	17,00
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Februari	4	1	0	0	0			0		1	0,85			0	17,00
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Maret	4	1	1	0	0,15			0		1	0,85			0	20,00
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	April					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Mei					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Juni					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Juli					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Agustus					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	September					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Oktober					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	November					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POI	19	Persentase Kebe	Desember					0			0			0			0	#DIV/0!

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber					
		B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3
1.	Aceh							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru							100,00%	75,00%	66,67%
5.	Denpasar							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta							100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura							100,00%	100,00%	83,33%
9.	Kupang							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Mataram							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang							100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya							100,00%	100,00%	100,00%

Activate V
Go to Setting

21. Nilai Pembangunan ZI UPT
Indikator diukur akhir Tahun

22. Nilai AKIP UPT
Indikator diukur akhir Tahun

23. Nilai Kinerja Anggaran UPT
Indikator diukur akhir Tahun

24. Indeks Manajemen Risiko UPT
Indikator diukur akhir Tahun

Lampiran 20

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JANUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
					Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	0,00	0,00	1. Ketentuan pelaksanaan sampling sesuai pedoman sampling yang terbaru (berbasis risiko) mengharuskan adanya evaluasi terlebih dahulu atas pemenuhan penilaian risiko terhadap produk obat yang ada di sarana terhadap ketentuan yang ada di pedoman sampling. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan sampling yang memenuhi kriteria sesuai perencanaan pada sarana yang dikunjungi sehingga mengharuskan sampling dilakukan pada sarana yang lain yang memenuhi kriteria risiko yang berdampak pada diperlukannya lebih banyak waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sampling. 2. Selain itu, tidak selalu sarana yang dijadikan target sampling memiliki jenis dan/atau jumlah yang memadai untuk sampel yang ditargetkan untuk disampling.	Meningkatkan pemahaman petugas melalui pembelajaran daring IDEAS dan membuat perencanaan sampling per bulan sesuai analisis resiko	Januari	selesai	Meningkatkan pemahaman petugas melalui pembelajaran darin IDEAS dan membuat perencanaan sampling per bulan sesuai analisis resiko	-	sampling dan pengujian sediaan Farmasi dilaksanakan dan dilaporkan sesuai ketentuan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-	-	-	Pelaksanaan KIE farmakovigilans direncanakan Bulan Februari 2025, sesuai Juknis, pelaporan dihitung dari jumlah laporan sarana pelayanan kesehatan / jumlah sarana yang mengikuti KIE Farmakovigilans	Menyiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans secara daring untuk 45 sarana pelayanan kesehatan.	Februari 2025	progres		`- pendataan peserta, `- identifikasi narasumber eksternal, `- menyiapkan surat laporan rencana pelaksanaan KIE farmakovigilans `- menyiapkan surat permintaan narasumber dan undangan peserta	Terlaksananya KIE Farmakovigilans
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	70,55	-	Tidak ada kendala di pengujian, keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji melalui aplikasi SIPT	Februari 2025	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Melakukan monitoring terhadap sampling produk dan pengujian pangan olahan, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam tindak lanjut hasil uji produk pangan olahan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	-	0,00	-	sampel masuk bulan januari selesai uji dilaksanakan sesuai time line	terus meningkatkan koordinasi internal dalam melakukan tindak lanjut terhadap sampel kasus KLB	Februari 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter uji sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		melakukan monitoring terhadap sampel KLB yang diuji di laboratorium BBPOM Padang
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	0,00	-	Belum ada sampel PIRT yang disampling pada bulan Januari	melaksanakan sampling sampel PIRT pada bulan Februari	Desember 2025	Progres		sampling dilakukan bertahap pada bulan selanjutnya	Melakukan monitoring terhadap capaian sampling dan pengujian sesuai ketentuan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	-	60,00	-	Di bulan ini belum ada pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan saranannya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.	Februari 2025	Selesai	- Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	- Monitoring proses penarikan mandiri produk yang TMK dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00	0,00	0,00	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	79,00	92,94	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Tercapai target
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	100,00	123,32	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- - Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.	Februari 2025	Selesai	- - Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai.	- Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana telah dikirimkan kepada pelaku usaha
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	-	-	-	Penyesuaian perencanaan dengan Tools SKL konsep terbaru 2025-2029 (SRL, Kompetensi, Peralatan, Verifikasi MA (tambahan di konsep terbaru)	Penyusunan perencanaan sesuai dengan Tools SKL	Februari	Selesai	Penyusunan perencanaan sesuai dengan Tools SKL		Perencanaan 4 Aspek SKL dalam Tools sudah diselesaikan semua lab

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JANUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
					Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	-	-	-	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - Instruksi Kedeputi II untuk mengadakan KIE melalui Car Free Day dalam rangka HUT BPOM ke 24. - Belum tersedia link survei Efektifitas KIE.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Melaksanakan KIE melalui CFD sesuai instruksi Kedeputian II dengan merevisi anggaran. - Pengukuran survei Efektifitas KIE	Januari	Progress	- Telah dilaksanakan KIE melalui CFD sesuai instruksi Kedeputian II dengan merevisi anggaran pada tanggal 19 Januari 2025 yang dihadiri oleh 150 peserta.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Pengukuran survei Efektifitas KIE menunggu Link dari Pusat.	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun, menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program terbaru	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait petunjuk teknis pelaksanaan program	Penyusunan Perencanaan pelaksanaan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
		16	Jumlah desa pangan aman	6,00	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Desa Pangan Aman Tahun 2025	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program terbaru	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait petunjuk teknis pelaksanaan program	Penyusunan Perencanaan pelaksanaan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	0,00	0,00	-	Belum ada penyusunan perencanaan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025	Penyusunan Perencanaan dilakukan setelah ada KAK/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program terbaru	Januari	Progress	Koordinasi dengan Unit Pengampu terkait petunjuk teknis pelaksanaan program	Penyusunan Perencanaan pelaksanaan Program menunggu pengesahan Petunjuk Teknis/KAK program yang terbaru	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	4,16	4,00	96,15	- Pelaku usaha UMKM belum memahami CPPOB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Februari 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan dalam rangka penerapan CPPOB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi		-Telah dillakukan pembinaan dalam rangka penerapan CPPOB - Telah dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	42,50	17,00	40,00	Maraknya peredaran obat bahan alam mengandung BKO, obat bahan alam ilegal dan kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik ilegal di wilayah Sumatera Barat.	Melakukan kegiatan intelijen dan laporan informasi kegiatan intelijen yang diinput pada aplikasi dashboard penindakan.	Desember 2025	progress	Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen	Penyelesaian perkara carry over	Penilaian perkara carry over yang diperoleh pada tahap P21 sesuai perencanaan
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	50,00	100,00	kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun rencana laporan analisis kerawanan kejahatan	
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	-	-	-	Tahun 2024 telah memperoleh nilai IPP 4,81 dengan kategori pelayanan prima. Telah melakukan : 1. Kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan sesuai standar pelayanan 2. Kegiatan layanan pengujian pihak ketiga sesuai standar pelayanan 3. Kegiatan layanan sertifkasi sesuai standar pelayanan, namun kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Menindaklanjuti laporan hasil tindak lanjut pemebrian informasi dan pengaduan sesuai standar layanan 2. Memberikan layanan pengujian pihak ketiga sesuai standar layanan 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen	Desember 2025	Progres	1. Telah melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Januari 2. Telah elakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Januari 3. Telah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Januari 4. Telah melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan januari	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Februari 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Februari 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Februari 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Februari	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JANUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
					Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	-	-	-	Zona 1 *- Program prioritas tahun 2024 tidak semua terlaksana, * Belum tersedia Rencana Kerja RB tahun 2025 *- Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur llaporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan Zona 2: *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU Zona 3 : Belum tersusunnya rencana kerja zona manajemen SDM. Belum tersusunnya rencana kinerja individu (penyusunan MPH dan pemilihan Katim) Zona 4 : Rencana kerja Zona Akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik. Terdapat kendala dalam penyusunan dan pelaporan capaian kinerja terkait realisasi, monev dan ketepatan waktu, hal ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi bersama tim Sakip, namun Nilai komponen hasil pada LHE RB tahun 2024 terkait capaian Kinerja masih rendah karena masih terdapat beberapa target IKU yang belum tercapai dan belum terdapat inovasi pada Zona Akuntabilitas Zona 5: *- Program prioritas tahun 2024 tidak semua terlaksana, * Belum tersedia Rencana Kerja RB tahun 2025 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Program prioritas tahun 2024 tidak semua terlaksana, * Belum tersedia Rencana Kerja RB tahun 2025 *Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU *Belum tersusunnya rencana kinerja individu (penyusunan MPH dan pemilihan Katim) *Terdapat kendala dalam penyusunan dan pelaporan capaian kinerja terkait realisasi, monev dan ketepatan waktu, hal ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi bersama tim Sakip, namun Nilai komponen hasil pada LHE RB tahun 2024 terkait capaian Kinerja masih rendah karena masih terdapat beberapa target IKU yang belum tercapai dan belum terdapat inovasi pada Zona Akuntabilitas *Belum dikirim laporan Gratifikasi TW 4 2024 *Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. *Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Zona 1 *- Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * - membuat rencana kerja RB 2025 *- Memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai pedoman Zona 2 *Melaksanakan Renja 2025 *Menjalankan program prioritas zona 2 (helpdesk) *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya Zona 3 - Menyusun rencana kerja zona manajemen SDM 2025 - Menyusun rencana kinerja individu (dimulai dengan penyusunan MPH berdasarkan IKU terbaru dan pemilihan Katim sesuai persyaratan) Zona 4 *Membuat rencana Kerja 2025 *Melakukan Monev Renja *Melaksakan inovasi terkait Monev Kinerja yaitu googlesite monev Kinera *Implementasi SAKIP untuk pencapian kinerja semua IKU di setiap bulan Zona 5 : * membuat rencana kerja RB 2025 *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE *Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * Membuat rencana kerja RB 2025 * Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya dan memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai pedoman *Menjalankan program prioritas secara kontinue telah dilaksanakan seperti helpdesk *Menyusun rencana kinerja individu (dimulai dengan penyusunan MPH berdasarkan IKU terbaru dan pemilihan Katim sesuai persyaratan) *Implementasi SAKIP untuk pencapian kinerja semua IKU di setiap bulan * Membuat laporan gratifikasi Triwulan IV tahun 2024 * Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal * Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik *Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Desember 2025	Progress	Zona 1 Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 * Monev Renja Tahun 2024 telah disusun Zona 5 *Penyusunan Renja 2025 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja *Laporan Gratifikasi Triwulan IV tahun 2024 telah dikirim Zona 6: -	Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE *Implementasi Inovasi yang telah direncanakan *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 sesuai pedoman * Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai berkesinambungan dan sesuai jadwal * Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik * Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko	Tercapainya target Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang Tahun 2025 Zona 1 * Program prioritas terlaksana * Monev Bulanan terlaksana sesuai ketentuan Zona 2: *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana Zona 5: * Program prioritas terlaksana * Monev Bulanan terlaksana sesuai ketentuan Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE *Tercapainya target Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang Tahun 2025 * Program prioritas terlaksana * Monev Bulanan terlaksana sesuai ketentuan *Terselesaikannya Renja 2025 * Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan.
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	-	-	-	Belum tercapainya nilai AKIP tahun 2024 sehingga berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat harus dilakukan perbaikan terhadap SAKIP BBPOM di Padang antara lain : 1. Belum memanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang 2. Masih terdapat hasil input data capaian indikator yang tidak sesuai, belum tertib, dan terdapat kesalahan data 3. Pelaksanaan pencapaian kinerja belum sepenuhnya sesuai SOP 4. Masih terdapat pengisian monev yang belum lengkap terkait permasalahan, rekomendasi dan rencana aksi dan ada yang belum berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan 5. Belum maksimal implementasi kebijakan pimpinan dalam pemberian reward and ounisment terkait dengan kierja 6. Masih terdapat Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, RAPK dll yang belum sesuai ketentuan dan tepat waktu dan kertas kerja yang belum lengkap	1. Memanfaatkan subsite untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang yang terdiri dari RKT, PK, RAPK, Lakip, Laptah dll 2. Melakukan input data capaian indikator dan aplikasi online lainnya secara akurat, tertib, dan tepat waktu 3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian dan pelaporan kinerja sesuai SOP dan mensosialisasikan SOP, cara pengisian monev dan pedoman terkait 4. Pengisian monev oleh semua ketua Tim dengan lengkap berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan sesuai petunjuk pengisian matriks 5. Membuat SK dan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemberian reward and punisment 6. Membuat Rancangan Renstra 2025-2029, RKT, PK, RAPK, Realisasi RAPK/RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, sesuai dengan pedoman dan dikirimkan tepat waktu	Desember 2025	Progres	1. RKT, PK dan RAPK sudah diupload, Lakip dan Laptah perlu finishing terlebih dahulu 2. Input data realisasi bualan Desember 2024 3. Implementasi sakip sesuai SOP 4. Pengisian monev capaian kinerja Desember 2024 oleh ka Tim 5. Terdapat SK reward and punisment 6. Laporan Evaluasi Internal TW 4 dan Lakip tahunan telah dikirim	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari 5. Implementasi Reward and punisment	Tercapainya target indikator Nilai AKIP Tahun 2025

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JANUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
					Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-	-	Nilai kinerja anggaran tahun 2024 telah mencapai target dengan nilai EKA 85,40 dan IKPA 99,13. Perhitungan NKA = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Pada tahun 2025 ini target berupa kriteria, yatu kriteria 5 (sangat baik) dengan range nilai 90,01 s.d. 100.	1. Mengontrol Jumlah Revisi DIPA yang dilakukan per semester 2. Mengontrol Deviasi Halaman III DIPA per bulan 3. Mempercepat Penyerapan Anggaran 4. Mempercepat Belanja Kontraktual 5. Mempercepat Penyelesaian Tagihan 6. Mengelola UP dan TUP dengan tepat waktu per bulan 7. Melaporkan Capaian Output secara tepat dan tepat waktu per bulan 8. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan RO SBK	Desember 2025	Progres	1. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan januari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan januari. 3. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan januari. 4. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan Januari.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 1 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan februari 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 6 Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan februari 7. Melaporkan capaian output Bulan Januari secara tepat dan tepat waktu	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	-	-	-	Tidak tercapainya target Tingkat Maturitas SPIP BBPOM Padang Tahun 2024 antara lain disebabkan oleh : '- Belum terdapat kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko - Masih terdapat risk event yajg belum jelas atau spesifik - Terdapat atribut penegndalian yang tidak selaras dengan aktifitas pengendalian - Masih terdapat penentuan level risiko yang tidak tepat - Terdapat tindakan mitigasi yang sama dengan pengendalian exixting - Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada	1. Membuat kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko 2. Membuat rumusan risk event yang jelas dan spesifik 3. Membuat atribut pengendalian yang diselaraskan dengan aktifitas pengendalian 4. Menetapkan level risiko sesuai dengan pedoman dan terdapat penurunan setelah dilakukan pengendalian 5. Menetapkan tindakan mitigasi yang tepat dan diluar pengendalian existing yang telah dilakukan sebelumnya 6. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dilakukan pengendalian 7. Meningkatkan pemahaman dan refresment pegawai tentang Manajemen risiko melalui sosialisasi pada apel pagi 8. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada	Agustus 2025	1. Selesai 2 sd 5 Semester 1 sudah dilaksanakan, progres untuk Daftar risiko semester 2 6 sd 8 Progres	1. Telah disusun kriteria atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak risiko 2. Telah disusun rumusan risk event yang jelas dan spesifik dengan melakukan reviu terhadap daftar risiko yang ada 3. Telah membuat atribut pengendalian yang diselaraskan dengan aktifitas pengendalian 4. Telah Menetapkan level risiko sesuai dengan pedoman dan sudah terdapat penurunan risiko pada level risidu setelah dilakukan pengendalian 5. Telah membuat tindakan mitigasi yang tepat dan diluar pengendalian existing yang telah dilakukan sebelumnya	1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifkasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Akan Melakukan penilaian risiko Semester II secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	FEBRUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,19	109,73	1. Perbedaan perhitungan Time Line pengujian untuk komoditi obat pada Pedoman Sampling (TL : 30 HK) dan Juknis Regional (TL : 15 HK), Juknis regional baru disosialisasikan pada awal Maret, Time Line pengujian pada Januari dan Februari masih mengacu pada Pedoman Sampling , sehingga beberapa item sampel yang dilaporkan pada bulan Februari tidak memenuhi Time Line 15 HK 2. Tidak terpenuhinya parameter uji pada sediaan multivitamin, pengujian hanya dilakukan terhadap Vitamin C dan vitamin B6, namun tidak dilakukan pengujian terhadap kandungan vitamin A.	1. Menginformasikan kepada Tim Pengujain komoditi obat terkait perubahan Time Line dari 30 HK menjadi 15 HK 2. Mempelajari kembali pedoman penetapan parameter uji pada Pedoman Sampling dan Pengujian serta perBPOM terkait persayaratan keamanan dan mutu masing-masing komoditi untuk memastikan acuan/syarat untuk masing-masing parameter uji	Maret	Progress	1. Menginformasikan kepada Tim Pengujain komoditi obat terkait perubahan Time Line dari 30 HK menjadi 15 HK 2. Mempelajari kembali pedoman penetapan parameter uji pada Pedoman Sampling dan Pengujian serta perBPOM terkait persayaratan keamanan dan mutu masing-masing komoditi untuk memastikan acuan/syarat untuk masing-masing parameter uji	-	- Target tercapai - Tim pengujian obat telah mengetahui perbahan Time line pengujian menjadi 15 HK, sehingga pelaksanan pengujian sampel berikutnya telah mengacu timeline 15 HK - penetapan parameter uji telah mengacu pada pedoman sampling dan pengujian
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25	Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25		Progres		Penghitungan dilaksanakan sesudah KIE PV 26 Februari 25	penghitungan capaian target diakhir tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	77,75	91,47	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini		37 sampel dapat diselesaikan pengujian sampai dengan Februari	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	0,00	0,00	Tidak ada kendala	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Februari 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		Tercapai target
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam mencapai target sampel PIRT karena adanya efisiensi sehingga ketersediaan reagen disesuaikan dg kemampuan lab dalam pengujian sampel PIRT,	4 sampel disampling bulan Februari	Progres		Sampling dilakukan secara bertahap	Peningkatkan kinerja
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	36,67	40,97	Di bulan ini masih sedikit pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan saranannya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	0,00	0,00	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	-	-	Pelaku usaha industri pangan rumah tangga belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pangan industri rumah tangga	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Solok dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan yang diproduksi aman dan bermutu.	Maret 2025	Selesai	'- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kota Solok dalam rangka pembinaan dan pengawasan IRTP melalui peningkatan pembinaan IRTP di Kota Padang seperti penyuluhan PKP bagi UMKM pangan olahan, pengawalan label pre-market dan post-market, pengawasan pengunaan bahan berbahaya, BTP dan bahan lain yang dilarang digunakan pada produk	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	- Telah dikirimnya surat tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kota Padan dan Dinas Kesehatan Kota Solok Telah dikirimnya surat tindak lanjut kepada pelaku usaha pangan olahan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	-	-	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	96,55	113,59	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Target tercapai
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,68	122,93	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Maret 2025	Progres	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Target tercapai
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	Kumulatif Triwulan	-	-	-	Verifikasi MA banyak yang harus dipenuhi karena baselinenya SRL Tools SKL yang sebelumnya (lama)	Masing2 Lab sudah mengangsur penyelesaian verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun di TW 1	Maret	Progres		Target Verifikasi TW I (diselesaikan paling lambat sesuai Time Line)	Verifikasi MA sesuai target TW 1 sudah diangsur diselesaikan masing-masing lab.

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	FEBRUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	-	-	-	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - Pelaksanaan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" - Permintaan KIE dari Universitas M. Natsir - Belum tersedia link survei Efektifitas KIE.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Melaksanakan KIE untuk Universitas M. Natsir - Pelaksanaan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" - Pengukuran survei Efektifitas KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan pusat	Februari	Progress	- Telah dilaksanakan KIE melalui CFD bersamaan dengan kegiatan "Balanjuang Durian yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Suamtera Barat" pada tanggal 2 Februari 2025. - Telah dilaksanakan KIE untuk Universitas M. Natsir pada tanggal 10 Februari 2025 - Pengukuran survei Efektifitas KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan puast.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 menunggu terbit Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program sekolah yang melaksanakan keamanan pangan	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai
		16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program desa pangan aman	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	0,00	0,00	-	Melakukan penyusunan perencanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas	Kebijakan efisiensi sehingga terjadi perubahan tahapan program yang ditetapkan oleh unit pengampu dan terjadi perubahan dalam penyusunan perencanaan	Maret	Progres	Penyusunan perencanaan program selesai telah dilakukan namun terjadi kebijakan efisiensi yang berimbas kepada perubahan tahapan pelaksanaan program	Melakukan revisi terhadap perubahan perencanaan yang telah disusun berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari unit pengampu	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	10,33	11,67	112,97	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM kosmetik belum memahami CPKB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Maret 2025	selesai	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	-	Target tercapai
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	17,00	40,00	Tidak ada kendala. Terjadi penurunan target karena revisi anggaran dari 4 perkara menjadi 1 perkara		Desember 2025	progress	Laporan kemajuan perkara	Penyelesaian Perkara cary over	Penilaian perkara carry over yang diperoleh pada tahap P21 sesuai perencanaan
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun perencanaan laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	#VALUE!	Hasil survei indeks pelayanan publik bulan januari 3,90 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Februari 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Februari 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Februari 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Februari	Desember 2025	Progress	1. Telah melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Februari 2. Telah melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Februari 3.Telah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Februari 4. Telah melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Februari	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Maret 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Maret 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Maret 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Maret	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	FEBRUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	Zona I * Program prioritas tahun 2025 belum ditetapkan *Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur llaporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan Zona 2 *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU *Penyusunan rencana kinerja individu belum rampung (penyusunan MPH dan Katim masih on progress) Zona 4 *Inovasi zona 4 belum dilaksanakan Zona 5 - Hasil IPAK Januari 3,98 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . - Hasil IPP Januari 3,90 GABUNGAN INPUT E PeRFORMANCE * Program prioritas tahun 2025 belum ditetapkan *Terdapat revisi Pedoman pembangunan ZI sesuai Keputusan Kepala Badan POM no 289 tahun 2024 yang mulai berlaku 16 Agustus 2024, antara lain mengatur laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI secara bulanan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU *Penyusunan rencana kinerja individu belum rampung (penyusunan MPH dan Katim masih on progress) *Realisasi kinerja, monev dan pengisian aplikasi online belum dilaksanakan karena DO masing-masing IKu belum final * Telah mendapatkan Nilai survei Persepsi Anti Korupsi Januari (SPKP) : 3,98 * Peningkatan nilai pokja pelayanan publik * Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. * Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . * Telah mendapatkan Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bulan Januari : 3,90	Zona 1 *- Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * - membuat rencana kerja RB 2025 *- Memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai pedoman Zona 3 - Menyelesaikan penyusunan Katim dan draft MPH Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE *Program prioritas 2025 akan ditetapkan dan akan dimonev tiap triwulan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program * Membuat rencana kerja RB 2025 sesuai pedoman * Memastikan kegiatan pemantauan bulanan berjalan sesuai pedoman *Menyelesaikan penyusunan Katim dan draft MPH *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 sesuai pedoman * Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal * Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik * Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Desember 2025	Progress	Zona 1 Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan Zona 5 Zona 6: -	Zona 1 Monitoring penyusunan program prioritas tiap zona dengan melengkapi rencana aksi Verifikasi penyusunan Renja 2025 Verifikasi monev bulanan pelaksanaan rencana kerja Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Monitoring penyusunan program prioritas tiap zona dengan melengkapi rencana aksi * Verifikasi penyusunan Renja 2025 * Verifikasi monev bulanan pelaksanaan rencana kerja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan * Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja2 RB yang berkesinambungan dan sesuai jadwal * Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik * Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Tercapainya target Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang Tahun 2025 Zona 2 *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Tercapainya target Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang Tahun 2025 *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana * Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan.
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Masih belum termanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang, karena laporan kinerja dan tahunan belum final 2. Realisasi RAPK, pengisian monev online dan manual bulan Januari belum bisa dilaksanakan karena realisasi belum bisa dihitung terkait DO yang belum final.	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari 5. Implementasi Reward and punisment	Desmber 2025	Progress	5. Implementasi Reward and punisment dengan pemberian penghargaan kepada pegawai berakhlak terbaik dan si paling rajin baraja serta realisasi anggaran dan capaian kinerja terbaik	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari dan Februari	Tercapainya target indikator Nilai AKIP Tahun 2025

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	FEBRUARI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Sudah Selesai)	(Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari belum bisa dilaporkan karena belum dibukanya periode pelaporan oleh Kemenkeu sehingga Nilai IKPA dan EKA belum maksimal	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 1 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan februari 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan Februari 7. Melaporkan capaian output Bulan Januari secara tepat dan tepat waktu 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK	Desember 2025	Progres	1. Telah melakukan Revisi DIPA sekaligus revisi RPD pada bulan februari 2. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan februari yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Telah mepercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan februari 4. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan februari. 5. Telah melakukan pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari 6. Telah mnyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan februari.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 1. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan maret. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan Maret 7. Melaporkan capaian output bulan januari-februari secara tepat dan tepat waktu. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Akan Melakukan penilaian risiko Semester II secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	Desember	Progres		"1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MARET			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	96,38	111,10	Angka realisasi belum dapat disimpulkan karena terkendala metode perhitungan pencapaian untuk komoditi OBASK dan Kosmetik	Berkoordinasi dengan tim perencanaanaan dan evaluasi, terkait rumus perhitungan yang ada pada template RHPK	Maret	Selesai	Melakukan perbaikan rumus hitung RHPK	Mengkomunikasikan dengan tim Roren BPOM terkait rumus perhitungan capaian RHPK	Capaian dapat dihitung dan dapat disimpulkan (Masih menggunakan perhitungan sementara)
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 2 sarana pelayanna kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen padang dan RS Saanin	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Memngingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Progres		`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Memngingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	belum tercapai, penghitungan di Bulan Desember 2025
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	78,90	92,82	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	50 sampel dapat diselesaikan pengujian	Maret	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	0,00	0,00	Tidak ada kendala	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Maret 2025	Selesai	Pengujian sampel dengan parameter sesuai hasil investigasi dan pedoman sampling serta sesuai time line		Tercapai target
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	78,75	92,65	Tidak ada kendala di pengujian, terjadi penurunan target karena efisiensi, Keterbatasan reagensia yang tersedia masih mencukupi pada TW 1 ini	4 sampel dapat diselesaikan pengujian	Maret	Selesai	Pengujian sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPT		Tercapai target
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	39,88	44,56	Di bulan ini masih sedikit pelaku usaha dan linsek yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan saranannya dimana inspeksi mulai dilakukan pun pada minggu terakhir januari. Perhitungan realisasi dilakukan dengan tambahan CAPA dari pemeriksaan akhir tahun sebelumnya	Target TW I disusun secara akumulatif dimana realisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu. Melakukan pengawalan dan desk CAPA secara rutin	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Pelaku usaha produksi sediaan farmasi yang diperiksa baru satu sarana, sesuai target perencanaan di TW I	Melakukan pemeriksaan sarana secara rutin sesuai prioritas pemeriksaan kepada target yaitu sebanyak 6 sarana produksi sediaan farmasi selama tahun 2025 yang didistribusikan secara proporsional pada TW I, II, III dan IV	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Peningkatan kinerja
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	-	-	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik, intensitas pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - - Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	April 2025	Selesai	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	- Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	-	-	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	63,44	74,64	Pelaku Usaha distribusi pangan olahan belum semuanya menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2025	Progres	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan	dilakukan tindakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi pangan olahan yang baik	Tercapai target
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,78	123,05	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	40,00	40,00	100,00	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	April 2025	Progres	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	Kumulatif Triwulan	76,70	81,20	105,87	Verifikasi MA banyak yang harus dipenuhi karena baselinenya SRL Tools SKL yang sebelumnya (lama)	Masing2 Lab sudah mengangsur penyelesaian verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun di TW 1	Maret	Selesai	Verifikasi MA TW I sesuai target	-	Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MARET			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	86,17	97,92	- Kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 belum disusun/ direncanakan. - KIE untuk UMK Pangan Olahan - Jumlah responden pengukuran survei Efektifitas KIE belum memenuhi target TW I.	- Menyusun perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkan Juknis Pengelolaan KIE BPOM RI - KIE untuk UMK Pangan Olahan. - Pengukuran survei Efektifitas KIE berdasarkan Link Kobo yang telah disediakan pusat sesuai dengan jumlah responden yang telah ditetapkan untuk TW I	Maret	Selesai	- Perencanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berdasarkanJuknis Pengelolaan KIE BPOM RI - Pelaksanaan KIE untuk UMK Pangan Olahan tanggal 16 Maret 2025	- Pengukuran survei Efektifitas KIEsudah memenuhi jumlah responden yang telah ditetapkan untuk TW I namun belum mencapai target perlu dilakukan beberapa interfensi seperti: meminta lebih spesifik judul materi yang diinginkan, meningkatkan interaksi dan meningkatkan layanan.	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi perubahan bobot tahapan program	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan pengenalan program - Penyampaian kriteria Sekolah/Madrasah yang akan dijadikan sebagai pilot project	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret 2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Sekolah Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan sekolah/madrasah intervensi (7 sekolah)	- Penetapan Sekolah/Madrasah intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
		16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi perubahan bobot tahapan program	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan pengenalan program - Penyampaian kriteria Desa/Nagari yang akan dijadikan sebagai pilot project	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret 2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Desa Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan nagari/desa intervensi (3 nagari)	- Penetapan Desa/Nagari intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	5,00	5,00	100,00	- Revisi penyusunan perencanaan tahapan program telah diselesaiakan berdasarkan petunjuk teknis dari unit pengampu - Terdapat tahapan program yang dihilangkan/digabung pelaksanaannya sehingga tejadi perubahan bobot tahapan program	- Pelaksanaan kegaitan diawali dengan melakukan Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan lintas sektor terkait sebagai daerah intervensi tahun 2025 dan pengenalan program - Penyampaian kriteria Pasar yang akan dijadikan sebagai pilot project	Maret	Selesai	- Telah terlaksana Audiensi Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Lintas Sektor terkait pada tanggal 24 Maret 2025, hal ini merupakan bagian dari Advokasi Lintas Sektor Pasar Pangan Aman - Telah tersampaikan kriteria pemilihan pasar intervensi (1 pasar)	- Penetapan Pasar intervensi sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan - Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu yang direncanakan pada Bulan April 2025 di Kabupaten Solok	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	14,50	18,00	124,14	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM kosmetik belum memahami CPKB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	April 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Tercapainya target
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	20,00	47,06	Masih beredarnya sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu di wilayah Sumatera Barat.	Melakukan kegiatan intelijen dan intensifikasi operasi penindakan	Desember 2025	Progress	Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. Melakukan intensifikasi operasi penindakan	Penyelesaian carry over	Tercapainya target pada akhir tahun. Tidak tercapainya target pada triwulan I disebabkan realisasi perkara dihitung berdasarkan target awal Dipa (4 perkara) bukan terhadap target efisiensi (1 perkara) sedangkan perencanaan dihitung terhadap target effisiensi anggaran.
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan, untuk laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu dari dari direktorat cegah tangkal, dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan menunggu rekomendasi dari direktorat cegah tangkal dan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Juni dan Desember			Menyusun rencana laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan	Target tercapai
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil survei indeks pelayanan publik bulan Februari 3,90 dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 98,65 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Maret 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Maret 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Maret 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Maret	Desember 2025	Progress	1. Telah melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Maret 2. Telah melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Maret 3.Telah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Maret 4. Telah melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Maret	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan April 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan April	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MARET			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	Zona 1 * Program prioritas tahun 2025 belum dituliskan target dan rencana aksi * Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI bulan maret belum ada Zona 2 *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU Zona 3 - Penunjukan Katim telah selesai, MPH masih dirampungkan oleh masing-masing Katim Zona 4 : *Rencana kerja dan program prioritas belum finalisasi *Masih diperlukan waktu untuk merancang inovasi googlsite monev kinerja Zona 5 - Nilai IPAK Februari 3,84 Zona 6 - Peningkatan nilai pokja pelayanan publik - Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. - Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko. - Nilai IPP Februaru 3,90 GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Program prioritas tahun 2025 belum dituliskan target dan rencana aksi * Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI bulan maret belum ada *Program prioritas sebagian zona sudah mulai dijalankan dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU *Penunjukan Katim telah selesai, MPH masih dirampungkan oleh masing-masing Katim *Masih diperlukan sumber daya dan waktu untuk merancang inovasi pada masing-masing zona * Nilai SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) bulan Februari 3,84 * Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. * Inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko. * Nilai SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan bulan Februari : 3,90	Zona 1 * Penetapan program prioritas 2025 * menyiapkan laporan pemantauan terhadap rencana kerja pembangunan ZI Zona 2 *Melaksanakan Renja 2025 *Menjalankan program prioritas zona 2 (helpdesk) *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya Zona 3 - Finalisasi penyusunan MPH dari katim ke anggota tim dan penginputan ke dalam SIMAKIN - Penyusunan SKP oleh masing-masing pegawai Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 *Penetapan program prioritas 2025 Zona 6 - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Penetapan program prioritas 2025 dan implementasi bagi yang sudah jalan * menyiapkan laporan pemantauan terhadap rencana kerja pembangunan ZI *Melaksanakan Renja 2025 *Melakukan Monev Pelaksanaan Renja dan program prioritas setiap bulannya * Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai yang berkesinambungan dan sesuai jadwal * Finalisasi penyusunan MPH dari katim ke anggota tim dan penginputan ke dalam SIMAKIN * Penyusunan SKP oleh masing-masing pegawai *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik *Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Desember 2025	Progress	Zona 1 Program prioritas sudah ditetapkan Rencana kerja sudah ditetapkan Monev rencana kerja sudah terlaksana Zona 2 *Penyusunan Renja 2025 *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 *Monev Bulanan pelaksanaan Renja Zona 3 Zona 4 Rencana Kerja dan target prioritas sudah ditetapkan Monev tw sudah diisi Persiapan inovasi Zona 4 Zona 5 Zona 6: - Penyusunan program/ rencana kerjai pokja pelayanan publik yang sesuai dengan pedoman - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu Surat Keputusan penghargaan dan sanksi, mekanisme penilaian pelaksanaan , tim penilai dan penhargaan bagi petugas pelayanan publik	Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 *Implementasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Monev renja bulan Maret 2025 *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan *Finalisasi Rencana Kerja RB 2025 Zona 5 Zona 6 - Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko . GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE *Implementasi Inovasi yang telah direncanakan pada semua zona *Monev renja bulan Maret 2025 *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan * Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Tercapainya nilai pembangunan ZI BBPOM di Padang Zona 1 * Program prioritas sudah ditetapkan * Rencana kerja sudah ditetapkan * Monev rencana kerja sudah terlaksana Zona 2 *Terselesaikannya Renja 2025 *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring *Monev Bulanan terlaksana Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 - Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik - Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko GABUNGAN INPUT E PERFORMANCE * Tercapainya nilai pembangunan ZI BBPOM di Padang * Program prioritas sudah ditetapkan * Rencana kerja sudah ditetapkan * Monev rencana kerja sudah terlaksana * Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan.
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Masih belum termanfaatkan subsite secara maksimal untuk publikasi Kinerja BBPOM di Padang, karena laporan kinerja dan tahunan belum final 2. Realisasi RAPK, pengisian monev online dan manual bulan Januari dan Februari belum bisa dilaksanakan karena realisasi belum bisa dihitung terkait DO yang belum final.	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 di subsite 2. Input data monev online bulan januari, februari di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari dan Februari	Desember 2025	Progress	-	1. Upload Lakip dan Laptah Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret	Tercapainya target indikator Nilai AKIP Tahun 2025

RENCANA TINDAL LANJUT (RTL)/MONEV REALISASI RAPK BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MARET			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari-februari belum bisa dilaporkan karena belum dibukanya periode pelaporan oleh Kemenkeu sehingga Nilai IKPA dan EKA belum maksimal. Target realisasi anggaran untuk belanja barang dan modal TW 1 tidak tercapai karena pada bulan februari dilakukan efisiensi anggaran dengan mekanisme pemblokiran dan untuk belnja modal adanya isntruksi untuk dihold dulu pengadaannya. Kemudian utntuk belanja barang ada relaksasi angagaran pada beberapa RO PN dengan emkanisme buka blokir yang usulan revisnya diajukan di akhir maret dan pengesahan DIPAnya keluar pada awal april sehingga target anggaran TW 1 menjadi lebih besar setelah relaksasi buka blokir. Namun untuk nilai IKPA TW 1 ada dispensasi dari Kemenkeu karena adanya kebijkan efisiensi dan juga libur hari raya yang cukup panjang.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 1. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan maret. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada Bulan Januari. 7. Melaporkan capaian output bulan januari-ferbuari secara tepat dan tepat waktu. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	Desember 2025	Progres	1. Telah menjaga Konsistensi RPD bulan maret yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Telah mepercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan maret. 3. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan maret. 4. Telah melakukan pembayaran belanja kontraktual pada bulan februari maret. 5. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan maret.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan april yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan april. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan april. 6. Melaporkan capaian output bulan januari-maret secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan april 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Manajemen risiko - Masih kurangnya pelatihan Manajemen Risiko SDM BBPOM di Padang - Belum melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain	"1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manjemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	Agustus	Progress		"1. Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko pada apel pagi 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	Tercapainya target indikator Indeks manajemen Risiko UPT tahun 2025

Lampiran 21

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213,Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.04.25.64 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terwujudnya visi dan misi Badan POM RI, dipandang perlu membuat rencana strategis dan rencana kerja yang terarah dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi kinerja yang telah dicapai;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.09 tahun 2004;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG.

Pertama : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Kepala Balai Besar POM di Padang
Ketua	: Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	: Vera Sribanon, S.Si., Apt.
Anggota	
Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm	: IKU 22,23,24,25
Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt.,M.Farm	: IKU 21
Dra. Patria Dehelen, Apt	: IKU 19

Rina Syukrina, S.Farm, Apt	: IKU 9,IKU 22
Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt	: IKU 8,12,18
Fitria, S.Si, Apt	: IKU 3,4,5,10
Fitra Yelli, S.Farm, Apt.,M.Farm	: IKU 6,7
Mutiara Yulanda, S.Farm, Apt	: IKU 1
Yelvina, S.Si, Apt	: IKU 4,13
Azfrianty, STP., M.Farm	: IKU 14,22
Reni Sepriyanti, S.Farm, Apt	: IKU 15,16,17
Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm	: IKU 3
Ade Cahyana, S.Si, Apt., M.Pharm	: IKU 11
Dilla Shavera, S.Si, Apt. M.Biomed	: IKU 2
Nining, M.H., S.Farm, Apt,	: IKU 20
Vera Sribanon, S.Si, Apt	: Tata Usaha
Bambang Hermanto, SM., M.M	: Tata Usaha
Nery Revisa, S.E., M.Sc.	: Tata Usaha
Sony Aulia Dwita AM, SE	: Tata Usaha
Airin Muchlis, SE	: Tata Usaha
Editor	: Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M. Eng.
	: Taruna Wadi, S.Kom

Kedua : Tugas tim adalah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Interim Triwulan I sd III 2025 dan Tahun 2025

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2025
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



HILDA MURNI

Lampiran
Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
Nomor : HK.02.02.3A.04.25.64
Tanggal : 19 Maret 2025

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Nomor IKU	Daftar Nama IKU
1	Indikator Kinerja Utama 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2	Indikator Kinerja Utama 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Indikator Kinerja Utama 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4	Indikator Kinerja Utama 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5	Indikator Kinerja Utama 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Indikator Kinerja Utama 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7	Indikator Kinerja Utama 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8	Indikator Kinerja Utama 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9	Indikator Kinerja Utama 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10	Indikator Kinerja Utama 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Indikator Kinerja Utama 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12	Indikator Kinerja Utama 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Indikator Kinerja Utama 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
14	Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan

	Utama 14	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
15	Indikator Kinerja Utama 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
16	Indikator Kinerja Utama 16	Jumlah desa pangan aman
17	Indikator Kinerja Utama 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
18	Indikator Kinerja Utama 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
19	Indikator Kinerja Utama 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
20	Indikator Kinerja Utama 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
21	Indikator Kinerja Utama 21	Indeks Pelayanan Publik
22	Indikator Kinerja Utama 22	Nilai Pembangunan ZI
23	Indikator Kinerja Utama 23	Nilai AKIP UPT BPOM
24	Indikator Kinerja Utama 24	Nilai Kinerja Anggaran
25	Indikator Kinerja Utama 25	Indeks Manajemen Risiko

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2025
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

HILDA MURNI